

PENGAJIAN DATA "KAWASAN MENTENG JILID 2"; GEDUNG-GEDUNG YANG TERKAIT DENGAN PERISTIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
TA 2022



PENGAJIAN DATA “KAWASAN MENTENG JILID 2”; GEDUNG-GEDUNG YANG TERKAIT DENGAN PERISTIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN



Tim Penulis:

Dr. Andi Sopandi, S.S., M.Si
Mushab Abdu Asy Syahid, S.Ars., M.Ars.
Machmud Mubarok, S.S.
Ridwan Maulana, Ir.
Mahaniza Djohanr, S.S.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
TA 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2"; Gedung-Gedung Yang Terkait Dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, dapat diselesaikan. Laporan kajian ini merupakan hasil kajian pendataan Kawasan Menteng khususnya dengan Gedung-Gedung terkait dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan, kerja sama antara Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan dengan konsultan.

Berdasarkan hasil pendataan Gedung-gedung bersejarah di Kawasan Menteng, yang berkaitan dengan peristiwa perumusan proklamasi kemerdekaan dan didasari oleh peristiwa yang ditelusuri, memiliki makna tematik, terkait dengan asrama dan basecamp Gerakan Pemuda yang memiliki kontribusi pelaksanaan proklamasi. Berkaitan dengan peristiwa Gerakan pemuda di atas, ada beberapa momentum bersejarah, yang kemudiaan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang politik, jiwa militan dan semangat nasionalisme yang bermuara dari beberapa kantung-kantung bangunan bersejarah di sekitar Kawasan Menteng, seperti: Asrama Cikini 71, Asrama menteng 31, De Prapattan 10, Laboratorium Mikrobiologi, dan Taman Proklamasi yang kemudian mereka mendapatkan pendidikan politik, semangat nasionalisme dan kemerdekaan, pemerintahan dan kenegaraan

Selanjutnya, dalam penjabaran Gedung-Gedung terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kawasan Menteng, ada beberapa hal yang dikaji dalam penjabaran di atas, meliputi: (a) Data dan informasi Riwayat gedung (dilihat dari Aspek Arsitektur dan Historis); (b) Status kepemilikan; (c) Lokasi gedung; (d) Pemanfaatan gedung dari masa ke masa; dan polarisasi kewilayahan terhadap gedung pada masa itu hingga kini.

Pada kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menyusun kajian ini sehingga dapat mengabdikan pada kemanfaatan pemerintahan dan masyarakat sekaligus memperoleh masukan dalam rangka pengayaan keilmuan yang berorientasi kepentingan masyarakat.

Akhirnya, Tim penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan kajian ini, Tim penulis membuka proses partisipasi masyarakat untuk menyampaikan masukan pada proses penyusunan kajian data Kawasan Menteng; khususnya Gedung-Gedung yang Berkaitan dengan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Jakarta, Juni 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Output Kegiatan.....	5
D. Lingkup Pekerjaan.....	5
E. Lokasi Kegiatan	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A.. Peranan Museum Sebagai Tempat Menggali Jatidiri Bangsa ...	8
B. Arah Pengembangan Pengkajian Gedung-Gedung Terkait Dengan Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi	11
1. Strategi Pengkajian	11
2. . Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai Pusat Informasi	13
3. Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai tempat Pelestarian	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan	15
B.. Metodologi.....	15
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Tahapan dan Alur Pengkajian Data “Kawasan Menteng Jilid 2”; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan	20
E. Desain dan Format Kajian.....	21

BAB IV GAMBARAN UMUM SEKITAR PROKLAMASI

A., Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	23
B., Gerakan Pemuda Menjelang Kemerdekaan	26
C. Peristiwa Rengasdengklok	35
D. Perumusan Naskah Proklamasi	46
E. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan	52
F. Berita Proklamasi ke Seluruh Wilayah Indonesia	58

BAB V GEDUNG-GEDUNG BERSEJARAH DI KAWASAN MENTENG

A. Perkembangan Kawasan Menteng	65
1. Sejarah Kawasan Menteng	65
2. Kawasan Menteng Sebagai Kota Taman	69
3. Kawasan Menteng Sebagai Pusat Gerakan Pemuda dan Gedung-Gedung Bersejarah Terkait Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi	75
B. Gedung-Gedung Bersejarah di Kawasan Menteng Terkait Dengan Perumusan Naskah Proklamasi	83
1. Asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (BAPERPI) ..	83
1.1 Sejarah Perkembangan Asrama BAPERPI.....	83
1.1.1 Terbentuknya BAPERPI di Jaman Pendudukan Jepang (1941-1945)	83
1.1.2 Asrama BAPERPI Mendorong Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.....	87
1.2. Tinjauan Arsitektur Asrama BAPERPI	88
1.3. Asrama BAPERPI dan Kelanjutan Cikini 71 Kini.....	96
2.. Asrama Prapatan 10	111
2.1 Perkembangan Asrama Parapattan 10.....	111
2.1.1 Sejarah Parapattan 10.....	111
2.1.2 Pusat Pendidikan Kedokteran	121
2.1.3 Masa Pergerakan Kemerdekaan	125
2.1.4 Asrama Parapattan 10: Wadah Gerakan Pemuda	130
2.2. Tinjauan Rancangan Arsitektur Parapattan 10 dan Keletakan Gedung.....	130
2.3 Deskripsi Bangunan	134

2.3.1 Denah dan Ruangan.....	134
2.3.2 Atap	135
2.3.3 Dinding	136
2.3.4 Pintu dan Jendela	137
2.3.5 Lantai.....	139
3. Asrama Menteng 31; Dari Hotel Mewah ke Asrama Perjuangan Menteng	141
3.1 Perkembangan Asrama Menteng pada Masa Awal Pembangunan Hotel Schomper (1930-1942).....	141
3.2 Tinjauan Arsitektur Hotel Schomper (Asrama Menteng 31)	149
4. Laboratorium Mikrobiologi; 90 Tahun Riwayat (1932-2022) ...	157
4.1 Sejarah Awal Pembangunan (1931-1933)	157
4.2 Tinjauan Arsitektur Laboratorium Bakteriologi dan Sekolah Kedokteran	163
4.3 Laboratorium Bakteriologi bagi Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.....	168
4.4 Laboratorium Bakteriologi Jelang Kemerdekaan sebagai Ruang Diskusi dan Perjuangan Kaum Terpelajar (1942-1945)	172
4.5 Gedung Laboratorium Bakteriologi Kini	174
5.. Taman Proklamasi (Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta)...	175
5.1 Sejarah Taman Proklamasi.....	175
5.2 Tinjauan Arsitektur Taman Proklamasi	183
5.2.1 Tugu Proklamasi.....	187
5.2.2 Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi	189
5.2.3 Gedung Pola.....	191
5.2.4 Monumen Proklamator Soekarno-Hatta	195
6. Eks-Rumah Laksamana Maede	198
6.1 Sejarah Eks-Kediaman Laksamana Maeda	198
6.2 Tinjauan Arsitektur Bangunan Eks-Kediaman Laksamana Maeda	203
DAFTAR SUMBER	222

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan", telah disusun secara spesifik, sesuai dengan maksud dan tujuannya; yaitu dilaksanakan dan diarahkan agar tersedianya sebuah hasil kajian yang disusun dengan tujuan agar dapat terarah, dengan tahapan penelitian yang dapat dilakukan dalam penyusunan kajian tersebut.

Pada masa-masa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, ada beberapa tempat yang berperan penting dalam proses kemerdekaan bangsa, di antaranya adalah Gedung Mikrobiologi UI, Parapatan 10, Asrama BAPERPI Tjiki 71, Gedung Joang Menteng 31, rumah Rengasdengklok, rumah Laksamana Tadashi Maeda, serta Taman Proklamasi di mana Rumah Bung Karno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 berlokasi. Bangunan-bangunan tersebut digunakan untuk rapat-rapat atau melakukan persiapan kemerdekaan.

Dari tempat-tempat tersebut juga telah lahir pemahaman-pemahaman mengenai Indonesia Merdeka, serta bagaimana dan kapan Indonesia harus merdeka. Para tokoh bangsa berkumpul dan mendiskusikan persiapan kemerdekaan sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai museum sejarah berupaya untuk mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan peristiwa sekitar proklamasi. Oleh karena itu, kajian tahun ini akan meneliti gedung-gedung yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa sekitar proklamasi, terutama di sekitar kawasan Menteng, Jakarta. Dengan adanya kajian ini, diharapkan museum mempunyai inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia,

sehingga kebutuhan pengunjung dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya kajian ini juga dapat melengkapi tata pameran museum.

Secara keseluruhan, format menyeluruh dari Kerangka Acuan Kegiatan telah memberikan arahan tentang bagaimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, serta penjelasan tentang prinsip-prinsip maupun upaya-upaya spesifik yang harus dilakukan oleh pelaksana penyusun, mulai dari pendekatan proses melalui koordinasi, studi literatur, survei lapangan, diskusi dan penyusunan materi kajian. Selanjutnya, Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan," persiapan dan pelaksanaan pembuatan laporan pendahuluan, laporan tengah dan laporan akhir serta melakukan pembuatan *Executive Summary*.

Berdasarkan latar belakang Kerangka Acuan Kegiatan telah dijelaskan bahwa Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan," diarahkan pada upaya untuk melakukan kajian mendalam, di antaranya meliputi: Riwayat gedung (sejarah pendirian; status kepemilikan; penggunaan lahan; konteks kewilayahan pada masa itu; persebaran kependudukan (demografi); pendekatan gaya arsitektur bangunan; hingga pola persebaran antara Gedung-Gedung terkait.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disingkat dengan Munasprok adalah gedung yang dibangun sebagai monument peristiwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Gedung luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi itu pertama kali didirikan pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur Eropa. Di dalam gedung tersebut terdapat ruangan, mebel kuno, dan aksesoris yang menggambarkan suasana serupa peristiwa perumusan naskah proklamasi.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang sejarah sekitar proklamasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2012 tentang

organisasi dan tata kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tugas pokok dan fungsi Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi dibidang sejarah sekitar proklamasi.
2. Fungsi dalam menjalankan tugasnya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi:

- a) Pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi
- b) Pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi
- c) Pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi
- d) Perawatan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi
- e) Pelaksanaan pengamanan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi
- f) pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi
- g) Pelaksanaan layanan edukasi di bidang sejarah perumusan naskah proklamasi
- h) Pelaksanaan kemitraan di bidang sejarah perumusan naskah proklamasi
- i) Fasilitasi pengkajian, pengumpulan, perawatan, pengamanan, penyajian, dan layanan edukasi di bidang sejarah perumusan naskah proklamasi
- j) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi
- k) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Peranan dan fungsi Museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2015 tentang Museum menjelaskan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan

aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Museum memiliki koleksi. Koleksi Museum atau Koleksi disebutkan dalam PP 66 tahun 2015 sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang dapat memwadahi kegiatan penyelenggaraan pengkajian sekitar perumusan Naskah Proklamasi. Untuk itu, diperlukan identifikasi, penelusuran, pengkajian pengumpulan, perawatan, pengamanan, penyajian, dan layanan edukasi di bidang sejarah perumusan naskah proklamasi.

Keberlanjutan kegiatan tersebut perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), tentunya SDM yang memahami tentang pengelolaan kegiatan tersebut dengan didukung penuh oleh Peraturan yang memadai yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Di sisilain juga, adanya sarana dan prasaran serta pengembangan pengkajian koleksi dan keterkaitan tematik dari museum itu sendiri. Salah satunya yang diperlukan adalah "Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" adalah untuk memberikan dasar kajian gedung-Gedung terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan.

Tujuan pelaksanaan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan", adalah:

1. Mengumpulkan data sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan
2. Mengetahui keberadaan gedung-gedung bersejarah yang ada kaitannya dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan
3. Museum mempunyai data sekitar gedung-gedung bersejarah sehingga dapat membantu pengunjung dalam kegiatan pendidikan, penelitian, serta media edukasi dan rekreasi.

C. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah disusunnya Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan";
2. Tersusunnya Laporan pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan";

D. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini, adalah:

1. Pada kajian ini yang menjadi fokus utama adalah bangunan-bangunan gedung yang ada kaitannya dengan sejarah sekitar proklamasi. Bagaimana para tokoh bangsa berkumpul di rumah atau gedung tersebut untuk mengadakan berbagai kegiatan diskusi dan rapat, menyatukan ide atau gagasan, membuka wawasan dan pemahaman baru mengenai kemerdekaan Indonesia.
2. Selain itu bagaimana kondisi bangunan-bangunan gedung tersebut dulu dan sekarang semuanya akan dibahas dalam kajian ini.
3. Kajian ini juga menjelaskan bagaimana kondisi politik yang menjadi pemicu adanya peristiwa di tempat-tempat tersebut. Dari latar spasial tersebut

kemudian juga dijelaskan mengenai peran dari tempat-tempat tersebut sehingga akhirnya proklamasi bisa dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945.

4. Melakukan pembuatan laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir
5. Melakukan pembuatan *Executive Summary*
6. Melakukan pembuatan CD Laporan Kajian
7. Menyusun dan membuat pelaporan secara keseluruhan

E. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan, *output* dan penerima manfaat dari kegiatan Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan". Dalam Kajian ini difokus pada 5 (lima) lokasi wilayah kajian, yaitu meliputi: (1) Taman Proklamasi; (2) Gedung Joang 45 Menteng 31; (3) Gedung Laboratorium Mikrobiologi UI; (4) Gedung Parapattan 10; (5) dan Gedung Asrama BAPERPI Tjikini 71.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Peranan Museum Sebagai Tempat Menggali Jatidiri Bangsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, museum memiliki arti sebagai gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu. Selain itu, museum juga berarti sebagai tempat menyimpan barang kuno. (<http://kbbi.web.id/museum> diakses 15 Oktober 2015) Museum juga memiliki arti lain sebagai institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Museum> diakses 15 Oktober 2015)

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1995, pasal 1 ayat 1 mengartikan museum sebagai lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam, dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. (<http://ruangpustaka.info/manajemen-informasi-dimuseum/> diakses 15 Oktober 2015)

Museum berperan penting sebagai tempat menggali jatidiri bangsa. Museum juga merupakan tempat untuk mengoleksi benda-benda bersejarah, dan berupaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui museum, masyarakat mampu mengetahui dan belajar mengenai sejarah. Museum tidak boleh menjadi lembaga yang pasif, tetapi sebaliknya museum harus peserta aktif dalam pembangunan. Bisa diungkapkan atau menggunakan slogan museum

out-reach goal, dengan bahasa terjemahan bahwa apabila publik tidak datang ke museum, maka museumlah yang datang ke publik.

Museum harus mampu menghadapi tantangan global di mana kontak antarbudaya tidak dapat dielakkan, termasuk berani menghadapi *image* museum yang dianggap kuna dan antik, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih anyar dan menyenangkan. Mengubah *image* yang melekat ibarat pepatah “bagai mengubah tekuk”, yang berarti mengubah kebiasaan yang tidaklah mudah, tetapi bahwa jika itu dilakukan terus menerus dilakukan akan berhasil, ibarat pepatah “Belakang parang pun kalau diasah akan tajam”.

Benda-benda koleksi yang dipamerkan harus dirancang sedemikian rupa termasuk menunjukkan adanya isu-isu masa kini yang berjalan sesuai dengan fakta sejarah. Kegiatan yang dilakukan di museum tidak sekedar melihat benda koleksi yang indah, tetapi bagaimana agar yang datang ke museum pulang dan ingin kembali datang ke museum karena museum dianggap mempunyai daya tarik tersendiri. Ada yang cukup membanggakan saat ini, di mana sudah cukup banyak pengelola museum yang membolehkan museumnya digunakan untuk acara-acara kegiatan kemasyarakatan, melakukan seminar untuk mengasah intelektual, dan yang terpenting museum tidak digunakan untuk sebagian kecil orang saja.

Paradigma tersebut tentu agak kontroversial dengan pemikiran terdahulu yang melihat museum sebagai tempat yang “angker” dan jauh dari masyarakat karena dipenuhi “roh-roh leluhur” yang menyeramkan. Pada hakikatnya, museum dapat bersifat profan pada batas-batas tertentu tanpa harus menghilangkan nilai sakral yang berada di dalamnya, jika itu memang yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pengelola museum tak perlu merasa terbebani dengan peran museum yang meluas; tidak sekedar menjadi tempat barang-barang sejarah itu diletakkan, karena ada yang lebih penting dari itu yaitu bagaimana nilai sejarah dari benda itu dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Namun demikian, latar belakang Kerangka Acuan Kegiatan juga tidak mengungkapkan berbagai *lesson learned* atau pembelajaran, baik yang bersifat positif maupun negatif dari berbagai kegiatan lain yang sejenis. Konsultan

berpendapat bahwa pengungkapan berbagai *lesson learned* akan memberikan gambaran dan pengalaman yang sangat berharga dalam upaya pelaksanaan kegiatan baru, mengingat bahwa pengalaman merupakan contoh realitas yang baik. Konsultan berpendapat bahwa pengalaman atau *lesson learned* dari kegiatan sejenis yang dilakukan ditempat lain yang salah satunya lewat studi banding, akan mempengaruhi esensi dari kegiatan-kegiatan lanjutannya, terutama dalam rangka meminimalkan risiko yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari.

Peranan dan fungsi Museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2015 tentang Museum menjelaskan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi pun perlu memiliki koleksi yang lebih komplit dan detail. Terkait dengan hal itu, Koleksi Museum atau Koleksi disebutkan dalam PP 66 tahun 2015 sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang dapat memwadahi kegiatan penyelenggaraan pengkajian sekitar perumusan Naskah Proklamasi. Untuk itu, diperlukan identifikasi, penelusuran, pengkajian pengumpulan, perawatan, pengamanan, penyajian, dan layanan edukasi di bidang sejarah perumusan naskah proklamasi.

B. Arah Pengembangan Pengkajian Gedung-Gedung Terkait Dengan Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi

1. Strategi Pengkajian

Arah kebijakan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi tersebut, selaras dengan pendapat para ahli museum yang menyatakan bahwa museum dan pendidikan merupakan dua komponen sosial-budaya yang selalu aktual di tengah masyarakat.

Menurut International Council of Museums (ICOM), museum merupakan suatu badan kerjasama profesional dibidang permuseuman yang didirikan oleh kalangan profesi permuseuman dari seluruh dunia menyatakan museum merupakan sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, terbuka untuk umum, untuk mengumpulkan, merawat serta memamerkan dengan tujuan penelitian, pendidikan dan hiburan, benda-benda bukti material manusia dan lingkungannya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992/1993:15)

A.C.Parker (dalam Museografia, 1987/1988: 19) adalah merupakan seorang ahli dari Amerika Serikat menyatakan bahwa museum dalam arti modern adalah suatu lembaga secara aktif melakukan tugasnya dalam hal menerangkan dunia manusia dan alam.

Dalam keterkaitannya dengan peranan museum sebagai suatu lembaga pendidikan non formal menuntut adanya perkembangan orientasi museum, yaitu dari orientasi kepada objek ke arah orientasi kepada kepentingan publik. Dengan kata lain, pihak museum harus secara total berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dalam pelayanan secara keseluruhan. Museum harus mendeteksi secara kontinyu apa yang diinginkan oleh pengunjung. Nilai atau *value* yang diberikan oleh museum harus dilihat dari kacamata pengunjung sesuai dengan spesifikasi pengunjung. Dengan demikian, program pengembangan museum kedepan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Agus Aris Munandar (2011: 15), ada 3 (tiga) peranan museum dalam pendidikan sejarah bangsa, yaitu :

- 1) Dengan mengunjungi museum akan menambah wawasan pengetahuan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
- 2) Mengunjungi museum dengan koleksi yang lengkap akan menimbulkan kebanggaan dan rasa percaya diri terhadap bangsanya.
- 3) Kunjungan terhadap museum yang mengoleksi artefak yang berhubungan dengan perjuangan bangsa mengusir penjajah akan menimbulkan rasa patriotisme dan cinta tanah air.

Jadi dapat dikatakan bahwa museum merupakan salah satu sarana dalam menghasilkan manusia Indonesia yang sadar akan kedudukan bangsanya di tengah pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia.

Oleh sebab itu, arah kebijakan pengembangan museum, sebagaimana direktorat museum, adalah:

- a) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran museum sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam rangka ikut secara aktif di dalam proses mencerdaskan bangsa; 0 Peningkatan mutu SDM pengelola museum dalam rangka tercapainya museum yang mandiri dan dinamis;
- b) Peningkatan pemahaman stakeholder di bidang museum tentang pentingnya peran museum melalui kegiatan sosialisasi permuseuman;
- c) Kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam upaya pelestarian warisan budaya di museum;
- d) Pendukung pengelolaan museum daerah;
- e) Penyusunan regulasi permuseuman

Oleh sebab itu, prioritas program permuseuman adalah untuk mengajak masyarakat mengunjungi museum dan bersama-sama membenahi dan mengevaluasi berbagai masalah dan peluang museum ke depan, program prioritas di antaranya adalah

- a) GNCM (Gerakan Nasional Cinta Museum). Gerakan Nasional Cinta Museum adalah upaya penggalangan kebersamaan antar pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum guna

memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa.

b) Revitalisasi Museum.

2. Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai Pusat Informasi

Salah satu tugas dan fungsi museum adalah pengkajian. Pengkajian yang dilaksanakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah yang berhubungan dengan sejarah peristiwa sekitar proklamasi yang terjadi di pusat maupun di daerah. Hasil pengkajian ini baik berupa koleksi relik sejarah maupun dokumen sejarah, selanjutnya disajikan dalam tata pameran tetap, pameran temporer maupun pameran keliling, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui tentang sejarah perjuangan bangsanya (khususnya sejarah peristiwa sekitar proklamasi) dapat memperoleh data dan informasi di museum. Data dan informasi tersebut harus lengkap dan akurat agar dapat dikomunikasikan kepada pengunjung dengan baik.

Selanjutnya data dan informasi tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk buku, *leaflet*, brosur, cerita bergambar, atau ditampilkan di website dan media sosial sebagai bahan publikasi dalam rangka penyebaran informasi museum dan sejarah kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Selain pengkajian yang berhubungan dengan masalah-masalah koleksi yang berkaitan dengan pengembangan museum, juga dilakukan pengkajian pengunjung museum. Pengkajian ini hasilnya akan digunakan untuk dasar penyusunan arah kebijakan pengembangan museum kedepan dan dalam rangka meningkatkan program kegiatan terutama yang berhubungan dengan edukatif kultural.

3. Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai tempat pelestarian

Sebagaimana diketahui, salah satu peranan Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sebagai lembaga pelestarian benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain

dipamerkan, agar tidak rusak dilakukan perawatan terhadap benda-benda bersejarah tersebut dan selanjutnya demi pengamanan disimpan di ruang penyimpanan khusus berupa *storage*.

Museum tidak saja sebagai ruang tempat melestarikan kebudayaan dan edukasi tetapi sekaligus juga sebagai ruang rekreasi yang menyenangkan atau edutainment. Pentingnya museum bagi bangsa, terutama dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan, terlebih dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peran museum bisa sebagai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan. Indonesia adalah negeri majemuk, yang dibentuk oleh perjalanan sejarah yang panjang. Keragaman adalah kenyataan bagi masyarakat yang hidup di belasan ribu pulau, terdiri atas lebih dari seribu kelompok etnik, yang berbicara dalam ratusan bahasa. Semua itu, buktinya ditemukan di dalam museum.

Menurut Agus Aris Munandar (Makalah Diskusi Sejarah dan Permuseuman Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional), ada 3 peranan museum dalam pendidikan sejarah bangsa, yaitu:

- a) Dengan mengunjungi museum akan menambah wawasan pengetahuan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
- b) Mengunjungi museum dengan koleksi yang lengkap akan menimbulkan kebanggaan dan rasa percaya diri terhadap bangsanya.
- c) Kunjungan terhadap museum yang mengoleksi artefak yang berhubungan dengan perjuangan bangsa mengusir penjajah akan menimbulkan rasa patriotisme dan cinta tanah air. Jadi dapat dikatakan bahwa museum merupakan salah satu sarana dalam menghasilkan manusia Indonesia yang sadar akan kedudukan bangsanya ditengah pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai Pusat Informasi Salah satu tugas dan fungsi museum adalah pengkajian. Pengkajian yang dilaksanakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah yang berhubungan dengan sejarah peristiwa sekitar proklamasi yang terjadi di pusat maupun di daerah. Hasil

pengkajian ini baik berupa koleksi relik sejarah maupun dokumen sejarah, selanjutnya disajikan dalam tata pameran tetap, pameran temporer maupun pameran keliling, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui tentang sejarah perjuangan bangsanya (khususnya sejarah peristiwa sekitar proklamasi) dapat memperoleh data.

Data dan informasi tersebut harus lengkap dan akurat agar dapat dikomunikasikan kepada pengunjung dengan baik. Selanjutnya data dan informasi tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk buku, leaflet, brosur, cerita bergambar, atau di tampilkan di website dan media sosial sebagai bahan publikasi dalam rangka penyebarluasan informasi museum dan sejarah kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Selain pengkajian yang berhubungan dengan masalah-masalah koleksi yang berkaitan dengan pengembangan museum, juga dilakukan pengkajian pengunjung museum. Pengkajian ini hasilnya akan digunakan untuk dasar penyusun arah kebijakan pengembangan museum ke depan dan dalam rangka meningkatkan program kegiatan terutama yang berhubungan dengan edukatif kultural.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai tempat pelestarian Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu peranan Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sebagai lembaga pelestarian benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan peristiwa proklamasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan dan Metodologi Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan". Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan penulisan sejarah (historiografi) serta berbasis sosio-legal, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan dalam **Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan"** untuk dicari dan digali. Pendekatan ini dilandasi oleh teori-teori dan fakta sejarah terkait dengan peristiwa perumusan Naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

B. Metodologi

Berbicara tentang metodologi berarti berkaitan erat dengan masalah teori. Teori dalam disiplin ilmu sejarah sering juga disebut kerangka referensi. Kerangka referensi kadang kala juga dinamakan skema referensi atau presuposisi atau personal equation yang merupakan suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti dalam menyusun bahanbahan yang telah diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya. Kaitannya dengan ilmu sejarah, dengan sendirinya metode sejarah ialah "bagaimana mengetahui sejarah" sedangkan metodologi ialah "mengetahui bagaimana mengetahui sejarah." Seorang sejarawan yang ingin mengetahui suatu sejarah tertentu, ia akan menempuh secara sistematis prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, pengumpulan bahan-bahan sejarah baik dari arsip-arsip dan perpustakaan-perpustakaan (di dalam atau di luar negeri), wawancara

dengan tokoh-tokoh tertentu untuk menjaring informasi selengkap mungkin). Seorang sejarawan harus dilengkapi pula dengan pengetahuan metodologis atau pun teoretis bahkan juga filsafat. Helius Sjamsuddin. Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Ombak, 2007). Hlm. 14- 15

Dalam melakukan penelitian sejarah, pada umumnya ada beberapa, prosedur penelitian yaitu:

- a) Menentukan judul atau pokok penelitian yang akan diteliti atau diselidiki.
- b) Mencari bukti-bukti (pembuktian) atau bahan-bahan sumber (baik sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder) yang diperlukan (Heuristik). Dalam tahap kedua ini termasuk teknik pencatatan dari bahan-bahan sumber (*note-taking*) dalam kartu-kartu kepustakaan (*Bibliographical cards*).
- c) Menilai atau menguji bahan-bahan sumber dengan kritik luar/ (*external criticism*) dan kritik dalam (*internal criticism*) untuk menentukan/menetapkan otentisitas (*authenticity*: kebenaran, kesahihan, kesejatian) dari bahan-bahan sumber sebelum digunakan di dalam penelitian (kritisisme).
- d) Tahap Konstruksi dan Komunikasi: melakukan konstruksi (penyusunan dan penulisan atau *sinthese* dari hasil atau penemuan-penemuan, penelitian) dengan bahasa yang sederhana, lugas dan ilmiah, agar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pembacanya (*Sinthese* dan Penulisan Sejarah). Hasil dari *Sinthese* dan Penulisan Sejarah adalah Karangan Sejarah Ilmiah atau Karangan Sejarah Kritis (Historiografi). (Gray, 1964)

Berkaitan dengan penyusunan Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2"; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, ada beberapa tahapan kajian yang dilakukan meliputi:

- a) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber yang relevan (primer maupun skunder), yaitu aspek historis yang berkaitan dengan kegiatan Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan";

- b) Melakukan sistematisasi bahan historis Melakukan Analisis Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan"
- c) Menyusun perancangan dan penulisan sebagai langkah awal untuk penyediaan dan penyajian data kajian sekitar Proklamasi Kemerdekaan; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan.
- d) Melakukan Sosialisasi dan FGD dokumen hasil laporan akhir Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" dengan stakeholder terkait.

Beberapa kerangka pemikiran berikut ini merupakan landasan serta acuan yang digunakan untuk mengembangkan Strategi Implementasi pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan", dengan tetap mempertimbangkan kondisi, ketersediaan sumberdaya dan kemampuan realistis serta potensi internal kelembagaan konsultan. Di samping itu, memperhatikan juga kecenderungan tingkat pencapaian seluruh tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya serta perkembangan tingkat kebutuhan untuk mengantisipasi dinamika pertumbuhan maupun tantangan perubahan masa depan dari lingkungan eksternal. Rangkuman landasan pemikiran dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

- (a) Agar penyusunan hasil Kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" berjalan dengan optimal, tertib serta terorganisasi secara baik, diperlukan suatu manajemen pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien termasuk berbagai penguatan, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagai bagian penting dan strategis.
- (b) Untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan suatu program dan kegiatan, tidak hanya tergantung dari pemahaman tentang program tersebut; tetapi membangun kebersamaan dan kerjasama sinergis di antara para peneliti, merupakan kunci optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas. Melalui "Strategi Implementasi" yang komprehensif, diharapkan dapat diletakkan

landasan kebersamaan dan kerjasama sinergis di antara seluruh informasi terkait dengan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan".

- a) Selanjutnya keluaran yang dihasilkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi masyarakat, khususnya Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan"

Kerangka pemikiran tersebut di atas perlu dikorelasikan terhadap beberapa strategi dasar yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan", melalui perumusan dan pilihan pengelolaan strategi yang relevan.



Gambar : Alur Kegiatan Pengkajian Pristiwa Proklamasi Kemerdekaan; Gedung-Gedung Terkait dengan Peristiwa Proklama Kemerdekaan

C. Teknik Pengumpulan Data

Kajian Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" ini merupakan bagian dari kajian/studi sejarah pada tahap operasional. Oleh karenanya metode yang dipergunakan lebih menekankan pada studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi arsip dan dokumentasi kondisi eksisting. Analisis yang dipergunakan bersifat deskriptif-naratif, dengan penjelasan dan analisis berbasis pada

dokumen, data sekunder dan informasi dari sumber informasi terkait dengan kebutuhan penyusunan kajian Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan". Dengan demikian, maka dalam pengumpulan data dan informasi ditetapkan sebagai berikut:

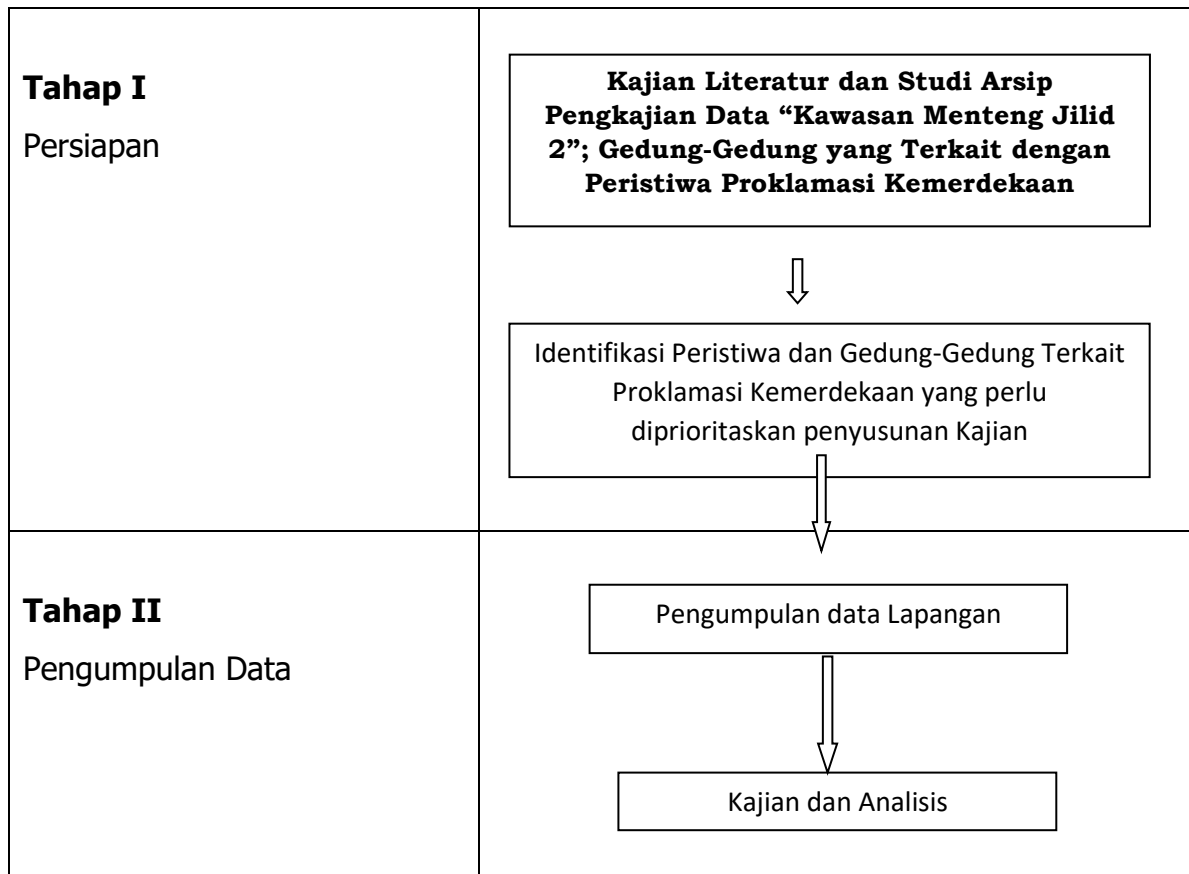
- a. Studi arsip dan dokumentasi, dalam hal ini kajian didukung dari berbagai dokumen baik bersiat buku kepustakaan yang bersifat konseptual-teoritis maupun dokumen serta data primer dan sekunder Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan".
- b. Studi observasi, yaitu melaksanakan observasi untuk mengetahui berbagai hal yang relevan dengan kondisi bangunan-bangunan gedung eksisting dalam Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan".
- c. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*), yaitu melakukan tanggung jawab dengan informan terpilih yang telah ditetapkan secara *purposive* berdasarkan kesesuaian Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan". Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan data dan informasi yang sangat penting, karena terkait dengan riwayat gedung, status kepemilikan, lokasi gedung, pemanfaatan gedung dari masa ke masa dan polarisasi kewilayahan terhadap gedung pada masa itu.
- d. Diskusi terfokus (*Focus Grup Discussion*, atau FGD) dengan informasi terkait dengan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan". FGD ini dilakukan bertujuan menjangkau informasi dalam rangka penguatan atas data wawancara dan data sekunder yang memerlukan persamaan persepsi dan konstruksi historis dari obyek kajian sehingga memudahkan untuk menyusun laporan kajian dan rekomendasi dari hasil kajian. Dari FGD ini selanjutnya menjadi dasar penetapan penjabaran Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan.

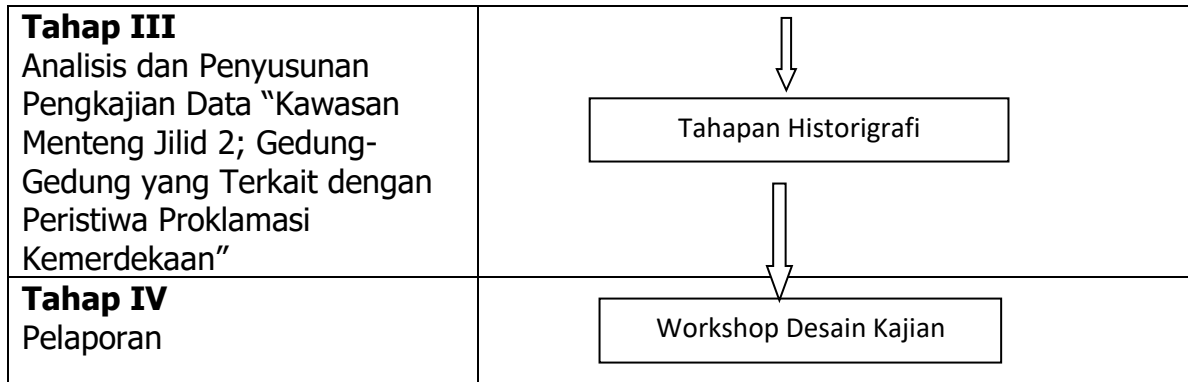
Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh akan dipetakan, diolah dan dianalisis menjadi sebuah hasil kajian yang sistematis. Dari Kajian tersebut maka akan dibuat tersusun hasil kajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" .

D. Tahapan dan Alur Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan"

Kegiatan kajian Sekitar Proklamasi Kemerdekaan; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan ini dilakukan secara bertahap dan terarah yang meliputi: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap penyusunan dan verifikasi data melalui Workshop (FGD), dan tahap Pelaporan. Secara skematik, rincian kegiatan dapat dilihat pada bagan 3.1 berikut:

Bagan 3.1
Rincian Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan"





E. Desain dan Format Kajian

Hasil kajian yang dibuat selanjutnya akan disusun deskripsi Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan". Terkait dengan pelaksanaan "Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" ", ada tahapan penelitian dalam penyusunan kajian yang keduanya memiliki karakteristik metodologis yang berbeda. Dalam Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan", tak terlepas dari metodologi kajian sejarah. Metodologi sejarah dalam Kegiatan Pengajian Sekitar Proklamasi; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi kemerdekaan, meliputi:

1. **Tahapan heuristik (pengumpulan data)**, pada tahapan ini dilakukan kajian pustaka dan dokumen serta referensi yang mendukung kajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan" ", berupa arsip, wawancara, dokumen primer dan sekunder.
2. **Tahap kritik sumber**, dilakukan uji tingkat otentisitas data untuk menggambarkan sebuah fakta historis, sehingga dilakukan uji pertik analisa data dan fakta sejarah untuk melakukan tahap berikutnya.
3. **Tahap Interpretasi**, dimaksudkan menguraikan fakta-fakta sejarah yang di dalamnya dilakukan sintesis dan antitesis data setelah tahapan kritik.
4. **Tahap Historiografi**, yaitu tahap yang dilakukan secara detail deskripsi dari fakta-fakta historis yang dijabarkan secara kronologis.

Untuk melakukan tahapan kegiatan tersebut, konsultan mengusulkan, draft pola penulisan dalam kegiatan Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2; Gedung-Gedung yang terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan", sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KERANGKA TEORITIS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV SEPUTAR PERISTIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

4.1 Menjelang Kemerdekaan

4.2 Gerakan Pemuda Menjelang Kemerdekaan

4.3 Peristiwa Rengasdengklok

4.4 Perumusan Naskah Proklamasi

4.5 Pelaksanaan Proklamasi

BAB V RIWAYAT PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. Kawasan Menteng Dari Masa ke Masa

B. Bangunan-Bangunan Bersejarah di Sekitar Kawasan Menteng Terkait dengan Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan

1. Asrama Menteng 31 (Gedung Joang 45)

2. Asrama BAPERPI Tjikini 71

3. Asrama Parapattan 10

4. Mikrobiologi UI Pegangsaan Timur

5. Museum Perumusan Naskah Proklamasi

6. Taman Proklamasi

BAB IV PENUTUP

DAFTAR SUMBER

LAMPIRAN

Dalam penjabaran Gedung-Gedung terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kawasan Menteng, ada beberapa hal yang dikaji dalam penjabaran di atas, meliputi:

- a) Data dan informasi riwayat gedung (dilihat dari aspek Arsitektur dan Historis)
- b) Status kepemilikan
- c) Lokasi gedung
- d) Pemanfaatan gedung dari masa ke masa
- e) Polarisasi kewilayahan terhadap gedung pada masa itu hingga kini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SEKITAR PERISTIWA PROKLAMASI

A. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu semakin santer, berbagai siaran radio luar negeri menyiarkan informasi kekalahan tentara Jepang, terutama di kawasan Asia Pasifik. Untuk mengurangi kerugian akibat kealahannya, Jepang berusaha menraik simpati bangsa Indonesia agar mau berpihak dan membantu Jepang di Indonesia. Maka dibentuklah *Seiji Sanyo*, yang memberikan perluasan partisipasi politik bagi bangsa Indonesia di pemerintahan, bahkan Jepang berjanji memberikan kemerdekaan sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Koiso (Jakarta, 1992: 26).

Untuk menindaklanjuti janji kemerdekaan tersebut, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widjojoningrat. Badan ini selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan Soekarno sebagai ketuanya.

Peristiwa penting terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 yaitu pertemuan antara Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Asia yang bermarkas di Dalat, dengan utusan dari Indonesia yang terdiri atas Soekarno, Hatta dan Radjiman Widiuningrat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia. Sekembali utusan tersebut dari Indo-Cina, Sjahrir memberitahukan tentang takluknya Jepang kepada Sekutu. Walaupun telah diberitahu, Soekarno-Hatta masih belum mempercayainya, karena belum ada berita resmi dari *Gunseikanbu*. Keesokan harinya kedua tokoh ini mendatangi *Gunseikanbu* dan mengunjungi Laksamana Maeda Tadasi untuk menyakini berita tersebut. Setelah yakin dengan berita kekalahan Jepang, kedua tokoh ini kemudian sepakat menyelenggarakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (Jakarta, 1992: 41).

Sore hari tanggal 15 Agustus 1945, Hatta didatangi Soebadio Sastrosatomo yang meminta agar kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan oleh PPKI, tetapi diucapkan

oleh Soekarno sebagai pemimpin rakyat. Di rumah Soekarno sendiri ketika Bung Hatta datang, banyak pemuda yang mendesaknya agar segera memproklamkan kemerdekaan. Karena kedua tokoh itu menolak keinginan pemuda, malam harinya mereka dibawa ke Rangasdengklok oleh kelompok Sukarni yang menggebu-gebu untuk segera memproklamkan kemerdekaan. Pada saat gelora semangat kemerdekaan hampir menyelimuti seluruh bangsa Indonesia, terutama para pemuda yang sudah bosan terus menerus menjadi anak jajahan bangsa asing.

Gelora kemerdekaan cukup didominasi para pemuda yang ada di Jakarta. Para pemuda pun sangat antusias menyambut detik-detik kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Bahkan ketika diminta bantuan untuk mengawal dan menjaga keamanan rombongan Presiden Soekarno dan Wakilnya, Hatta, para pemuda bergerak serentak dan bahu-membahu mengamankan jalur perjalanan kedua pemimpin tersebut.

Setiba di Rengasdengklok, ternyata Soekarno-Hatta tidak melakukan apa-apa. Sedangkan peserta rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK) di Jakarta merasakan kejanggalan, karena Soekarno-Hatta yang mengundang justeru tidak hadir. Setelah mencari informasi, akhirnya diketahui Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok, dan sekitar jam 18.00 anggota PPKI mengutus Soebardjo menjemput Soekarno-Hatta (Sagimun, 1988: 464-466). Mereka tiba di Jakarta pukul 20.00 WIB, Hatta lalu diminta Soebardjo agar menghubungi Hotel Des Indes dan minta disediakan ruang rapat. Akan tetapi, permintaan ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan tidak boleh mengadakan kegiatan setelah jam 20.00 WIB.

Soebardjo kemudian menghubungi Laksamana Maeda, meminta kesediaannya agar ruang tengah rumahnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan rapat. Rapat berlangsung sampai pukul 03.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945 dan menghasilkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang disetujui oleh mereka yang hadir pada rapat tersebut. Teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi di Pegangsaan Timur, diucapkan oleh Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Isi teks proklamasi adalah sebagai berikut:

Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelen 8 tahun 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta.
Soekarno.
Hatta.

Gambar 4.1. Naskah teks proklamasi. Atas: Coretan langsung *draft* naskah.
Bawah: Naskah yang telah melalui revisi dan diketik oleh Sayuti Melik.

PROKLAMASI

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan
tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.*

*Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.*

Soekarno/Hatta.

Proklamasi ini kemudian disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia dan disambut rakyat dengan penuh suka cita. Mereka berharap inilah titik awal untuk membangun bangsa setelah berabad-abad di bawah cengkeraman penjajah asing.

B. Gerakan Pemuda Menjelang Kemerdekaan

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari semangat dan peran besar gerakan kaum pemuda, terutama gelora kemerdekaan yang didominasi para pemuda di Jakarta. Para pemuda pun sangat antusias menyambut detik-detik kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa momentum bersejarah yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran tentang politik, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang bermuara dari beberapa kantung bangunan bersejarah di sekitar Kawasan Menteng, seperti: Asrama BAPERPI di Jalan Tjikini 71, Asrama Menteng 31 (Gedung Joang 45), Parapatan 10, Laboratorium Mikrobiologi UI, dan Taman Proklamasi, yang menjadi tempat di mana para pemuda mendapatkan pendidikan politik, semangat nasionalisme, pemerintahan dan kenegaraan.



Gedung Eijkman Institute.
(Sumber Foto: kitlv.nl)

Puncaknya, pada malam tanggal 15 Agustus 1945, suasana tegang terasa di penjuru Jakarta. Setelah berbuka puasa--saat itu Bulan Ramadan, sebuah rapat gelap digelar para pemuda radikal¹ di belakang Laboratorium Bakteriologi Gedung Eijkman Institute, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan rahasia kelompok pemuda di belakang Eijkman Institute itu dipimpin oleh Chaerul Saleh, Wakil Ketua Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31 yang

¹ "Radikal" pada masa itu memiliki konotasi berbeda dengan saat ini. Sejumlah buku yang ditulis oleh para pelaku dan saksi mata peristiwa sejarah, setidaknya memiliki tiga sebutan untuk generasi muda waktu itu, yakni "pemuda *radikal*", "pemuda *revolusioner*", dan "pemuda *militari*".

juga pendiri dan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia--ormas paling radikal saat itu.

Rapat gelap dihadiri para pentolan tokoh muda Indonesia yang berasal dari sejumlah asrama "mahasiswa" ternama. Mereka antara lain Darwis dan Djohar Nur dari Asrama BAPERPI di Tjikini 71; DN Aidit dan AM Hanafi dari Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31; Wikana dan Yusuf Kunto--mata-mata pengintai Jepang--dari Asrama Indonesia Merdeka di Kebon Sirih 80; Eri Sudewo, Subadio Sastrosatomo, dan Subianto Djojohadikusumo dari kelompok Sjahrir di Asrama Prapatan 10.



Kelompok pemuda di atas terlihat di Pegangsaan Timur 17, yang pada tanggal 15 Agustus 1945, merupakan "pusat" dari gerakan pemuda Indonesia. Asrama-asrama pemuda yang menjadi tempat tinggal atau sentral aktivitas pemuda bukan sekadar asrama, tapi juga pusat kegiatan operasional dan koordinasi politik antarkelompok, antara pusat dan daerah.

Asrama-asrama tersebut menjadi tempat kaderisasi pemuda. Tiap asrama punya pemimpin sendiri. Akan tetapi, semua terhubung pada jaringan bawah tanah Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Ada 4 (empat) asrama pemuda yang cukup menonjol di Jakarta saat itu, yaitu:

2. **Asrama Pemuda BAPERPI** (Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia) di jalan Tjikini 71, Menteng, di bawah pimpinan Djohar Nur, beranggotakan para mahasiswa nasionalis moderat. Asrama ini dibangun pemerintah pendudukan Jepang.

3. **Asrama Mahasiswa Kedokteran** di Prapatan 10², Kwitang, di bawah pimpinan Eri Sudewo, beranggotakan pecahan Asrama BAPERPI. Mereka mahasiswa-mahasiswa yang aktif bergerak di bawah tanah, fasih berbahasa Belanda, dan mayoritas dari kalangan elite yang berkiblat ke Barat. Para pegiat asrama ini, karena dekat dengan Sutan Sjahrir dan dipengaruhi pemikirannya, kerap disebut Grup Pemuda Sjahrir.
4. **Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31** di bawah pimpinan Sukarni Kartodiwirjo dan Chaerul Saleh, beranggotakan para pemuda radikal sempalan Asrama Prapatan 10. Sukarni dan Chaerul Saleh saat itu bukan nama baru dalam peta pergerakan pemuda Indonesia. Keduanya bisa dibilang "aktor utama" para pemuda. Sukarni³ merupakan pendiri organisasi Persatuan Pemuda Kita; Ketua



Asrama Menteng 31
(Sumber Foto: Dok. jakarta.go.id)

² Jalan Prapatan yang terbentang di antara persimpangan Tugu Tani sisi utara sampai persimpangan Senen, Jakarta Pusat, kini berganti nama menjadi Jalan Prajurit Usman-Harun.

³ Sejak remaja, Sukarni hobi berkelahi dengan orang Belanda. Ia dan puluhan teman-temannya pernah terlibat tawuran dengan anak-anak Belanda. Mereka menang dan menceburkan ke kolam bocah-bocah Belanda yang kalah tarung. Sukarni merupakan pendiri organisasi Persatuan Pemuda Kita; Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda--organisasi hasil peleburan Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera; anak didik Sukarno semasa berkuliah di Bandung; dan disebut memiliki akses ke Tan Malaka. Sukarni merupakan pendiri organisasi Persatuan Pemuda Kita; Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda--organisasi hasil peleburan Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera; anak didik Sukarno semasa berkuliah di Bandung; dan disebut memiliki akses ke Tan Malaka.

Pengurus Besar Indonesia Muda--organisasi hasil peleburan Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera; anak didik Sukarno semasa berkuliah di Bandung; dan disebut memiliki akses ke Tan Malaka. Sementara itu, Chaerul Saleh⁴ ialah salah satu pendiri dan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia--ormas paling radikal saat itu. Ia juga bekerja di Departemen Propaganda Jepang (Sendenbu), dan pernah memimpin BAPERPI.



Sukarni

(Sumber Foto: Dok. Kemdikbud)



Chaerul Saleh

(Sumber Foto: *Wikimedia Commons*)

3. **Asrama Indonesia Merdeka** di Jalan Kebon Sirih 80, Menteng, di bawah pimpinan Wikana--aktivis kiri, pemimpin bawah tanah Partai Komunis Indonesia Jawa Barat pada era penjajahan Belanda, Ketua Barisan Pemuda Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), dan anak didik Sukarno semasa di Bandung seperti Sukarni.
4. **Asrama Indonesia Merdeka**, seperti dikutip dari portal resmi Provinsi DKI Jakarta, jakarta.go.id, didirikan Oktober 1944 oleh pemerintahan pendudukan Jepang di bawah pengawasan Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang), tepatnya Kepala Perwakilan Kaigun Jepang di Jakarta, yakni Laksamana Muda Tadashi Maeda. Asrama itu bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi

⁴ Sebagai pemuda dan pemimpin mahasiswa yang militan, Chaerul Saleh mulai menonjol di gerakan mahasiswa menjelang Perang Dunia II, tahun 1940-an.

para pemuda Indonesia dari berbagai daerah. Penghuni asrama--anggota Gerindo maupun para pemuda dari timur Indonesia--mendapat pelajaran tentang paham kebangsaan dari tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Hatta, Iwa Kusumasumatri, Sutan Sjahrir, dan lain-lain. Mirip dengan pola pendidikan di Asrama Menteng 31. Enam bulan setelah Asrama Indonesia Merdeka berdiri, April 1945, 30 orang angkatan pertama lulus dari kursus kebangsaan di asrama tersebut. Sebulan kemudian, Mei 1945, saat 80 orang angkatan kedua siap memulai kursus, Jepang "keburu" menyerah kepada Sekutu, mengakhiri pendudukan Jepang di Indonesia. Dari empat asrama pemuda tersebut, tiga di antaranya tersebar di Menteng--Asrama BAPERPI di Tjikini 71, Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31, dan Asrama Indonesia Merdeka di Kebon Sirih 80. Menteng sejak lama memang menjadi pusat pergerakan politik negeri ini, bukan hanya asrama pemuda yang berserak di Menteng, Jakarta Pusat, melainkan juga kediaman para tokoh nasional Indonesia yang sengaja dipusatkan Jepang di satu lokasi dan saling berdekatan untuk mempermudah pengawasan. "Dihimpun oleh Jepang agar Jepang mudah 'memegang' mereka. Rumah-rumah golongan tua seperti Sukarno dan Hatta di kawasan inti Menteng, dan golongan muda di pinggiran Menteng. Batas Menteng itu rel kereta. Di sisi lain, kedekatan lokasi membuat para tokoh nasional Indonesia pada masa itu dapat berkomunikasi dengan mudah. Dari rumah Sukarno di Pegangsaan Timur 56 ke rumah Hatta di Jalan Diponegoro 57 misalnya, hanya butuh 10 menit berjalan kaki. "Para tokoh berpengaruh diberi fasilitas rumah oleh Jepang di kawasan Menteng. Rumah-rumah itu bekas ditinggali orang-orang Eropa yang pergi ketika Jepang datang. Jepang, saat tiba ke Indonesia, langsung menyensus siapa-siapa saja orang berpengaruh di sini. Sukarno setelah bebas dari Bengkulu, disediakan rumah di Pegangsaan Timur, diajak bergabung dalam rencana persemakmuran Jepang demikian pula dengan Bung Hatta. Akan tetapi, Sjahrir tak bersedia⁵.

⁵ Rosihan Anwar, dalam bukunya, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan 1909-1966*, juga Hendri F. Isnaeni dalam bukunya, *Kontroversi Sang Kolaborator*, menceritakan tentang kesepakatan antara Sukarno, Hatta, dan Sjahrir soal cara perjuangan mereka demi Indonesia merdeka. Sukarno-Hatta menempuh jalan kooperasi atau bekerja sama dengan Jepang sambil mempersiapkan pemuda



Sjahrir, Sukarno, dan Hatta.
(Sumber Foto: kitlv.nl)

Sikap nonkolaborasi Sjahrir itu mengendap sepenuhnya dalam hati para pemuda. Golongan muda itulah yang kemudian mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Janji kemerdekaan di kemudian hari oleh Jepang kami anggap menghina bangsa Indonesia. Kami, pemuda radikal seluruh Indonesia, jijik dan malu mendengarnya. Kami tidak mau 'kemerdekaan hadiah'. Jangankan di kelak kemudian hari, janji merdeka besok pun kami tidak sudi menerimanya. Pemuda sudah lama menyiapkan organisasi dalam segala bentuk, siap bertempur merebut kemerdekaan tanah air (AM Hanafi, Sekretaris Asrama Angkatan Baru Indonesia, *Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan*).

Indonesia, sedangkan Sjahrir memimpin gerakan bawah tanah, dengan tetap berkomunikasi dengan Sukarno-Hatta.



Sukarno-Hatta
(Foto: kitlv.nl)

Tepat tanggal 14 Agustus 1945, AM Hanafi dan kawan-kawannya--Chaerul Saleh, Sudiro, SK Trimurti, Sayuti Melik, dan Asmara Hadi yang tak lain adalah kakak Hanafi--berkumpul di sebuah kebun pisang dekat Lapangan Terbang Kemayoran sehari sebelum rapat gelap para pemuda di belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkman Institute. Saat itu, para pemuda menunggu pesawat yang ditumpangi Sukarno-Hatta kembali dari Saigon, Vietnam. Sukarno-Hatta ke Vietnam untuk memenuhi undangan Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi Pasukan Jepang di Asia Tenggara. Begitu mendarat di Kemayoran, setelah situasi agak sepi dan orang-orang Jepang mulai menjauh, para pemuda mendekati Sukarno-Hatta. Sukarno ketika itu hendak naik ke mobil, sedangkan Hatta sudah masuk lebih dulu ke dalam mobil yang sama. "Selamat datang kembali Bung Karno, Bung Hatta. Kami semua menunggu oleh-oleh dari Saigon," kata Chaerul Saleh.

Soekarno, yang di Vietnam mendengar Jenderal Terauchi berbicara "Pemerintah Agung di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia", lantas mengatakan, "Pokoknya kemerdekaan sudah dekat. Sekarang Indonesia sudah akan merdeka seperti halnya jagung bukan lagi akan berbunga, tapi segera akan berbuah. Karena itu kita semua harus bersiap." Ucapan Sukarno lantas disambut desakan para pemuda. "Tapi kami tidak mau kemerdekaan hadiah. Kami tak mau janji-janji Jepang itu. Proklamirkan kemerdekaan bangsa kita sekarang juga! Jepang sudah kalah, Jepang sudah dibom! Jenderal Terauchi tentu tidak bilang itu kepada Bung Karno."

Informasi tentang kekalahan Jepang itu memang tak disebut sama sekali oleh Jenderal Terauchi--yang di hadapan Sukarno mengesankan Jepang tetap imperium kuat Asia Raya.

Namun Sukarno menolak untuk membahas hal itu lebih lanjut. "Kita tidak bisa membicarakan soal itu di sini. Lihat itu, *Kempetai* (polisi militer Jepang) mengawasi kita. *Bubarlah! Nanti kita bicara lagi.*" Chaerul Saleh dan kawan-kawan diliputi kejengkelan kala mobil Sukarno melintas pergi. "Pemuda angkatan sekarang tentu tidak bisa membayangkan dan merasakan gejolak di dada kami pada waktu itu. Kami gemas dan penuh gerutu. Seandainya pada waktu itu tangan kami menggenggam bom, maka bom itu ingin kami ledakkan waktu itu juga sehingga bisa mendorong Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera tanpa ragu meyakini kekalahan Jepang dari Sekutu (AM Hanafi, Buku Menteng 31).



Gedung Eijkman Institute
(Sumber Foto: kitlv.nl)

Setelah insiden itu, masih berselimut rasa kesal, para pemuda menggelar pertemuan di belakang gedung Eijkman Institute, Jalan Pegangsaan Timur 17. Rapat rahasia itu menghasilkan satu sikap bersama, bahwa "Kemerdekaan Indonesia adalah hak serta persoalan rakyat Indonesia. Sama sekali tidak tergantung kepada siapapun dan negara manapun. Untuk menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, tidak bisa lain harus dengan proklamasi kemerdekaan."Selanjutnya, 38 jam kemudian, proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang, membuka pintu zaman baru.

C. Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok merupakan titik puncak perbedaan pandangan diantara Bung Karno dan Bung Hatta di satu pihak dengan para pemuda dan PETA di pihak yang lain dalam cara menyatakan kemerdekaan. Peristiwa diawali sekitar seminggu sebelum terjadi peristiwa Rengasdengklok, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pergi ke Kota Dalat⁶ untuk memenuhi panggilan Jendral Terauchi selaku panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara (Adams, 2014:247).

Pemanggilan Sukarno dan Hatta ke Dalat berkaitan dengan keadaan pasukan Jepang yang sudah semakin terdesak dalam perang Asia Pasifik. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima. Tidak seberapa lama setelah pengeboman tersebut Rusia menyatakan perang terhadap Jepang. Pengeboman Hiroshima menewaskan sekitar 70.000-80.000 penduduk kota tersebut. Jatuhnya korban sebanyak itu tidak membuat Jepang menyerah. Sikap Jepang itu menyebabkan pada tanggal 9 Agustus Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki. Setelah kedua kota tersebut mengalami kehancuran total barulah Jepang menyatakan menyerah kalah. Pernyataan menyerah tanpa syarat Jepang kepada sekutu disampaikan sendiri oleh Kaisar Hirohito pada tanggal 15 Agustus 1945 (Ricklefs, 2008:443).

⁶ Dalat terletak sekitar 300 km sebelah utara kota Saigon atau sekarang kota Ho Chi Minh. Beserta mereka turut pula diundang dr. Radjiman Wedijodiningrat selaku bekas ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI (*Dokuritsu Junbi Cosakai*) Seorang lagi yang ikut dalam rombongan ke Dalat adalah dr. Suharto yang merupakan dokter pribadi Sukarno. (Hatta, 1969:18).



Gambar 4.2 : Sukarno, Muhammad Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat di Dalat

Selama berada di Dalat Bung Karno dan Bung Hatta telah mendengar berita tentang kekalahan Jepang. Pada tanggal 12 Agustus Jendral Terauchi menyampaikan keputusan pemerintahan Tokyo untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Perkembangan keadaan yang seperti itu yang menyebabkan Bung Karno ketika baru sampai di Lapangan Terbang Kemayoran pada tanggal 14 Agustus menyatakan di dalam pidato singkatnya di hadapan rakyat yang menyambut bahwa: "Jika dulu saya berkata Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbuah, kini dapat saya katakan kepada saudara-saudara, bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga" (Adams, 2014:250).

Para pemuda juga telah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Menurut para pemuda pelaksanaan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka perjuangkan. Bagi para pemuda kemerdekaan Indonesia harus direbut dan bukan dilakukan oleh PPKI seperti yang diinginkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dalam pandangan para pemuda PPKI adalah lembaga bentukan Jepang dan jika kemerdekaan dilaksanakan oleh lembaga ini mereka mengkuatirkan kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai pemberian Jepang. Oleh sebab itu mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia dicapai dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri tanpa adanya pengaruh asing.

Setidaknya ada tiga kelompok pemuda yang paling aktif dalam kegiatan politik di Jakarta di akhir masa pendudukan Jepang. Ketiga kelompok itu yaitu mereka yang berhimpun di Asrama Prapatan 10, Asrama Menteng Raya 31, dan Asrama Indonesia Merdeka di Kebon Sirih 80.

Asrama Prapatan 10 adalah asrama para mahasiswa kedokteran. Fakultas Kedokteran (*Ika Daigaku*) adalah satu-satunya lembaga pendidikan tinggi peninggalan Belanda yang diijinkan tetap melanjutkan kegiatannya selama masa pendudukan Jepang. Meskipun para mahasiswa fakultas kedokteran dipengaruhi oleh suasana masa pendudukan, tetapi pandangan mereka terhadap apa yang terjadi dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sistem pendidikan dan sekolah mereka adalah peninggalan Belanda yang belum begitu banyak diubah oleh Jepang. Maka tidak mengherankan jika orientasi mereka lebih condong ke Barat jika dibandingkan dengan para pemuda di asrama-asrama lainnya (Malik, 1982:33).

Para pemuda di Asrama Prapatan 10 bersimpati kepada perjuangan Sutan Sjahrir. Selama masa pendudukan Jepang Sjahrir menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang. Sikapnya ini menyebabkan ia menempati posisi yang terhormat di mata para pemuda dan mahasiswa.

Kelompok *kedua* adalah para pemuda yang berhimpun di Asrama Menteng Raya 31. Asrama ini dikenal juga dengan nama Asrama Angkatan Baru Indonesia. Asrama Menteng Raya 31 didirikan pada awal masa pendudukan Jepang dengan mendapat dukungan dari Departemen Propaganda (*Sendenbu*). Beberapa anggota asrama ini adalah bekas mahasiswa fakultas hukum (*Recht Hogeschool*) di Jakarta. Tokoh-tokoh pemuda Menteng Raya 31 antara lain adalah Chaerul Saleh, Sukarni, dan A.M. Hanafi. Meskipun asrama ini merupakan suatu asrama yang anggota-anggotanya diberi latihan politik dengan bantuan Jepang (Malik, 1982:34), namun anggota asrama ini juga melakukan pertemuan teratur dengan tokoh-tokoh pemuda yang lebih senior yang sudah terlibat dalam pergerakan nasional sejak tahun 1930-an. Mereka itu antara lain adalah B.M. Diah, Adam Malik dan Anwar serta Harsono Tjokroaminoto. Dua nama terakhir merupakan putra dari tokoh Sarekat Islam H.O.S. Tjokroaminoto.

Asrama berikutnya yaitu Asrama Indonesia Merdeka didirikan pada bulan Oktober 1944, tidak lama setelah Perdana Menteri Koiso memberikan janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Pendiri asrama ini adalah Laksamana Tadashi Maeda yang merupakan perwira angkatan laut yang memimpin *Bukanfu*, kantor penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat di Jakarta. Kegiatan asrama ini yang diadakan atas dukungan Laksamana Maeda adalah mengundang para pemimpin Indonesia yang terkemuka untuk berceramah dihadapan para pemuda di asrama ini. Para penceramah di asrama ini sebenarnya juga beberapa kali memberikan ceramah di Asrama Menteng Raya 31. Mereka itu antara lain adalah Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan Mr. Sunario. Meskipun Asrama Indonesia Merdeka adalah asrama pemuda namun para pemimpinnya adalah para politisi senior seperti Ahmad Soebardjo dan Wikana.

Di sore hari tanggal 14 Agustus 1945 Syahrir, yang selama masa pendudukan Jepang rajin mendengarkan siaran radio tentang perkembangan perang Pasifik secara rahasia, menemui Hatta. Siaran-siaran radio Belanda dari Papua dan Australia telah memberitakan bahwa beberapa bagian dari pasukan Sekutu yang telah masuk ke Asia Tenggara sedang melakukan persiapan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mereka anggap telah bekerja sama dengan Jepang. Menurut Hatta, dalam pertemuan 14 Agustus sore itu Syahrir menyampaikan bahwa Jepang telah meminta damai kepada sekutu. Karena itu menurut pendapat Syahrir, pernyataan kemerdekaan Indonesia janganlah dilakukan oleh PPKI. Hal ini karena Indonesia merdeka yang diproklamirkan dengan cara seperti itu akan dengan mudah dicap oleh Sekutu sebagai Indonesia buatan Jepang. Masih menurut Syahrir, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia secara langsung melalui radio kepada rakyat (Hatta, 1969:8). Baginya kemerdekaan Indonesia harus dibuat di luar lembaga yang secara resmi didukung oleh Jepang agar bersih dari cap kolaborator yang bisa menimbulkan penentangan dari pihak sekutu yang baru saja menang perang.

Hatta menjawab desakan Syahrir dengan mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta di dalam atau di luar kerangka

PPKI kemungkinan besar akan tetap dianggap dilakukan oleh para kolaborator. Menurut Hatta hal itu karena bagi Sekutu tidak menjadi masalah badan atau lembaga apa yang memproklamasikan kemerdekaan. Sekutu akan lebih melihat siapa orang-orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Setelah berdiskusi beberapa lama Syahrir dan Hatta kemudian menemui Sukarno di rumahnya di Jl. Pegangsaan Timur No.56 (Hatta, 1969:26). Di rumah Sukarno pembicaraan tentang cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan. Pendapat Sukarno tidak berbeda jauh dengan Hatta. Menurutnya ia dan Hatta sudah dicurigai oleh Sekutu dan karena itu apa perlunya membuat masalah dengan Jepang. Pertemuan berakhir tanpa titik temu. Sukarno dan Hatta memilih untuk melihat perkembangan selanjutnya dan bagaimana reaksi dari para pejabat militer Jepang.

Perbedaan pandangan antara Syahrir dan para pemuda di satu pihak dan Bung Karno dan Bung Hatta di pihak lainnya terletak pada cara bagaimana proklamasi kemerdekaan dilakukan. Bagi Syahrir dan golongan pemuda, Jepang sebagai pihak yang kalah dalam Perang Pasifik tidak perlu diperhitungkan lagi. Selain itu sifat dari pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat fasis akan memberikan citra yang buruk jika kemerdekaan Indonesia didukung atau memiliki hubungan dengan pemerintah pendudukan. Sebaliknya, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin mengesampingkan pihak Jepang begitu saja. Bagi mereka kerjasama dengan Jepang harus tetap dipertahankan untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan rakyat (Noer, 1990:242-243). Hal ini karena pada kenyataannya pasukan dan persenjataan Jepang di Indonesia masih dalam keadaan utuh meskipun Jepang telah menyatakan menyerah kepada Sekutu. Saat itu, kekuatan *Heiho*, PETA, pemuda dan rakyat Indonesia dinilai oleh Bung Karno dan Bung Hatta belum cukup untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan baik. Selain itu mereka juga meyakini niat baik Jepang untuk melaksanakan "janji kemerdekaan". Dengan demikian Bung Karno dan Bung Hatta berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia lebih baik ditetapkan melalui PPKI yang merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Sehari kemudian, tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dengan disertai Ahmad Subardjo pergi ke kantor *Gunseikanbu* (kepala pemerintahan militer). Di kantor itu mereka tidak dapat menemui seorang pejabat pun kecuali seorang prajurit yang sedang melakukan tugas jaga (Noer, 1990:246). Berdasarkan keterangan prajurit jaga itu, para pejabat sedang dipanggil ke *Gunseibu* (markas besar angkatan perang). Situasi ini merupakan keadaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan ketiga tokoh tersebut sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Syahrir bahwa Jepang telah menyerah kalah adalah benar. Untuk mendapat berita yang lebih jelas, Subardjo mengusulkan agar mereka bertiga pergi menemui Laksamana Maeda. Di kantor Maeda, setelah dipersilakan duduk, Bung Karno langsung menanyakan kebenaran berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Maeda tidak langsung menjawab pertanyaan itu dan terdiam untuk beberapa saat. Melihat reaksi Maeda, Bung Hatta memberi isyarat kepada Bung Karno bahwa berita yang disampaikan oleh Syahrir memang benar (Hatta, 1969:27).

Isyarat Bung Hatta dibenarkan oleh Bung Karno dengan anggukan. Setelah terdiam beberapa lama dengan wajah sedih Maeda mengatakan, "Berita itu disiarkan oleh Sekutu. Akan tetapi kami di sini belum lagi memperoleh berita dari Tokyo. Sebab itu berita itu belum kami pandang benar. Hanya instruksi dari Tokyo yang menjadi pegangan kami."

Ketiga tokoh itu meninggalkan kantor Maeda dengan satu keyakinan bahwa Jepang telah menyerah. Kemudian Bung Hatta mengusulkan kepada Bung Karno agar rapat PPKI diadakan keesokan harinya tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi mengingat semua anggotanya sudah lengkap hadir di Jakarta (Hatta, 1969:28). Momentum kepastian kekalahan Jepang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan karena itu pernyataan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan secepatnya. Pemerintah pusat dan daerah harus dibentuk selekasnya untuk menghindari keadaan kekosongan (*vacum*) kekuasaan. Para anggota PPKI yang berasal dari luar Jawa harus kembali secepatnya ke daerah mereka masing-masing dengan membawa instruksi yang jelas dari pemerintah pusat yang telah merdeka. Dalam kedudukan sebagai kepala biro Panitia Persiapan Kemerdekaan, Bung Hatta menugaskan Subardjo untuk

memberitahu anggota PPKI yang semua menginap di Hotel *Des Indes* untuk hadir besok pagi pukul 10 tepat di Kantor Dewan *Cuo Sangi In* di Pejambon.

Sementara itu para pemuda, yang telah mengetahui penyerahan Jepang secara resmi kepada sekutu, segera bertindak cepat. Inisiatif diambil oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan mengadakan rapat darurat pada sore hari tanggal 15 Agustus di Laboratorium Bakteriologi di Tjikini (Malik, 1982:42). Rapat ini dihadiri sekitar 22 orang yang sebagian besar diantaranya adalah mahasiswa. Perwakilan dari ketiga asrama yang disebut sebelumnya beserta unsur-unsur pemuda lainnya merupakan peserta rapat seperti: Darwis, Djohan Nur, Soebadio Sastrosatomo, Chaerul saleh, Wikana, Erie Soedewo, Abu Bakar Lubis, Subianto, dan Nasrun Iskandar.

Di bawah pimpinan Chareul Saleh rapat membahas soal bagaimana cara yang harus ditempuh agar rakyat Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaannya tanpa campur tangan pihak manapun. Campur tangan seperti apapun adalah tidak baik untuk citra Indonesia di mata dunia internasional karena dapat memberi kesan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah "kemerdekaan hadiah" (Malik, 1982:42). Dalam rapat dibicarakan pula tentang sikap apa yang harus diambil terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Rapat sampai pada keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah masalah bangsa Indonesia yang harus diselesaikan oleh rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada orang atau negara lain. Sedangkan tentang sikap terhadap Bung Karno dan Bung Hatta, rapat memutuskan bahwa kedua tokoh itu perlu diajak berunding sekali lagi agar mereka mau menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu para pemuda juga meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta melepaskan segala ikatan dan hubungan dengan "janji kemerdekaan" yang diberikan oleh Jepang.

Malam harinya hasil rapat disampaikan kepada Sukarno dan Hatta. Para pemuda yang yang pergi ke rumah Sukarno adalah adalah Wikana, Darwis, dan Soeroto Koento. Para utusan itu gagal meyakinkan Sukarno maupun Hatta, yang kemudian datang menyusul ke rumah Sukarno, bahwa Proklamasi harus dilakukan di luar segala ikatan janji kemerdekaan a la Jepang. Dalam perdebatan malam itu Wikana sempat mengutarakan ancaman: "apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan

pengumuman kemerdekaan itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah" (Adams, 2014:252). Mendengar ancaman itu Sukarno bereaksi keras dengan mengatakan: "Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok". Wikana yang terkejut dengan reaksi Sukarno kemudian menerangkan bahwa mereka tidak bermaksud membunuh Bung Karno, namun rakyat yang marah dapat membunuh orang-orang yang dicurigai yang dianggap pro-Belanda.

Kegagalan misi para pemuda tersebut dibicarakan dalam rapat pemuda yang diadakan pada tengah malam itu juga di Asrama BAPERPI (Badan Perwakilan Pelajar-Pelajar Indonesia) di Tjikini. Wikana menyampaikan laporan lengkap pembicaraannya dengan Sukarno dan Hatta. Rapat tengah malam itu memperkuat keputusan sebelumnya bahwa proklamasi harus dinyatakan sendiri oleh pihak Indonesia tanpa menunggu kemerdekaan hadiah dari Jepang.

Tindakan tertentu harus diambil untuk membuktikan tekad para pemuda tersebut. Diputuskan Sukarno dan Hatta perlu dibawa menyingkir keluar kota (Malik, 1982:46), ke suatu tempat di mana rakyat dan PETA siap menghadapi segala kemungkinan ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Para pemuda kuatir jika Sukarno dan Hatta tetap di Jakarta akan dipaksa oleh Jepang untuk memadamkan suatu pemberontakan pemuda yang direncanakan untuk dimulai di Jakarta.

Dalam pembicaraan terbatas diantara Chaerul Saleh, Sukarni, Singgih (perwira Peta), dan dr. Muwardi diputuskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Pembagian tugas dilakukan. Sukarni, Singgih, dr. Muwardi, dan Jusuf Kunto akan membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Sedangkan Chaerul Saleh dan Wikana akan pergi mengingatkan pemuda di ibukota, mempersiapkan mereka bila perlu membuat kekacauan atau bahkan pemberontakan. Kota kecil Rengasdengklok terletak 75 m dari Jakarta ke sebelah timur, ke arah Kerawang (Noer, 1990: 247). Pilihan jatuh ke kota kecil ini karena letaknya yang terpencil. Di sana terdapat asrama dan tangsi PETA yang berada di bawah *Syodanco* Umar Bahsan yang merupakan orang kepercayaan Singgih. Selain itu para pamong praja dan pemuda

Rengasdengklok yang tergabung dalam *Keibodan* dan *Seinandan* memiliki satu aspirasi dengan pasukan PETA yang ditempatkan di sana.

Proses penjemputan Sukarno dan Hatta dilakukan dengan lancar dan tanpa ada kekerasan sama sekali. Sukarno mengajukan syarat agar Hatta dan istrinya, Ibu Fatmawati, dapat menyertainya ke luar kota. Sementara Fatmawati berkeinginan agar putranya Guntur yang baru berusia sembilan bulan dapat dibawa turut serta. Ketika dijemput di rumahnya, Hatta sempat mencoba meyakinkan Sukarno bahwa apa yang direncanakan oleh para pemuda adalah suatu fantasi belaka yang akan terbentur pada kenyataan. Dengan menyerang Jepang yang masih lengkap perseniataannya para pemuda bukan melakukan revolusi, melainkan sebuah "*putch*" yang justru akan membunuh revolusi yang baru akan dimulai. Sukarno menjawab dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemuda merupakan keputusan mereka yang tidak dapat dipermasalahkan lagi.

Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945 di waktu subuh setelah umat Islam melaksanakan sahur berangkatlah rombongan Sukarno, Fatmawati dan Guntur dalam satu mobil. Sedangkan Hatta, Singgih, Sukarno dan Jusuf Kunto di mobil lainnya. Ketika matahari terbit rombongan Sukarno telah sampai di Rengasdengklok (Hannigan, 2015:195). Hampir semua anggota PETA di Chudan Rengasdengklok terkejut karena tidak mengira bahwa tamu yang datang dengan pengawalan di pagi itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Rombongan kemudian ditempatkan dalam salah satu ruangan asrama. Setelah beberapa saat beristirahat rombongan Sukarno dipindahkan ke sebuah rumah yang terletak di Desa Kalimati (kampung Bojong). Rumah yang telah dikosongkan itu terletak agak jauh dari jalan dan milik seorang petani yang bernama Djiauw Kie Song.



Gambar 4.3: Rumah Djiauw Kie Song di Rengasdengklok

Menurut Adam Malik (1982: 51), aAda beberapa pendapat tentang apa yang terjadi di Rengasdengklok selama Sukarno dan Hatta berada di sana. Menurut Adam Malik, sebelum di bawa ke rumah Djiauw Kie Song sempat ada pembicaraan antara Bung Karno dan Bung Hatta dengan Sukarni, Jusuf Kunto, dr, Sucipto, dan Umar Bahsan. Kemudian, oleh pihak pemuda dengan diwakili oleh Sukarni mendesak Sukarno dan Hatta untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh rakyat. Atas desakan itu, Bung Karno belum dapat memberikan jawaban secara pasti dan karena itu Sukarni memutuskan untuk meminta Jusuf Kunto untuk melaporkan dan merundingkan dengan para tokoh pemuda di Jakarta tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya.

Di sisi lain, Hatta (1969: 41) dalam karangannya tentang "Sekitar Proklamasi" mengatakan bahwa tidak terjadi suatu peristiwa penting selama ia dan Sukarno berada di Rengasdengklok. Sampai dengan siang hari tanggal 16 Agustus itu apa yang mereka lakukan tidak lain hanyalah "mengasuh dan memangku Guntur berganti-ganti". Pada pukul setengah satu siang Hatta sempat memanggil Sukarni untuk menanyakan "apakah revolusi yang akan mulai pukul 12 tengah hari sudah bermula". Sukarni

kemudian pergi mencari kabar dan kembali sejam kemudian dengan mengatakan bahwa ia tidak memperoleh kontak dari Jakarta dan Jakarta pun tak mengirim berita.

Ketika kedua tokoh Indonesia berada di Rengasdengklok terjadi peristiwa pelucutan senjata terhadap setiap orang Jepang yang ada di sana oleh para pemuda. Gerakan tersebut dilakukan oleh Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Masrih dan Achmad Ginun dengan dibantu tentara PETA. Mereka mengibarkan bendera merah putih di kantor kawedanan. Peristiwa ini menandai bahwa Rengasdengklok secara *de facto* merupakan wilayah yang bebas dari kekuasaan Jepang. Pada hari yang sama di Asrama PETA Rengasdengklok juga diadakan upacara bendera penurunan Hinomaru yang diganti dengan bendera Merah Putih.

Sementara itu, menurut Adam Malik (1982:42), pada hari yang sama di Jakarta telah terjadi perkembangan keadaan yang menunjukkan adanya titik temu tentang cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan itu dicapai melalui pembicaraan yang dilakukan oleh Ahmad Subardjo yang mewakili aspirasi Bung Karno dan Bung Hatta dengan Wikana yang merupakan wakil para pemuda. Mereka sepakat bahwa proklamasi akan dilakukan di Jakarta dalam waktu secepatnya. Setelah tercapai kesepakatan tersebut Subardjo kemudian menjemput Sukarno dan Hatta dan tiba di Rengasdengklok sekitar pukul 6 sore.

Pada mulanya para pemimpin PETA di Rengasdengklok yang menerima Subardjo berkeberatan untuk membiarkannya membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Mereka baru memberi ijin setelah Subardjo memberi kepastian bahwa proklamasi akan diselenggarakan keesokan harinya, 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 siang. Rombongan Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta dengan menggunakan tiga buah kendaraan.

Ketika melewati daerah Klender, kelihatan langit di sebelah barat berwarna merah sebagai tanda ada yang terbakar. Melihat itu Sukarno lalu berkata bahwa rakyat telah mulai memberontak dan itu merupakan tanda bahwa revolusi yang diharapkan oleh para pemuda telah berkobar (Adams, 214:261-262). Karena itu ia menyarankan agar rombongan kembali ke Rengasdengklok. Akhirnya mobil dihentikan dan Sukarno meminta supir untuk memeriksa. Tidak lama ia kembali dan mengatakan "itu hanya

rakyat yang membakar jerami". Rombongan akhirnya tiba dengan selamat di Jakarta pada sekitar pukul 9 malam.

D. Perumusan Naskah Proklamasi

Perumusan Naskah Proklamasi dilanjutkan setelah rombongan sampai di Jakarta dan rombongan langsung menuju ke Pegangsaan Timur 56 untuk mengantarkan Sukarno, Ibu Fatmawati, dan Guntur. Dari rumah Sukarno rombongan menuju ke rumah Hatta di Jl. *Syowa Dori* (sekarang Jl. Diponegoro 57). Sesampai di rumah Hatta meminta Subardjo menelpon hotel *Des Indes* (sekarang pertokoan Duta Merlin di Jl. Gajah Mada) untuk menyediakan ruang rapat bagi para anggota PPKI (Hatta, 1969:44).

Akan tetapi, pihak hotel tidak menyangupinya karena menurut peraturan mereka lewat pukul 10 malam tidak boleh ada kegiatan. Oleh sebab itu, Subardjo kemudian menghubungi Laksamana Maeda untuk meminjam rumahnya di Jl. *Meiji Dori* untuk keperluan rapat PPKI. Maeda mau meminjamkan rumahnya dan karena itu Subardjo kemudian menghubungi anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda untuk memberitahukan bahwa rapat malam itu akan diadakan di rumah Maeda (Noer, 1990:248). Sebagian anggota PPKI sebenarnya telah bertemu pagi itu pada pukul 10 untuk rapat darurat sebagaimana yang telah direncanakan Hatta. Namun karena Sukarno, Hatta, dan Subardjo tidak muncul mereka kemudian bubar, kembali ke hotel dan rumah masing-masing sambil menunggu perkembangan selanjutnya

Setelah beberapa saat di rumah, Hatta menerima telepon yang berisikan pesan dari *Somabuco* Mayor Jendral Nishimura yang meminta Hatta beserta Sukarno untuk datang menemuinya. Sekitar pukul 10 malam Sukarno tiba menjemput Hatta untuk kemudian bersama-sama pergi ke rumah Laksamana Maeda (Hatta, 1969:45). Sesampai di sana telah menunggu Maeda bersama beberapa pejabat Jepang lainnya yang menyambut kedatangan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta berangkat ke rumah Nishimura dengan disertai oleh Maeda. Di rumah Nishimura mereka menjumpai pemilik rumah yang didampingi oleh para penasihat politik utamanya: Kolonel Nomura, Kapten Nakamura, Saito, Miyoshi dan Nakatani.

Kedua pemimpin Indonesia menyampaikan keinginan mereka untuk melanjutkan rapat PPKI yang sedianya diadakan pagi tanggal 16 Agustus. Nishimura menjawab bahwa keadaan sudah berubah. Jika saja rapat diadakan tadi pagi Jepang tidak akan melarang, Namun sejak pukul 1 siang tadi tentara Jepang di Jawa telah menerima perintah dari atasan untuk tidak mengubah keadaan *status quo* (Noer, 1990:249).

Mendengar jawaban seperti itu, Sukarno dan Hatta mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah tahu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Selain itu rakyat juga masih ingat janji Jepang akan kemerdekaan Indonesia. Rakyat akan memerdekakan dirinya sendiri jika Jepang memang tidak sanggup menepati janjinya. Apa yang diminta hanyalah agar Jepang tidak menghalang-halangi keinginan rakyat untuk merdeka. Nishimura kemudian menjawab bahwa pihak Jepang tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan perintah untuk menjaga *status quo*. Lalu Nishimura melanjutkan bahwa jika pihak Indonesia mau sedikit sabar, ia yakin sekutu akan memperhatikan keinginan rakyat. Mendengar itu Hatta menjadi marah; "Apakah itu janji dan perbuatan samurai? ...Mungkin kami menunjukkan kepada tuan, bagaimana jiwa samurai semestinya menghadapi suasana yang berubah" (Noer,1990:249). Setelah dua jam berdebat tanpa ada kesepakatan, Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan untuk meninggalkan rumah Nishimura dan kembali ke rumah Maeda.

Sesampai di sana mereka disambut oleh Subarjo dan Maeda. Secara diam-diam Maeda telah pulang terlebih dari rumah Nishimura. Saat itu di rumah Maeda telah berkumpul para anggota PPKI, tokoh-tokoh pemuda, para pemimpin pergerakan dan anggota *Cuo Sangi In* yang ada di Jakarta. Orang-orang yang ada di dalam rumah sekitar 40-50 orang (Hatta, 1969:49).

Sementara itu, di luar banyak pemuda yang menonton atau menunggu hasil pembicaraan. Sukarno dan Hatta langsung dibawa Maeda ke bagian belakang rumah. Beserta mereka turut pula Subardjo, Miyoshi, Sudiro, Sukarni, dan BM Diah. Bung Karno dan Bung Hatta kemudian menceritakan pertemuan mereka dengan pejabat *Gunseikanbu* yang gagal mencapai kesepakatan. Karena itu mereka sampai pada kesimpulan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang.

Setelah itu Sukarno, Hatta, Subardjo, Sukarni dan Sayuti Melik mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi di ruangan yang sama. Tuan rumah mengundurkan diri dari pertemuan, sementara Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura tetap berada disitu. Menurut kesaksian Subardjo dalam rapat penyusunan teks proklamasi Bung Karno bertanya kepadanya apakah ia masih ingat isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini ditanyakan karena tidak seorangpun diantara orang-orang yang hadir membawa naskah resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang terkenal sebagai Piagam Jakarta (Hatta, 1969:49). Subardjo menjawab ia masih ingat namun tidak lengkap. Menurut Sukarno itu tidak menjadi soal karena yang diperlukan adalah kalimat-kalimat yang menyangkut proklamasi dan bukan seluruh teksnya (Swantoro, 2015:59). Sukarno kemudian mengambil secarik kertas dan menulis apa yang diucapkan Subardjo sebagai kalimat pertama teks proklamasi: "Kami rakyat Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat tersebut berasal dari teks Pembukaan UUD, yaitu akhir alinea ke-3 (Noer, 1990:250).



Gambar 4.4: Rumah Laksamana Maeda

Kalimat tersebut kemudian dibacakan oleh Sukarno dengan suara keras. Setelah mendengarnya Hatta kemudian menyatakan pendapat bahwa kalimat tersebut masih berupa pernyataan yang abstrak. Menurutnya kemerdekaan harus dilaksanakan dengan cara yang jelas dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa kekuasaan berada di tangan bangsa Indonesia. Menurut Hatta proklamasi harus mengandung pernyataan penyerahan kekuasaan dari Jepang ke tangan Indonesia (Swantoro, 2015:59). Selanjutnya muncul beberapa gagasan tentang rumusan yang tepat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan sebelum akhirnya Sukarno menuliskan kalimat yang bunyinya: "Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnya". Dengan demikian maka teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana namun khidmat telah berhasil disusun. Secara lengkap isi dari teks proklamasi adalah:

Proklamasi

"Kami rakyat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh tang sesingkat-singkatntya"

Djakarta, 17-8-"45

Wakil2 bangsa Indonesia

Setelah disetujui oleh oleh para perumusny teks proklamasi tersebut kemudian dibawa oleh para perumusny ke serambi depan rumah untuk disampaikan kepada anggota PPKI dan para pemuda (Noer, 1990:250). Waktu menunjukkan pukul 3 pagi ketika Sukarno mengawali pertemuan dengan memberikan sedikit keterangan tentang mengapa pertemuan tersebut berlangsung di tengah malam. Sukarno menjelaskan keadaan yang mendesak telah memaksa pihak Indonesia untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Sukarno kemudian menyampaikan bahwa rancangan teks

telah siap dibacakan dan ia berharap sekali semua yang hadir dapat menyetujuinya sehingga tugas penyusunan teks itu dapat diselesaikan sebelum fajar menyingsing.

Kemudian Sukarno membacakan konsep naskah proklamasi secara jelas dan perlahan-lahan agar semua yang hadir dapat mendengar kata demi kata. Setelah konsep naskah selesai dibaca Sukarno mengajukan pertanyaan kepada para hadirin apakah mereka setuju dengan konsep tersebut. Ternyata tidak ada yang keberatan dan ini ditandai dengan dan ini ditandai dengan suara serentak yang mengatakan setuju. Sesudah semua yang hadir mengatakan setuju Hatta berkata: "Kalau semuanya setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia". Hatta mengajukan usul itu dengan mengambil contoh *Declaration of Independence* atau proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat yang ditandatangani oleh semua orang yang hadir dalam penyusunannya (Noer, 1990:251).

Pendapat Hatta tidak disetujui oleh para pemuda. Mereka menolak menandatangani teks proklamasi bersama sama dengan anggota PPKI yang dikecam oleh Chaerul Saleh sebagai orang-orang yang "diangkat oleh *Kenpeita*". Para anggota PPPKI dan tokoh-tokoh tua lainnya yang bukan merupakan orang pergerakan nasional dianggap oleh pemuda sebagai para oportunist yang mendapat kedudukannya dengan cara mengabdikan kepada pemerintah militer Jepang. Pada saat itu Sukarno maju mengajukan pendapat yang dapat meredakan suasana. Ia mengatakan bukan semua yang hadir di situ yang harus menandatangani naskah tersebut, tetapi cukup dua orang saja yang menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta (Hatta, 1969:51).

Pendapat hadirin disetujui oleh para hadirin dengan bertepuk tangan riuh. Di pihak lain, pada saat itu Hatta, dalam tulisannya tentang "Sekitar Proklamasi", merasa kecewa karena harapannya agar semua yang hadir menandatangani dokumen bersejarah yang mengandung nama mereka semua untuk kebanggaan anak cucu di kemudian hari tidak dapat terlaksana. Setelah usulan Sukarno diterima oleh mereka yang hadir, Sukarno kemudian meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi berdasarkan tulisan tangan Sukarno disertai dengan perubahan-

perubahan yang telah disetujui. Selanjutnya Sayuti Melik mengetik naskah akhir dari teks proklamasi. Ada beberapa perubahan di dalam teks akhir tersebut, yaitu kata "tempoh" diganti dengan "tempo" dan kata "Wakil-wakil bangsa Indonesia" diganti dengan "Atas nama bangsa Indonesia". Selain itu penulisan tempat dan tanggal "Djakarta, 17-8-'45" diganti dengan "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05". Naskah akhir inilah yang kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Isi lengkap proklamasi yang telah diperbaiki adalah sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

Masalah berikutnya yang muncul adalah bagaimana cara menyampaikan proklamasi kepada rakyat dan dunia luas. Juga menjadi masalah dimana teks proklamasi tersebut harus dibacakan. Berdasarkan pemberitahuan Sukarni diketahui bahwa para pemuda telah mempersiapkan rakyat untuk berkumpul di lapangan IKADA (sekarang lapangan Monas) pada esok hari tanggal 17 Agustus 1945 untuk menyaksikan Proklamasi Kemerdekaan. Namun Sukarno tidak setuju karena murutnya lapangan IKADA adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa militer mungkin akan menimbulkan salah paham yang dapat menimbulkan bentrokan fisik mengingat penguasa Jepang saat itu telah menyatakan bahwa mereka akan menjaga *status quo*.

Sukarno kemudian mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dibacakan di depan rumahnya. Dan setelah disetujui ia meminta hadirin untuk datang menyaksikan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945

pukul 10 pagi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta (Hatta, 1969:53). Rapat selesai pada sekitar pukul 4 pagi. Sebelum semua hadirin pulang Hatta sempat berkata kepada B.M. Diah yang bekerja di kantor berita *Domei* untuk untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada seluruh dunia.

E. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan

Setelah pertemuan untuk menyusun teks proklamasi diselesaikan di pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda langsung menyusun kegiatan dan membagi tugas dalam kelompok-kelompok (Poeponegoro dan Notosusanto, 1990:89). Masing-masing kelompok bertugas untuk mengirimkan kurir untuk menyebarkan berita kepada masyarakat bahwa proklamasi sebentar lagi akan dilaksanakan. Beberapa anggota Barisan Pelopor yang menuju lapangan IKADA, setelah menerima perintah dari pimpinannya, segera memasang pengumuman yang ditulis tangan pada pohon dan dinding yang terdapat di sekitar jalan menuju ke lapangan tersebut. Pengumuman itu berisi pemberitahuan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak jadi diadakan di lapangan IKADA melainkan di Jl. Pegangsaan Timur No. 56.

Sepanjang hari itu lapangan IKADA dijaga oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap. Rupanya Jepang mengetahui rencana para pemuda untuk mengumumkan proklamasi di lapangan tersebut dan bermaksud menghalanginya. Meski demikian, pengumuman yang dipasang anggota Barisan Pelopor berhasil mencegah massa untuk tidak berkumpul di lapangan yang dijaga ketat tersebut yang bisa mengakibatkan terjadinya insiden-insiden yang tidak diinginkan. Selain itu tampaknya para serdadu Jepang yang menjaga lapangan tidak terlalu memperhatikan pengumuman tentang perubahan tempat pelaksanaan proklamasi.

Pada pagi itu sebenarnya banyak rakyat yang berdatangan ke lapangan IKADA. Mereka mengetahui tentang pelaksanaan proklamasi yang akan diadakan di lapangan tersebut berdasarkan informasi yang disebarkan dari mulut ke mulut. Bahkan pemimpin Barisan Pelopor, Soediro, pagi itu berangkat ke lapangan IKADA karena belum mengetahui bahwa tempat pelaksanaan proklamasi telah dipindahkan. Begitu

sampai di lapangan IKADA dan melihat pasukan Jepang berjaga-jaga ia segera pergi menemui dr. Muwardi yang kemudian memberitahukannya bahwa proklamasi akan diadakan di Pegangsaan Timur (Poeponegoro dan Notosusanto, 1990:90). Soediro lah yang memberitahukan anak buahnya di Barisan Pelopor untuk memasang pengumuman tentang tempat pelaksanaan proklamasi yang dipindah.

Rumah Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur memiliki riwayat yang menarik. Pada suatu hari di tahun 1943 Bung Karno datang ke kantor *Gunseikanbu* di Jl. Perwira untuk bertemu dengan salah seorang Jepang yang berkerja di sana bernama Shimizu. Di tengah percakapan mereka, Shimizu memanggil seorang pemuda bernama Chairul Basri dan mengatakan kepadanya untuk mencarikan rumah untuk Sukarno. Chairul Basri menyanggupinya karena ia memang mengetahui keadaan rumah-rumah yang ada di Menteng dan ia juga telah membantu beberapa pemimpin Indonesia untuk mendapatkan rumah di daerah tersebut. Ia kemudian mengatakan kepada Shimizu: "Akan saya carikan rumah besar, bagus dan representatif buat Bung Karno dan terletak pada sebuah jalan yang besar". Bung Karno lantas menginterupsi: "Chairul, bukan itu yang saya maksud. Saya ingin mendiami rumah yang luas pekarangannya, agar saya dapat menerima rakyat banyak" (Basri, 2003:39).

Demikianlah jawaban Sukarno yang mengejutkan Shimizu dan Chairul Basri. Baru pertama kali selama mencarikan rumah untuk para pemimpin Indonesia mereka mendengarkan persyaratan seperti yang diajukan oleh Bung karno. Pemimpin lainnya menginginkan rumah yang besar dan terletak pada jalan yang terkemuka. Baru Bung Karno yang mengutarakan keinginannya untuk mendapat rumah dimana ia bisa menerima rakyat banyak.

Setelah berkeliling daerah Menteng, rumah seperti yang diinginkan Bung Karno akhirnya ditemukan Cahiril Basri di Jl. Pengangsan Timur. Rumah itu bentuknya sederhana namun memiliki halaman yang sangat luas. Bung Karno setuju untuk pindah ke rumah itu setelah pemilik lamanya, seorang perempuan Belanda yang suaminya dinternir Jepang, diberi ganti rumah yang lebih besar di Jl. Lembang (Basri, 2003:4041). Demikianlah sekelumit riwayat rumah Pegangsaan Timur yang dapat menggambarkan karakter salah seorang proklamator.

Kembali ke suasana pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Di pegangsaan Timur 56 telah diadakan persiapan-persiapan sejak pagi hari. Pelaksanaan penjagaan keamanan dilakukan oleh *Cudanco* Latief Hendraningrat yang diminta oleh dr. Muwardi untuk menempatkan beberapa anak buahnya di sekitar rumah Bung Karno. Sedangkan wali kota Suwirjo meminta Mr. Wilopo untuk menyediakan peralatan yang diperlukan untuk upacara seperti mikrofon dan penguat suara. Tiang bendera untuk upacara disiapkan oleh Suhud Sastro Kusumo (dikenal juga sebagai S. Suhud), komandan pengawal rumah Bung Karno, atas permintaan dari Sudiro sebagai sekretaris pribadi Ahmad Subardjo. Karena suasana yang tegang Suhud tidak ingat bahwa di halaman depan rumah ada dua tiang bendera dari besi yang bisa digunakan untuk upacara pengibaran bendera (Poeponegoro dan Notosusanto, 1990:91). Ia justru menyiapkan sebatang bambu yang dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam dengan jarak beberapa meter dari teras rumah.

Bendera yang akan digunakan dalam upacara adalah bendera yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati (Noer, 1990:252). Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati setelah Perdana Menteri Jepang Koiso memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia di tahun 1944. Kain untuk bendera itu di dapat Ibu Fatmawati dari Shimizu yang bekerja di kantor *Gunseikanbu* melalui perantara pemuda Chairul Basri. Dalam memoarnya Chairul Basri menjelaskan bahwa kain yang diberikannya kepada Ibu Fatmawati berasal dari sebuah gudang Jepang di Pintu Air di depan bekas bioskop Kapitol. Ukuran bendera dan bentuknya tidak sesuai standar karena memang bahan yang digunakan berukuran tidak sempurna.

Seperti yang telah disepakati dalam pertemuan di rumah Maeda, menjelang pukul 10 pagi anggota PPKI berdatangan ke Pegangsaan Timur. Para anggota PPKI yang pagi itu hadir antara lain adalah: Abikoesno Tjokrosujoso, Anwar Tjokroaminoto, Mr. A.A. Maramis, dr. Boentaran Martoatmodjo, Harsono Tjokroaminoto, Mr. Latuharhary, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Mas Mansur, Oto Iskandar Dinata, Sam Ratulangi, Mr. Sartono, Pandu Kartawiguna, Sayuti Melik, dr. Muwardi, M. Tabrani, dan A.G. Pringgodigdo (Poeponegoro dan Notosusanto, 1990:91). Selain itu

berdatangan pula masyarakat dari berbagai penjuru kota dan bahkan ada yang datang dari luar kota.

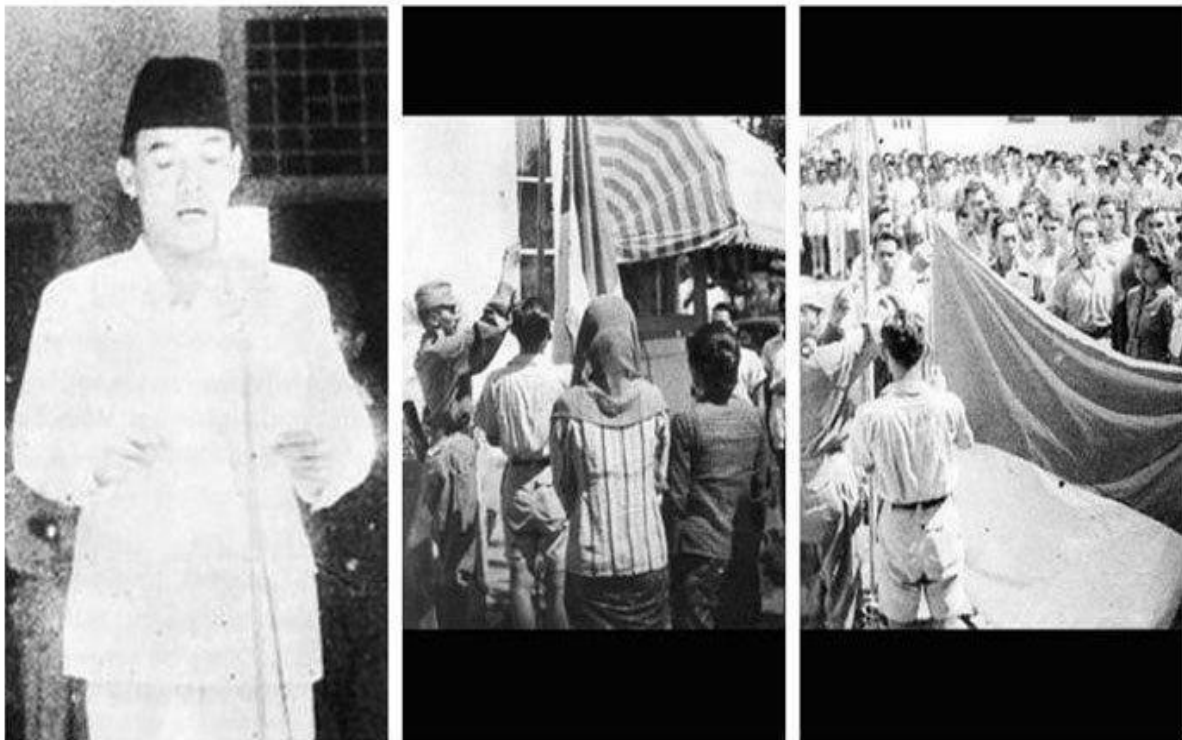
Pasukan PETA dan Barisan Pelopor yang akan ikut menghadiri proklamasi kemerdekaan dan bertugas menjaga keamanan, datang ke Pegangsaan Timur dengan berbagai cara. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecurigaan Jepang. Meskipun demikian masalah keamanan tetap merupakan masalah yang genting. Bagian belakang rumah yang dekat dengan rel kereta api dijaga oleh pasukan PETA, sedangkan bagian depan rumah penjagaannya diserahkan kepada Barisan Pelopor.

Suatu rencana pengamanan ditetapkan, yaitu bila pasukan Jepang tiba-tiba datang menyerbu, maka pasukan PETA akan segera melepaskan tembakan. Dengan tembakan itu diharapkan rakyat yang ada di dalam dan sekitar Pegangsaan Timur menjadi waspada dan segera menjaga keselamatan masing-masing. Selain itu suara tembakan diharapkan akan memberi semangat kepada rakyat untuk berjuang demi kemerdekaan yang sebentar lagi akan diproklamasikan. Dari pukul 8 pagi sampai dengan dilaksanakannya proklamasi, beberapa kali pasukan Jepang melintasi jalan Pegangsaan Timur. Namun karena mereka hanya lewat, maka tidak terjadi insiden apapun.

Susunan acara yang direncanakan untuk pagi itu adalah: pembacaan proklamasi, pengibaran bendera Merah putih, dan sambutan wali kota Suwirjo dan dr. Muwardi. Menjelang jam 10 pagi acara belum dimulai juga. Beberapa pemuda yang menunggu sejak pagi menjadi gelisah. Mereka kemudian meminta dr. Muwardi untuk mengingatkan Bung Karno bahwa hari sudah siang. Bung Karno pagi itu sakit demam sehingga baru pukul 9.30 ia dibangunkan untuk bersiap-siap (Nugroho dan Jazimah, 2011:125). Bung Karno masih berada di kamar ketika dr. Muwardi datang menemuinya untuk menyampaikan keinginan para pemuda. Bung Karno menolak membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Bung Hatta. Ketika dr. Muwardi mengatakan bahwa pembacaan proklamasi dapat dikerjakan oleh Sukarno sendiri karena Hatta sudah menandatangani teksnya, Bung Karno lalu menjawab: "Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silakan membaca proklamasi sendiri" (Hatta, 1969:54).

Pagi itu ada desas-desus yang mengatakan Bung Hatta tidak ada di rumahnya. Untuk memeriksa kebenaran berita itu, Sudiro meminta *Daidanco* Abdulkadir dan *Cudanco* Latief Hendraningrat untuk mencari Bung Hatta. Jarak rumah Bung Karno dan Bung Hatta tidak terlalu jauh dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu sekitar 10 menit. Ternyata Bung Hatta ada di rumah dan sedang menerima tamu. Rupanya beliau sedang menunggu untuk diberi tahu dan dijemput. Lima menit sebelum jam 10 Bung Hatta tiba di Pegangsaan Timur.

Beberapa menit sebelum pukul 10 pagi Bung Karno dan Bung Hatta berjalan bersama-sama menuju tempat upacara di halaman depan rumah dengan diiringi oleh Ibu Fatmawati. Melihat kedatangan kedua pemimpin Indonesia itu segera Cudanco Latief Hendraningrat memberikan aba-aba bersiap untuk Barisan Pelopor. Setelah semua berdiri tegak dengan sempurna, Bung Karno lalu dipersilakan untuk membacakan teks proklamasi. Dengan disertai Bung Hatta, Bung Karno maju beberapa langkah mendekati mikrofon.



Gambar 4.5: Peristiwa Pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Sebelum melakukan pembacaan teks proklamasi Bung Karno memberikan pidato singkat yang pada intinya mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan telah berlangsung selama ratusan tahun dengan mengalami berbagai cobaan. Secara khusus tentang masa pendudukan Jepang Bung Karno mengatakan: "Tampaknya saja kita menyandarkan diri pada mereka, tetapi pada hakekatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri". Dalam bagian lain dari pidato singkatnya Bung Karno menekankan bahwa: "Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri" (Poeponegoro dan Notosusanto, 1990:93). Setelah pidato singkat yang merangkum seluruh perjuangan rakyat Indonesia tersebut, Bung karno lalu membacakan teks proklamasi dengan suara yang jelas dan khidmat.

Sesudah teks proklamasi selesai dibacakan Bung Karno memberikan penegasan:

"Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu" (Koesnodiprodo, 1951:1).

Acara berikutnya adalah pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud yang mengambil bendera dari sebuah baki dan lalu mengikatkannya pada tali tiang dengan bantuan Latief Hendraningrat. Bendera dinaikkan secara perlahan dan tanpa diminta secara spontan hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu wali kota Suwirjo tampil ke depan untuk memberikan sambutan dan setelah itu dilanjutkan oleh dr. Muwardi. Dengan demikian selesailah rangkaian acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak ada protokol sama sekali, secara keseluruhan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana berlangsung dengan khidmat.

F. Berita Proklamasi ke Seluruh Wilayah Indonesia

Selama masa pendudukan Jepang media yang dapat digunakan sebagai sarana pemberitaan diawasi dengan ketat. Sarana pemberitaan seperti pers dan radio terutama digunakan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk kepentingan propaganda. Melalui undang-undang pers yang dimuat di dalam *Osamu Seirei* No. 8 tanggal 26 Mei 2602 (1942), pemerintah pendudukan menetapkan peraturan bahwa setiap surat kabar harus memiliki surat ijin terbit. Selain itu juga ditetapkan bahwa setiap berita yang akan dimuat di surat kabar harus disensor terlebih dahulu. Akibat pengawasan yang demikian ketat, selama masa pendudukan Jepang di Jawa hanya terbit beberapa surat kabar saja seperti: *Asia Raya* di Jakarta, *Tjahaja* di Bandung, *Sinar Baroe* di Semarang, *Matahari Terbit* di Yogyakarta, dan *Soera Asia* di Surabaya.

Pengawasan yang ketat juga dilakukan terhadap siaran radio. Selama masa pendudukan siaran radio oleh pihak swasta sama sekali tidak diperbolehkan. Jepang menggunakan radio sebagai alat propaganda dan wahana untuk menyampaikan berbagai pengumuman dan instruksinya kepada rakyat. Pesawat radio dipasang oleh pemerintah pendudukan hingga ke desa-desa. Radio-radio tersebut hanya dapat menangkap siaran dari pemerintah saja. Sedangkan mendengarkan siaran radio dari luar negeri dilarang keras.

Meski demikian, siaran radio Jepang memiliki dampak positif dalam membangun kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia. Hal ini terutama setelah terjadi titik balik dalam Perang Pasifik dimana Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di awal tahun 1945. Sejak itu Bung Karno sering diminta Jepang untuk menyampaikan pidato melalui radio untuk mengajak rakyat mendukung Jepang. Kesempatan baik tersebut tentu saja dimanfaatkan oleh Bung Karno untuk sekaligus membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia.

Karena semua sarana untuk melakukan pemberitaan diawasi, hampir tidak mungkin menyiarkan berita tentang proklamasi melalui media yang resmi. Di surat kabar *Asia raya* edisi tanggal 17 Agustus 1945 tidak ada berita tentang proklamasi yang akan diadakan pada pagi hari itu. Pada hari itu *headline* surat kabar ini memuat judul: "Terus berjuang menegakkan kemerdekaan hati bangsa Indonesia".

Namun sehari kemudian koran yang sama memuat berita tentang: "Pengangkatan kepala negara Indonesia Ir. Sukarno dan drs. Moh. Hatta, UUD negara disahkan rapat PPKI". Berita tentang proklamasi tidak dimuat karena berita itu dianggap sangat sensitif. Secara resmi pemerintah pendudukan Jepang menjalankan kewajiban sebagai pihak yang kalah dalam perang Pasifik untuk menjaga *status quo* di Indonesia sampai sekutu mendarat. *Gunseikanbu* pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan pengumuman yang isinya melarang berita atau karangan yang menyebut "Negara Republik Indonesia" dan "Komite Nasional Indonesia".

Wartawan dan karyawan koran *Asia Raya* yang kebanyakan adalah orang Indonesia melakukan inisiatif mengambilalih percetakan koran tersebut tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Pengambilalihan ditandai dengan penempelan plakat di pintu masuk percetakan yang bertuliskan "Milik Indonesia". Melalui percetakan inilah terbit surat kabar *Merdeka* yang merupakan koran pertama yang pro kepada Republik Indonesia. Koran baru tersebut dipimpin oleh salah satu pemuda yang terlibat dalam proses perumusan teks proklamasi yaitu B.M. Diah. Bertindak sebagai *managing editor* adalah wartawan Rosihan Anwar. Sejak diterbitkan, koran *Merdeka* banyak menyiarkan berita yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Republik Indonesia yang masih muda.

Hal yang berbeda terjadi dalam penyiaran berita proklamasi kemerdekaan melalui radio. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi telah menyerah tanpa

syarat kepada sekutu. Namun kekalahan tersebut tidak disiarkan oleh stasiun radio Jepang di Jakarta *Hoso Kanri Kyoku*. Kebijakan ini membuat pegawai-pegawai Indonesia di bagian penyiaran melakukan pemogokan yang dipicu karena keengganan mereka untuk menyiarkan berita bohong. Dua hari kemudian stasiun radio ini secara tidak resmi berhasil menyiarkan berita tentang proklamasi.

Penyiaran berita proklamasi diawali dengan kedatangan beberapa mahasiswa kedokteran di siang hari ke kantor radio *Hoso Kanri Kyoku*. Mereka berusaha menyiarkan berita tentang proklamasi namun tidak berhasil. Sore harinya, sekitar pukul 5.30, wartawan kantor berita *Domei*, Sjahrudin, masuk ke kantor radio dengan cara memanjat tembok belakang yang menghadap ke Jl. Tanah Abang. Sjahrudin datang dengan membawa salinan naskah proklamasi yang sebelumnya telah disiarkan oleh kantor berita *Domei*. Salinan naskah tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pada pukul 7 malam Sjahrudin berhasil menyiarkan berita proklamasi dengan menggunakan ruang siaran luar negeri yang sudah tidak dipakai lagi.

Akibatnya pada pukul 10 malam datanglah serombongan perwira militer Jepang ke kantor radio untuk mencari orang yang bertanggung jawab terhadap penyiaran berita proklamasi. Para perwira tersebut hampir saja mengeksekusi Yusuf dan Bachtiar Lubis. Kedua orang itu berhasil diselamatkan nyawanya karena pertolongan kepala kantor radio yang adalah orang Jepang. Insiden ini mengakibatkan kantor radio *Hoso Kanri Kyoku* sejak itu ditutup secara resmi. Kantor *Hoso Kanri kyoku* sekarang menjadi kantor RRI (Nugroho dan Jazimah, 2011:137). Meski demikian, berkat kegigihan dan keahlian dr. Abdurakhman Saleh siaran-siaran yang menyampaikan berita dari pihak RI terus dapat dilakukan melalui "Siaran Radio Indonesia Merdeka" dan *The Voice of Free Indonesia* yang dipancarkan dari gedung Fakultas Kedokteran dan Menteng Raya 76.

Berita proklamasi yang disiarkan melalui kantor berita *Domei* berasal dari Adam Malik. Pada pukul 8.30 pagi Adam Malik telah mendiktekan isi teks proklamasi melalui telepon kepada salah seorang pegawai kantor berita untuk disebarluaskan ke seluruh

Indonesia. Mengetahui berita proklamasi telah tersebar, pemerintah Jepang melalui badan intelejen *Hodohan Sensu* memerintahkan agar berita tersebut dicabut (Malik, 1982:60). Pencabutan berita menyebabkan terjadinya kebingungan di kantor-kantor *Domei* yang ada di daerah. Setelah staf *Hodohan Sensu* meninggalkan kantor *Domei* pusat, kantor-kantor daerah diberitahu bahwa berita tentang proklamasi yang sudah dilaksanakan memang benar. Dengan merujuk pada apa yang terjadi di kantor berita *Domei*, maka dapat disimpulkan bahwa berita proklamasi telah sampai ke beberapa daerah sebelum Bung Karno membacakannya di Pegangsaan Timur 56.



Gambar 4.6: Kantor Berita Domei, Jakarta

Berita proklamasi tersebar dengan berbagai cara dan diterima di daerah dalam saat yang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal jauh dari Jakarta banyak diantaranya yang tidak dengan segera percaya bahwa Indonesia sudah merdeka. Pemerintah pendudukan baru pada tanggal 22 Agustus 1945 mengumumkan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada sekitar bulan September, berita tentang proklamasi akhirnya dapat diterima di daerah-daerah yang terpencil. Ada berbagai macam reaksi yang diberikan masyarakat terhadap berita proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Sultan Hamengkubono dari Yogyakarta telah menunjukkan dukungan terhadap Republik Indonesia dengan mengirim telegram ucapan selamat atas terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sikapnya ini kemudian diikuti oleh para raja Jawa lainnya.

Beberapa penguasa lokal di luar Jawa yang telah didukung dan menjadi kaya di bawah pemerintahan kolonial Belanda tidak terlalu antusias terhadap berita proklamasi. Sikap mereka ini dilatar belakangi oleh ketidaksukaan mereka terhadap pimpinan di Jakarta yang bersikap radikal, bukan dari kalangan ningrat dan selalu berpihak kepada rakyat. Mereka juga tidak suka terhadap para pemuda pro republik yang ada di daerah yang menonjol sebagai kekuatan revolusi setempat yang dapat mengancam kedudukan para penguasa lokal. Namun demikian, di Sulawesi Selatan Raja Bone yaitu Arumpone La Mappanjudi mendukung pemerintah RI yang baru berdiri. Sikapnya ini kemudian diikuti oleh para raja di kalangan suku Bugis dan Makassar lainnya. Dukungan mereka ditunjukkan dengan mengakui wewenang gubernur yang dipilih oleh pemerintah RI untuk menjalankan pemerintahan di Sulawesi. Gubernur tersebut adalah G.S.S.J. Ratulangie (1890-1949), seorang Manado yang beragama Kristen.

Sementara sikap rakyat kebanyakan adalah pro republik tanpa banyak memikirkan konsekuensi dari sikap tersebut. Orang-orang Indonesia yang selama ini bekerja dalam birokrasi pemerintah kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang merasakan suatu keadaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Untuk

pertama kalinya mereka bekerja tanpa mendapat tekanan ataupun kemungkinan mendapat sanksi dari penguasa asing. Akibatnya banyak diantara para birokrat Indonesia yang untuk sementara waktu mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka kerjakan. Para priyayi yang merupakan tulang punggung birokrasi di Jawa kehilangan inisiatif. Peran mereka sebagai pengelola pemerintahan di beberapa tempat segera diambil alih oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman birokrasi sama sekali dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk memaksakan keinginan mereka.

Setelah rakyat sadar sepenuhnya bahwa mereka telah terlepas dari belenggu penjajahan terjadi euforia. Para pemuda adalah golongan yang paling bersemangat dalam menyambut kemerdekaan. Mereka seringkali menunjukkan antusiasme mereka terhadap kemerdekaan dengan melakukan pendudukan terhadap kantor-kantor pemerintahan atau bahkan merebut senjata dari gudang-gudang milik Jepang. Sikap keras para pemuda tersebut dalam banyak kasus ditanggapi oleh para komandan militer Jepang dengan menarik mundur pasukan mereka untuk menghindari konfrontasi terbuka.

Di Jakarta, antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda melakukan pengambilalihan terhadap trem-trem listrik, stasiun-stasiun kereta api dan stasiun-stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan yang berarti dari Jepang. Di penghujung bulan September berbagai kantor dan instalasi penting di kota-kota seperti Bandung, Surakarta, Yogyakarta dan Malang sudah berada di tangan para pemuda. Meskipun para pemimpin dari golongan tua bersikap hati-hati untuk mencegah agar para pejabat militer Jepang tidak menjadi marah, namun para pemuda tetap menyelenggarakan rapat-rapat raksasa di Surabaya pada tanggal 11 dan 17 September dan di Jakarta pada tanggal 19 September.

Rapat raksasa di lapangan IKADA tanggal 19 September dihadiri oleh sekitar 200.000 massa rakyat. Dalam rapat raksasa ini sempat terjadi ketegangan karena di sekeliling lapangan IKADA dijaga oleh pasukan dan tank-tank Jepang. Dalam situasi

yang demikian, rakyat yang memadati lapangan IKADA berhasil menahan diri sehingga terjadinya tindak kekerasan dapat dihindari. Pada rapat itu Bung Karno sebagai presiden RI meminta rakyat agar berlaku tertib dan bubar dengan tanpa menantang pihak Jepang. Perintah presiden RI dipatuhi oleh rakyat. Sejak itu Bung Karno dikenal sebagai pemimpin Indonesia yang suaranya paling didengar oleh rakyat dan memiliki kemampuan untuk mencegah konflik antara pihak Indonesia dan kekuatan asing.

BAB V

GEDUNG-GEDUNG BERSEJARAH DI KAWASAN MENTENG

A. Perkembangan Kawasan Menteng

1. Sejarah Kawasan Menteng

Menteng merupakan pemukiman kuno yang mulai dibangun pada awal ke-20. Kawasan yang saat dibangun disebut sebagai *Nieuw Gondangdia* ini, dibangun untuk orang-orang kaya Hindia Belanda. Kini, pemukiman elit yang sudah berusia seabad ini tetap menjadi kawasan elit di Jakarta. Banyak pejabat tinggi negeri dan pengusaha kaya yang tinggal di Menteng, seperti presiden kedua RI Soeharto, Wakil Presiden pertama Mohamada Hatta, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Mohammad Natsir, Jendral AH Nasution, Subandrio, dan Soedarmo Sastrosatomo.

Pembangunan pemukiman di Menteng terjadi setelah pemerintah Hindia Belanda, di bawah Gubernur Jendral Daendels, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, pada awal abad ke-19 (foto 1). Pada abad itu Pemerintah Hindia-Belanda bertahap menghapus Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) dan larangan memasuki wilayah Indonesia selain untuk pejabat pemerintahan.



Gambar 5.1: Istana Daendels di Weltevreden. Sekarang menjadi Kompleks Kementerian Keuangan.
Sumber Foto: Koleksi Rijs Museum.

Setelah penghapusan Tanam Paksa, pemerintah Hindia Belanda menerapkan Kebijakan Etis, yaitu meningkatkan kehidupan kaum pribumi, memperbaiki lingkungan pemukiman, mendirikan sekolah, dan membolehkan penduduk pribumi mejadi pegawai di kantor pemerintah. Pencabutan larangan memasuki wilayah Indonesia membuat banyak orang Eropa datang ke Weltevreden. Mereka membuka usaha dibidang agro bisnis dan bidang usaha lainnya. Kedatangan mereka membuat kota-kota semakin padat, termasuk di Weltevreden (Muhamad Alnoza, 2020:10)

Pieter Adriaan Jacobus Moojen, seorang arsitek dari Dewan Kota Praja Batavia, merancang sebuah pemukiman baru bernama Nieuw Gondangdia, dengan konsep kota taman atau *tuinstad*. Selain anggota Dewan Kota Praja, Moojen juga anggota *Commisie van toezicht op het beheer van het land Menteng* (Komisi pengawasan pengurusan tanah Menteng) atau *Kondangdia-commissie*. Komisi ini bertugas merancang dan membangun Nieuw Gondangdia. Proposal Moojen diajukan, pada 1910, dan disetujui, pada 1912.

Moojen adalah pengkritik gaya arsitektur Imperial dan Ornamental. Ia merancang bangunan hunian di Menteng lebih sederhana dan fungsional, memadukan gaya arsitektur Barat dengan gaya Tradisional, sesuai dengan iklim tropis. Gaya ini kemudian terkenal *Indische Bouwstijl*. Untuk membangun Nieuw Gondangdia, Moojen membangun perusahaan *real estate* pertama di Hindia Belanda, yaitu N.V. de Bouwploeg. Moojen lalu merekrut sejumlah arsitek untuk berkarya bersama, antara lain Frans Johan Louwrens Ghijsels, J.F. van Haytema, H. van Essen dan F.J. Kubatz. Kubatz kelak menggantikan Moojen, pada 1922 dan ditugaskan untuk menyempurnakan rancangan Moojen.

Kantor pusat Bouwploeg (orang Betawi menyebutnya Boplo) merupakan pintu masuk satu-satunya ke pemukiman elit Nieuw Gondangdia. Ruangan di kantor Bouwploeg, yang merupakan salah satu karya Moojen, dirancang dengan langit-langit yang tinggi dan jendelanya besar, sehingga sinar matahari banyak masuk menerangi ruangan. Ruangan yang terang memang diperlukan arsitek saat membuat karya. Selain sinar matahari yang cukup, sirkulasi udara juga bagus, mengalir melalui

jendela-jendela yang besar dan tinggi, yang berada di setiap dinding, di bawah kubah atap. Kantor Bouwploeg sekarang dijadikan Masjid Cut Meutia (foto 2).

Selain kantor De Bouwploeg, karya monumental arsitek lulusan Antwerpen, Belgia, ini adalah Kunstkring Art Gallery yang dibangun, pada 1914. Galeri seni milik *Nederlandsch-Indische Kunstkring* (Lingkar Seni Hindia Belanda) berada di ujung jalan Van Heutz (sekarang Jalan Teuku Umar). Gedung ini adalah bangunan pertama yang menggunakan beton bertulang di Hindia Belanda. Setelah masa kemerdekaan, gedung ini sempat lama digunakan sebagai kantor Imigrasi Jakarta Pusat (foto 3).

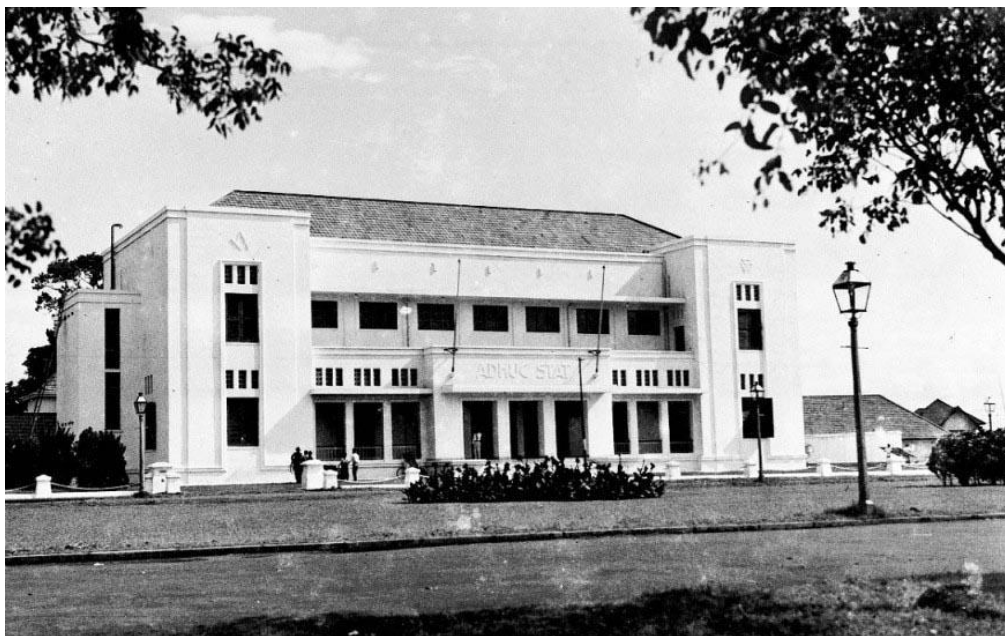


Gambar 5.2: Kantor Bouwploeg, sekarang Masjid Cut Meutia.
(foto: koleksi Tropen Museum)



Gambar 5.3: Gedung Kunstkring Art Gallery, yang kemudian sempat dijadikan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Foto: Bataviasche Kunstkring

Gedung Loggebouw (kini gedung BAPPENAS), yang dirancang oleh NE Burkoven Jaspers, dulunya adalah Gedung Loge. Seorang pastor dan juga sejarawan, Adolf Heuken menyebutkan bahwa Gedung Loge atau loji adalah tempat pertemuan para *vrijmetselaar*, organisasi internasional yang merahasiakan kegiatannya supaya memperoleh pengaruh besar. Gaya bangunan gedung ini menampakkan arsitektur yang tegas. Bagian tengahnya yang memanjang diapit oleh dua menara yang kekar (foto 4). Sementara F.J.L. Ghijsels merancang pembangunan Nassaukerk (Gereja Paulus), dan rumah-rumah di jalan Solo dan Garut, antara tahun 1919-1936.



Gambar 5. 4: Gedung Logebouw (sekarang menjadi Gedung Bappenas)

Selain tiga gedung besar itu, bangunan hunian atau rumah-rumah bergaya *Indische Bouwstijl* dibangun dalam sebuah pemukiman yang teduh, jalan-jalan yang besar, trotoar yang lebar sehingga nyaman untuk berjalan kaki, kanal-kanal, dan sistem sanitasi serta estetika standar Eropa pada masa itu. Konsep kota taman atau *Garden City* yang didominasi pemukiman.

2. Kawasan Menteng Sebagai Kota Taman

Kota taman mulai muncul di Eropa, pada awal abad ke-20, akibat kemunduran kualitas sosial, ekonomi, dan pemukiman, pada kota-kota industri yang terbentuk setelah terjadinya Revolusi Industri (Olivia Zoraya, 2008:38). Konsep kota taman inilah yang akan diterapkan di Nieuw Gondangdia. Pembangunan taman kota untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan penghuni. Kota taman juga didefinisikan dengan pemukiman penduduk yang tata letaknya teratur dan banyak lahan hijaunya.

Konsep kota taman pertama kali dicetuskan oleh Sir Ebenezer Howard, seorang ahli steno Parlemen Inggris, Konsep itu teruang dalam bukunya yang berjudul "*To-morrow: A Peaceful Path to Social Reform*". Konsep Ebenezer Howard ini

kemudian diterapkan pada kota-kota yang dibangun setelahnya. Howard mengajukan teori bahwa kota (town) dan desa (country) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kota memiliki fasilitas yang lengkap tapi lingkungan tidak sehat, sementara desa sebaliknya. Lingkungan desa sehat, tapi fasilitas tidak lengkap (Olivia Zoraya, 2008:39).

Dalam bukunya itu Howard menawarkan visi kota yang bebas dari area kumuh dengan memadukan kelebihan kota dan desa. Kota taman membangun taman-taman di dekat pusat kota. Semua fasilitas dan pelayanan saling terhubung. Gagasan Howard mengharuskan terbentuknya kota sub-urban baru, dalam ukuran terbatas, dikelilingi sabuk hijau lahan pertanian. Kota-kota ini akan tumbuh secara mandiri, dikelola dan dibiayai warga kota yang punya kepentingan ekonomi di sana.

Letchworth, di Utara London adalah kota taman pertama yang menerapkan gagasan Howard. Kota taman dengan luas 506 hektar dan dihuni 30.000 penduduk ini, mempunyai sabuk hijau pertanian seluas 1012 hektar. Hingga sekarang, Letchworth masih mempertahankan gagasan Howard (foto 5). Gagasan kota taman menyebar ke negara-negara lain di Eropa, hingga akhirnya diterapkan di Hindia Belanda.



Gambar 5.5: Kota taman Letchworth, di utara London. www.archdaily.com

Kemiripan Menteng dengan kota taman di Eropa ditulis oleh Adolf Heyken SJ dan Grace Pamungkas ST dalam buku "Menteng Kota Taman Pertama di Indonesia".

Keduanya mengutip pernyataan H.P. Berlage, seorang arsitek Belanda, yang datang ke Menteng, pada 1928. Berlage menyebut Menteng sebagai *Europese Buurt* atau Kawasan Eropa, mirip Minervalaan kawasan elite selatan Amsterdam, Belanda. Bedanya, di Amsterdam luasnya hanya 30 hektar, di Menteng luasnya 600 hektar.

Menteng adalah kota taman pertama yang dibangun di Hindia Belanda. Menurut Olivia Zoraya, dalam penelitiannya tentang pola pemukiman di Menteng dan Nieuw Menteng, unsur-unsur yang berada di dalam sebuah kota taman, antara lain: (1) taman, (2) jaringan jalan, (3) bangunan hunian, (4) bangunan umum, (5) jalur kereta api, (6) kawasan industri, dan (7) jalur hijau (Olivia Zoraya, 2008: 29).

Pada awalnya, Moojen membangun Menteng dengan pola jalan yang berpusat pada lapangan bundar yang luas. Jalan lebar memotong bundaran dan seluruh kawasan pemukiman menteng. Jalan lebar ini menghubungkan Menteng dengan Tanah Abang di barat, dan menteng dengan Mesteer Cornelis (Jatinegara) di bagian timur. Pada 1918, rancangan Moojen dianggap kurang praktis, karena beberapa jalan berpotongan membentuk sudut lancip sehingga sering terjadi kemacetan. Rancangan Kubatz resmi menggantikan rancangan Moojen, pada 1922. Rancangan Kubatz lebih sederhana, memperhatikan kelancaran lalu lintas dan jalan-jalan penghubung kota lain (foto 6)



Gambar 5.6: Kawasan Menteng dari atas.

Muhamad Alnoza, dalam penelitiannya mengenai perkembangan permukiman Menteng Jakarta, membagi pembangunan Menteng dalam (1) perintisan dimulai dari tahun 1910, (2) perkembangan, dimulai dari 1921, (3) puncak perkembangan, dimulai dari 1933, (4) penurunan mulai 1938, dan (5) penghentian sementara, sejak 1942 (Muhamad Alnoza, 2020:2). Penelitiannya berdasarkan peta lama Nieuw Gondangdia, yaitu peta 1910, peta 1921, peta 1933, dan peta 1938. (lampiran 1-4)

Pengembangan pertama Menteng dimulai dari wilayah bagian Timur Laut. Peta 1910 (lampiran 1) memperlihatkan Menteng masih didominasi perkampungan pemukiman seng (warna hijau). Saat itu, sudah ada rumah bata yang dimiliki pribumi dan warga Tionghoa (warna merah). Rumah bata ini sudah mengikuti kaidah arsitektur Belanda (Muhamad Alnoza, 2020:5).

Peta 1921 (lihat lampiran 2), memperlihatkan pembangunan sudah hampir setengah dari rencana yang dibuat. Pembangunan dimulai dari wilayah utara Nieuw Gondangdia. Bangunan bata permanen (warna merah) menggantikan sebagian besar kampung dan pemukiman seng. Kampung yang berada di tahun 1910 (warna hijau) sudah tidak ada lagi di tahun 1921

Pada peta 1933 terlihat pembangunan rumah bata sudah hampir sesuai dengan perencanaan awal (lampiran 3). Ada beberapa blok yang masih belum dibangun. Peta 1938 (lampiran 4), relatif sama dengan tahun 1933. Perbedaan yang terlihat adalah penambahan blok jalan di bagian barat. Bangunan juga bertambah jumlahnya jika dibandingkan dengan peta tahun 1933.

Berdasarkan analisa dari keempat peta itu, Alnoza berpendapat bahwa pembangunan Nieuw Gondandian atau Menteng, pada 1910-1922, mencapai jarak satu kilometer. Pada tahun 1933, Menteng mengalami puncak perkembangannya, terutama karena Kubatz mulai terlibat mendesain kota menggantikan Moojen. Pada masa itu perkembangan pembangunan kota taman mencapai 2 km di Utara dan 1,5 km di Timur (Muhamad Alnoza, 2020:14).

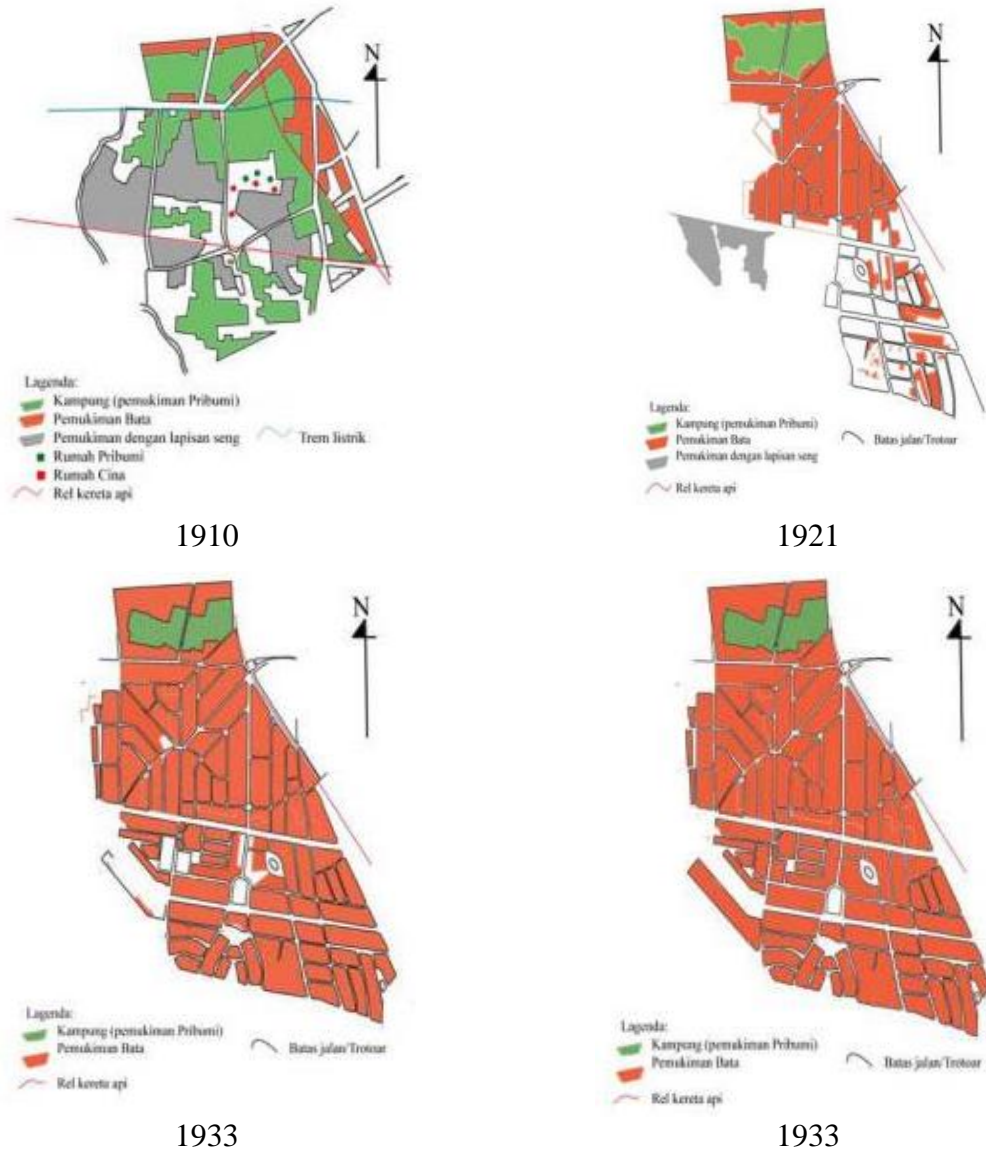
Peta 1938 memperlihatkan penurunan pembangunan. Kubatz hanya membangun blok-blok yang masih kosong. Ke Selatan sudah tidak ada perkembangan karena terhalang Banjir Kanal Barat, di arah Timur hanya 0,5 km dan Barat mencapai dua kilometer. Dapat diperkirakan, pada masa itu Menteng sudah tidak berkembang lagi dan akhirnya berhenti, pada 1942. Masuknya tentara pendudukan Jepang dan hengkangnya pemerintah Hindia Belanda dari Indonesia membuat pembangunan di Menteng terhenti.

Sejak dirintis sampai dihentikan, pada 1942, sudah 1.200 (seribu dua ratus) lebih rumah dan gedung telah dibangun di Menteng. Juga Taman-taman yang dibangun pada masa itu. Bangunan-bangunan warisan Belanda (foto 7) itu sekarang ada yang menjadi milik perorangan, milik Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Belanda (P3MB), milik perusahaan negara termasuk bank, yayasan dan gereja, presidium kabinet, swasta, dan pemerintah DKI Jakarta.



Gambar 5.7. Rumah-rumah di kota taman Menteng, sekitar tahun 1940-an.

Di antara seribu dua ratus lebih bangunan itu, terdapat beberapa bangunan yang berperan penting dalam persiapan kemerdekaan dan pada hari proklamasi kemerdekaan, yaitu gedung Joang Menteng 31, asrama Tjikini 71 (sudah dibongkar), gedung Mikrobiologi UI, Rumah Laksamana Muda Maida, dan Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur no 56. Rumah Soekarno, yang menjadi tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sudah dibongkar dan kini menjadi Taman Proklamasi.



Gambar 5.8: Peta kawasan Menteng dalam linimasa. Sumber: Leiden University Libraries

3. Kawasan Menteng Sebagai Pusat Gerakan Pemuda dan Gedung-Gedung Bersejarah Terkait Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi

Dalam catatan sejarah, agak sulit membayangkan bahwa di Jakarta sekitar 1945, beberapa aktivis mahasiswa kedokteran Sekolah Tinggi Kedokteran (*Ika Daigaku*) dan Sekolah Perobatan (*Yaku Gaku*), pernah memainkan peran yang cukup penting dalam merintis terbukanya pintu gerbang menuju Kemerdekaan Nasional Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Masyarakat Parapatan 10 merupakan sebuah komunitas pemuda dan mahasiswa yang sejatinya terdiri dari dua kelompok kecenderungan. Yang satu terhimpun dalam asrama Ika Daigaku, yang berpusat di Parapatan 10 dan yang satu lagi berkumpul di Baperpi (Badan Perwakilan Pelajar Indonesia) yang berpusat di Tjikini 71. Namun para mahasiswa kedokteran Ika Daigaku inilah yang punya ikatan organisasi yang solid dan jadi pendorong di kalangan pemuda-pemuda dan mahasiswa pada umumnya.

Hal yang unik dari para pemuda dan mahasiswa saat itu adalah menamakan dirinya sebagai "**Masyarakat Parapatan 10/1945**", di mana para anggotanya merasa terikat oleh suatu ideologi yang telah meresap di dalam kalbu masing-masing. Ideologi yang diikutinya itu disebut "**Reine Jurgend Ideologie**," yaitu cita-cita Pemuda Murni, suatu ideologi tanpa pamrih, anti-kedzholiman terhadap rakyat, anti perongrongan material/moral terhadap rakyat, dan anti penginjak-injakan hak asasi rakyat. (Hendrajit, 2016).

Landasan ideologi inilah para pemuda-mahasiswa Angkatan 45 yang kemudian membakar jiwa mereka yang mencapai titik kulminasinya ketika runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda dan fasisme Jepang pada 1945. Bagi para pemuda-mahasiswa Parapatan 10/1945, **Reine Jurgend Ideologie** ini dipandang paralel dan senafas dengan Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu adanya slogan bahwa '*hanya melalui persatuan bangsalah kemerdekaan baru dapat diraih*'.

Para pemuda-mahasiswa kedokteran Ika Daigaku ini ditempatkan di sebuah asrama yang berlokasi di Parapatan 10, dekat Senen. Di sinilah para mahasiswa mengalami masa penggemblengan dalam suasana persatuan yang erat sekali. Tak heran jika para mahasiswa Ika Daigaku Parapatan 10 kemudian menjelma sebagai kesatuan kuat yang punya kepercayaan teguh atas kemampuan diri sendiri untuk ikut serta menggerakkan roda revolusi, memelopori dan membakar semangat rakyat untuk berjuang.

Selama di asrama Parapatan 10 ini, mereka dibekali dengan ceramah-ceramah politik dan agama, selain memperoleh latihan-latihan fisik secara teratur oleh pemerintahan kolonial Jepang. Oleh sebab itu, tak heran jika beberapa eksponen

mahasiswa Parapattan 10 kemudian bergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) ketika perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Karena sejak dini mereka memperoleh pelatihan dari Daidan PETA *Jagamonytet* (yaitu sebuah batalyon PETA terkemuka di Jakarta, dalam hal disiplin militer, kemahiran menggunakan senjata serta cara-cara melaksanakan dan memimpin pertempuran).

Di Asrama Parapattan 10 ini pula para pemuda dan mahasiswa melakukan kontak dengan para pemimpin pergerakan nasional dirajut melalui pendidikan dan kursus politik bagi mahasiswa yang diharapkan sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Para pengurus Asrama menghadirkan para pemimpin pergerakan nasional yang dari segi umur jauh lebih tua untuk memberikan wawasan politik seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sukarjo Wiryopranoto, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. (Hendrajit, 2016)

Oleh sebab itu, dengan ikatan batin yang terjalin melalui pendidikan dan kursus politik inilah, beberapa pemuda-mahasiswa Parapattan 10 ini pula yang merasa terdorong ikut memotori aksi mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, menyusul informasi yang diperoleh pada tanggal 15 Agustus 1945 bahwa Jepang sudah menyatakan menyerah kalah terhadap tentara Sekutu. Akibatnya, para pemimpin mahasiswa, termasuk yang tergabung dalam Masyarakat Parapattan 10, bersama-sama berkumpul di Pegangsaan Timur No 17 menekan Bung Karno dan Bung Hatta agar secepat-lekasnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ketika terjadi vacuum of power menyusul menyerahnya Jepang terhadap sekutu.

Ada satu hal lagi yang menarik berkaitan dengan peran penting para pemuda-mahasiswa Parapattan 10 dalam masa peralihan menyusul Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan masa-masa konsolidasi nasional, beberapa hari sesudahnya, mereka ikut serta dalam peristiwa, sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pembinaan kelompok-kelompok pemuda rakyat seluruh kota Jakarta.
- b) Pengambil-alihan gedung-gedung penting beserta peralatannya dan alat angkutan.

- c) Aksi tulisan/corat-coret slogan-slogan di jalanan, tembok-tembok, angkutan umum dan lain sebagainya.
- d) Penyusunan Aparatur Negara, seperti Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Keamanan Negara (cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia, TNI). Pemerintahan di Ibukota Jakarta.
- e) Pengiriman kelompok-kelompok kecil ke berbagai penjuru Tanah Air baik di Jawa maupun Luar Jawa.
- f) Penyusunan organisasi pos-pos Palang Merah Indonesia di dalam maupun luar kota Jakarta, dan usaha-usaha lainnya. (Hendrajit, 2016).

Salah satu tokoh mahasiswa kedokteran yang tergabung di asrama Prapatan 10 yang cukup menonjol adalah Eri Sudewo, yang kelak di era pemerintahan Suharto pernah menjadi Rektor Universitas Airlangga Surabaya dan Duta Besar RI untuk Swedia. Dalam masa-masa genting ketika Indonesia dijajah Jepang, dalam susunan Pengurus Asrama Parapattan 10, Eri Sudewo memegang ketua biro kemahasiswaan. Posisi ini sangat strategis karena melalui Eri Sudewo inilah dalam memberikan arahan politik dan aksi perjuangan kemerdekaan tanah air.

Apalagi pada kenyataannya, para pimpinan asrama selain merupakan korps yang punya tugas mengelola hal ihwal asrama, pada perkembangannya kemudian jadi inti gerakan bawah tanah dalam menghadapi fasisme Jepang. Hal ini terbukti dengan munculnya gerakan-gerakan yang terkoordinir di kalangan mahasiswa dalam gerakan melawan Jepang, meskipun para mahasiswa kedokteran bertempat tinggal terpencar di beberapa asrama seperti Tjikini 71, di asrama puteri dan yang di luar asrama.

Penggemblengan di asrama Daigaku dan Yakugaku adalah yang paling ketat, meskipun yang mengelola dan memimpin adalah para mahasiswa itu sendiri dan tidak ada pengawasan ataupun pembinaan dari pihak Jepang. Karena Jepang hanya melihat dari luar saja, mereka tidak menduga bahwa para mahasiswa betul-betul menaati ketentuan-ketentuan yang mereka buat, sebab para mahasiswa kelihatannya berdisiplin. Pihak Jepang tidak menduga mahasiswa di dalam asrama digembleng untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan nasional, yang kelak terbukti para

eksponen Parapattan 10 menduduki posisi-posisi dan peran-peran strategis pasca proklamasi 17 Agustus 1945.

Ada sebuah cerita menarik. Suatu ketika, Bung Karno, berceramah dalam pertemuan dengan para pemimpin mahasiswa di Tjikini 71 untuk memecahkan persoalan pemogokan para mahasiswa terhadap kebijakan fasisme Jepang yang memberlakukan penggundulan Mahasiswa. Dalam pertemuan itu, Bung Karno menghimbau para mahasiswa untuk menghentikan pemogokan dan kembali kuliah atas dasar pertimbangan strategi dan taktik perjuangan. Namun himbauan Bung Karno mendapat bantahan dari Sudarpo Sastrosatomo dan Sujatmoko. Meskipun akhirnya keduanya bisa memahami sikap Bung Karno.

Menariknya, ketika meninggalkan pertemuan di Tjikini 71, Bung Karno sempat menyatakan bahwa Darpo dan Koko itu nanti akan menjadi "orang besar." Dan ternyata memang benar. Sudarpo kelak merupakan salah satu pengusaha sukses pribumi. Sedangkan Dr Sujatmoko kelak dikenal sebagai salah seorang cendekiawan Indonesia yang sempat menjadi rujukan para mahasiswa pada dekade 1960-an hingga 1980-an.

Nampaknya, para mahasiswa kedokteran Ika Daigaku Parapattan 10 dan Tjikini 71, merupakan kelompok mahasiswa yang paling radikal dalam melawan sepa-terjang fasisme kolonial Jepang. Terbukti beberapa mahasiswa yang kemudian ditangkap oleh Polisi Militer Jepang(Kempetai) sebagian besar merupakan mahasiswa kedokteran seperti: Sujatmoko, Sujono, Didi Jayadiningrat, Kurniawan, Wibowo, Mukiman, Sanyoto, Utaryo, Daan Yahya, Suwadi, Petit Muharto, Eri Sudewo, Purwoko, Tajuludin, Sayoko Sastrokarono, Karimudin, dan Suwito. (Hendrajit, 2016).

Penangkapan tersebut bukan saja akibat pembangkangan mahasiswa dalam latihan kemiliteran di lapangan Boxlaan(sekarang jalan Prambanan), tetapi juga adanya berita radio Australia yang ditangkap oleh penguasa Jepang, mengatakan para mahasiswa Indonesia akan mengadakan pemogokan lagi sebagai protes terhadap tindakan kejam penguasa Jepang.

Para mahasiswa Iga Daigaku inilah yang paling merasakan kekejaman tentara Jepang yang diterapkan di kampus mereka. Selain mengalami siksaan fisik, beberapa

di antaranya setelah ditahan selama 20 hari, kemudian ada yang dipecah dan tidak boleh ikut kuliah lagi di Sekolah Tinggi Kedokteran. Seperti Sudarpo, Suroto, Subianto, Margono, Sujatmoko dan beberapa mahasiswa lainnya. Sedangkan Eri Sudewo, salah seorang pimpinan mahasiswa yang cukup menonjol serta beberapa mahasiswa lainnya di kalangan Prapatan-10, diskors selama satu tahun tidak boleh kuliah.

Namun sejarah nampaknya cukup adil bagi mereka kelak. Mengingat kenyataan bahwa kala itu tenaga dokter sangat dibutuhkan karena masih langka, maka Eri Sudewo dan sekitar 30 orang mahasiswa lainnya, dibolehkan menyandang gelar dokter tanpa ujian. Karena mereka ketika dikenakan skors oleh pihak Jepang, sudah menduduki tingkat akhir fakultas kedokteran.

Alhasil, Eri Sudewo dan 30 rekannya itu tercatat sebagai lulusan pertama Jakarta Iga Daigaku, yang kelak setelah Indonesia merdeka diambil-alih oleh pihak republik. Yang sekarang lebih kita kenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, di Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa pengalaman buruk ini, tak heran jika para eksponen Parapattan 10 pada perkembangannya selain menaruh antipati yang besar kepada fasisme Jepang, sehingga secara garis politik lebih sehaluan dengan Sutan Sjahrir, yang kelak merupakan Perdana Menteri Indonesia Pertama, dibandingkan dengan Sukarno-Hatta yang cenderung lebih kooperatif menghadapi pemerintahan fasisme Jepang ketika itu.

Komunitas Mahasiswa Parapattan 10 merupakan salah satu dari kelompok pemuda-mahasiswa yang sangat aktif dalam persiapan jelang kemerdekaan Indonesia. Selain Kelompok Menteng 31, Tjikini 71, dan Gang Bluntas.

Selain itu, rupanya di Asrama Mahasiswa Prapatan-10 ini pula, konsepsi dan gagasan bentuk negara Indonesia merdeka sempat digodok dan dibahas secara intensif oleh para pentolan pergerakan mahasiswa. Seperti apakah Indonesia merdeka kelak baiknya apa lebih pas dalam bentuk kerajaan, republik, dominion, atau negara kesatuan.

Dalam soal diplomasi pun, para pemuda-mahasiswa juga cukup piawai. Seperti misal dalam membangun kesepahaman dengan perbagai elemen pemuda lewat Sidang –sidang kongres maupun rapat-rapat umum. Sebelum Badan Penyelidik Usaha

Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibentuk, elemen-elemen pemuda sudah melakukan Kongres Pemuda se-Jawa yang menyerukan persiapan diri bagi pelaksanaan Proklamasi. Bersama pemuda Menteng 31, eksponen Prapatan itu melakukan serangkaian rapat gelap dan mencetuskan Gerakan Angkatan Baru Indonesia.

Jadi jelaslah sekarang bagi kita, bahwa rapat BPUPK maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bermuara pada keputusan strategis 18 Agustus 1945, tidak datang tiba-tiba. Ada suatu kerja politik yang cukup lama. Melalui peran yang dimainkan oleh komunitas mahasiswa Parapatan-10 khususnya, maupun elemen-elemen pemuda-mahasiswa lainnya seperti Tjikini 71, Menteng 31, dan Gang Bluntas, pada umumnya, nampak jelas pemuda-mahasiswa ternyata memainkan peran yang sangat penting dalam merintis Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Pada 7 Juni 1945, sebagai ilustrasi, para pemuda-mahasiswa yang tergabung dalam Ika Daigaku, Yakugaku (Akademi Farmasi), dan Kenkoku Gakuin (Akademi Pemerintahan) menggelar rapat seluruh pemuda pelajar Sekolah menengah Tinggi untuk kemerdekaan Indonesia. Dan di sini lagi-lagi, terungkap betapa besarnya peran dan prakarsa pentolan-pentolan Prapatan-10. Atas dasar prakarsa para pentolan Prapatan-10 itu pula, rapat kemudian mengeluarkan tuntutan, selain "***Indonesia Merdeka Sekarang Juga***", pula mendesak diadakan latihan militer sempurna bagi pemuda-pelajar.

Tak aneh jika beberapa pentolan Prapatan seperti Eri Sudewo, kelak selain punya reputasi sebagai dokter ahli bedah dan paru-paru, juga merupakan perwira tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal.

Sujatmoko, jebolan Ika Daigaku yang sayangnya harus dipecat oleh Jepang sehingga gagal jadi dokter, namun kelak dikenal sebagai salah seorang intelektual Indonesia caliber internasional. Selain pernah jadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat di era pemerintahan Suharto, juga pernah menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang. Ironis bukan. Dipecat oleh Jepang sebagai mahasiswa, namun akhirnya menduduki posisi sangat terhormat di Jepang.

Sudarpo Sastrosatomo kelak merupakan pengusaha sukses di bidang perkapalan baik di era Sukarno maupun Suharto. Sehingga tepatlah prediksi Bung Karno bahwa

Sujatmoko dan Sudarpo kelak bakal jadi "orang besar." Tentunya, di bidang dan bakat khususnya masing-masing. Dan uniknya, meskipun dalam perkembangan sejarahnya kemudian, Bung Karno berseteru dan bermusuhan dengan Sutan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia, di mana Sujatmoko dan Sudarpo lebih segaris secara ideologis dengan Sjahrir dan PSI, namun Darpo dan Koko tetap menjalin hubungan pribadi yang baik dan akrab dengan Bung Karno. Bahkan melalui mediasi mereka berdua, komunikasi tak langsung antara Bung Karno dan Bung Sjahrir tetap terjalin.

Oleh sebab itu, komunitas Parapattan 10 bukan satu-satunya elemen mahasiswa yang cukup menonjol semasa transisi dari pemerintahan Jepang menuju Indonesia merdeka. Selain Parapattan 10, ada juga kelompok pemuda yang tergabung dalam Asrama Angkatan Baru Indonesia, yang berpusat di Menteng 31. Mulanya, kelompok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada bagian propaganda Jepang (*Sendenbu*). Secara resmi pendirian asrama ini dibiayai oleh Jepang dengan maksud menggembelng para pemuda untuk menjadi alat Jepang. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian tempat ini oleh pemuda dimanfaatkan secara diam-diam untuk menggerakkan semangat nasionalisme dan persiapan menuju Indonesia merdeka.

Beberapa tokoh utama adalah Ir Sakirman, DN Aidit, dan AM Hanafi. Mereka bertiga ini kelak dikenal sebagai pentolan-pentolan penting Partai Komunis Indonesia(PKI). Mereka ini mengorganisir Barisan Pelopor, termasuk tukang becak dan buruh kendaraan. Pada perkembangannya kemudian ketika Jepang mulai tanda-tanda akan kalah dari sekutu, kemudian membentuk Gerakan Indonesia Merdeka(Gerindom) dengan diketuai oleh DN Aidit, MH Lukman dan Kertapati.

Mereka ini membentuk sel-sel kerja dan menjalin kontak dengan pemuda-pemuda dan golongan lain secara diam-diam. Di antara para tokoh Menteng 31 adalah Adam Malik(kelak Menteri Luar Negeri RI di era Suharto). Chairul Saleh (terakhir Wakil Perdana Menteri III di era Bung Karno), Subadio Sastrosatomo (kakak kandung Sudarpo yang merupakan pentolan Parapattan-10), dan BM Diah(kelak merupakan pemilik dan pemimpin redaksi Harian Merdeka).

Meski Aidit, Lukman dan Hanafi waktu itu sudah dipandang berhaluan komunis, namun pada prakteknya mereka ini tetap berkomitmen demi kepentingan nasional dan tidak eksklusif untuk kepentingan partai komunis. Apalagi waktu itu kan PKI belum ada. Fokus waktu itu, bagaimana agar secepatnya mengusir pemerintahan fasisme Jepang, dan secepatnya memproklamasikan Indonesia merdeka. Tak pelak lagi, baik komunitas Parapattan 10 maupun Menteng 31, hakikinya merupakan kelompok pendobrak.

Setelah menyerap kembali kisah mereka, menunjukkan bahwa jangan-jangan tanpa desakan dan tekanan para pemuda-mahasiswa ini agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta bakal dilanda keraguan dan mungkin juga kekhawatiran, untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Hal yang tak kalah penting dalam memainkan peran merintis kemerdekaan Indonesia adalah peranan Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia (BAPERPI). Salah satu pimpinannya yang menonjol adalah Supeno (kelak jadi Menteri Pemuda di masa awal Kemerdekaan), Burhanudin Harahap dan Kusnandar. Kelompok persatuan mahasiswa ini, seperti juga Parapattan 10 dan Menteng 31, sangat anti fasisme Jepangoleh karena itu, praktis BAPERPI dan Parapattan 10 pada perkembangannya lebih menganut garis politik Sutan Sjahrir.

B. Gedung-Gedung Bersejarah di Kawasan Menteng Terkait dengan Perumusan Naskah Proklamasi

1. Asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (BAPERPI)

1.1 Sejarah Perkembangan Asrama BAPERPI

1.1.1 Terbentuknya BAPERPI di Jaman Pendudukan Jepang (1941-1945)

Pendudukan tentara Jepang di Jawa dan seantero Hindia-Belanda tahun 1942 menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menutup akses komunikasi dan merusak akses transportasi penghubung. Hal ini ikut berdampak bagi pelajar dan mahasiswa di kota besar yang berasal dari luar daerah, karena mereka kesulitan menghubungi sanak

famili serta tidak mendapatkan kiriman uang bulanan. Selain itu, berbagai institusi pendidikan seperti sekolah hukum (*Rechtshogeschool*), sekolah kedokteran (*Geneeskundige Hogeschool* atau GHS), sekolah pertanian (*Landbouw Hogeschool*), dan lain-lain ditutup sementara oleh tentara Jepang sampai masa tenang. Kedua hal itu memutus kontak kerabat sekaligus kegiatan belajar-mengajar untuk sementara waktu. Seiring dengan itu pula, pergolakan pemikiran pemuda dan genderang akan kemerdekaan Indonesia nampak semakin nyata di hadapan.

BAPERPI, atau *Badan Perwakilan Peladjar-peladjar Indonesia*, adalah sekelompok pelajar dan mahasiswa yang terbentuk sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi para pelajar di masa-masa tidak menentu itu. Mereka adalah orang-orang yang kelak tinggal bersama di sebuah bangunan asrama, atau yang mereka sebut "roemah pondokan" (disingkat *ropo*) yang beralamat di Jalan Tjikini No. 71. Asrama atau *ropo* "dibangun" dan dikelola secara gotong royong. Kehidupan para anggotanya beranjak dari nilai-nilai *lotsverbondenheid*, alias "perasaan senasib sepenanggungan", sehingga keseharian mereka diwarnai rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan tanggung jawab untuk saling peduli satu sama lain. Manajemen asrama Tjikini 71 dipimpin oleh Suyono Hadipranoto, atau yang juga dikenal dengan nama "Siegfried". Siegfried telah menjadi administratur asrama *ropo* bahkan semenjak para pemondok pertama kali bertinggal di eks-Hotel Schomper Menteng 31.

Terbentuknya "Kelompok Tjikini 71" ini tidak terlepas dari upaya mandiri organisasi pelajar Indonesia seperti PPPI dan Indonesia Muda dalam membantu para pelajar dan mahasiswa di Batavia (Jakarta) yang terlantar dan mengalami kendala ekonomi. Benih BAPERPI sebagai badan perwakilan mahasiswa telah tumbuh dari sebuah gedung dinas pejabat fakultas kedokteran (GHS) di kompleks Mikrobiologi UI yang pernah dijadikan rumah makan (*roemah makan*, atau ROMA) tempat membagi kupon jatah makanan dan ongkos untuk ±100 orang mahasiswa yang dikelola Sarwono Jenderal, Sugiono, dan Mohamad Said.

BAPERPI dibentuk pada tahun 1941, sejak pengaruh politik Belanda di Indonesia mulai melemah dan negara induk Belanda dikuasai oleh Jerman. Badan perwakilan ini

diprakarsai terutama oleh tiga organisasi, yaitu PPPI yang dipimpin Chairul Saleh, USI yang diketuai Azis Saleh, dan IVSV yang diwakili oleh Poppy Saleh. Dari ketiga organisasi tersebut, disepakati bahwa BAPERPI dipimpin untuk pertama kalinya oleh Supeno, yang pernah menjabat sebagai wakil ketua PPPI.

PPPI merupakan organisasi nasionalis yang juga menolak ajakan asosiasi pelajar Batavia (*Bataviase Studenten Vereniging*) untuk bersumpah setia kepada pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa depan, Supeno berhasil menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pembangunan dan Pemuda tahun 1949 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia tahun 1970. (*BAPERPI*, 1990)

Di samping itu, balatentara Jepang juga membentuk badan penolong korban perang (PEKOPE) yang tugasnya antara lain menyediakan tempat tinggal bagi para pelajar dengan menggunakan gedung-gedung yang sebelumnya dimiliki masyarakat Eropa-Belanda. Pada awalnya, para pelajar yang terhimpun di bawah naungan BAPERPI diberi ruang tinggal di Hotel Schomper. Sebuah hotel yang mewah, namun pemenuhan hidup sehari-hari penghuninya jauh dari berkecukupan. Di gedung bekas hotel ini jugalah kelak menjadi lokasi latihan kader politik "Angkatan Baru Indonesia" prakarsa Chairul Saleh dan Sukarni, yang sebagian anggota BAPERPI juga turut bergabung. Ketika pemerintahan administratif Jepang sudah cukup mapan dan situasi lebih kondusif, badan PEKOPE lantas dibubarkan. Penghuni asrama Menteng 31 kemudian diminta berpindah dan harus keluar di akhir bulan Juli 1942.



Gambar 5.9: Suyono/Siegfried (kiri), Supeno (tengah), dan Chairul Saleh (kanan)

Siegfried alias Suyono, Supeno, dan kawan-kawan mencari tempat tinggal pengganti, dan menemukan sebuah rumah besar di Jalan Tjikini No. 71. Gedung ini adalah milik seorang pensiunan **keluarga van Rhijn**, dan kala itu dihuni oleh istrinya yang menjeranda (***Mevrouw Weduwe van Rhijn***). Dengan biaya sewa yang cukup murah (sekitar Rp 75 per bulan), fasilitas rumah ini cukup menampung 50-60 orang pemuda dan mahasiswa.

Proses perpindahan dari Menteng 31 ke Tjikini 71 menggunakan alat angkut gerobak dan berjalan kaki. Mereka juga mendapatkan sumbangan perabotan asrama seperti meja biliard, bangku panjang, dan kursi-kursi rotan dari organisasi pelajar USI, IVSV, dan PPPI. Papan nama "BAPERPI" lalu dipasang di depan bangunan *ropo* untuk menandai identitas penghuni barunya. Tidak semua pemondok Menteng 31 berpindah ke Tjikini 71, karena beberapa anggota pulang atau ikut keluarga masing-masing.

Meskipun ada direktur dan administrasi asrama, keseharian di "roemah pondokan" (*ropo*) Tjikini 71 tetap melibatkan tanggung jawab semua pemondok dan berlandaskan gotong royong dan tolong-menolong. Pengelolaan mandiri dilakukan dalam hal patungan untuk menanggung biaya makan-minum, biaya sewa *ropo*, piket pengaturan jatah makanan (*corve dienst*), hingga tanggung jawab mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga masing-masing. (*BAPERPI*, 1990)

Beberapa pemondok yang mulai bekerja menjadi pegawai di Departemen Keuangan di bidang pajak tanah dan akuntan, dokter, hingga guru bahasa Indonesia setelah situasi cenderung aman di Jakarta turut menyisihkan gajinya bagi keberlangsungan hidup *ropo*. Sebagian pemondok lainnya kembali meneruskan sekolah kedokteran di Ika Daigaku (1942), namun tidak sedikit juga yang berkegiatan di luar itu: terlibat dalam rapat-rapat organisasi, bekerja sebagai tukang catut, bahkan ada yang sekadar menganggur. (BAPERPI, 1990)

1.1.2 Asrama BAPERPI Mendorong Proklamasi Kemerdekaan

Gedung asrama atau *ropo* BAPERPI digunakan sebagai pusat kegiatan dan pemondokan mahasiswa atau pelajar di Jakarta. Fungsi awalnya yang cenderung dilatarbelakangi faktor sosial, yaitu untuk menyediakan akomodasi bagi mahasiswa yang terlantar, kemudian berkembang menjadi ruang diskusi politik yang mengobarkan ide kebangsaan dan semangat kemerdekaan Indonesia. Asrama ini menjelma sebagai pusat sekaligus lintasan penting di antara pergerakan mahasiswa, pelajar dan pemuda Jakarta dan seringkali menyebut mereka sebagai "Angkatan '45".

Sepanjang di bawah pengawasan ketat balatentara Jepang tahun 1942-1945, suasana di Jakarta terasa tegang dan penuh curiga. Terlalu banyak aturan yang janggal, mengekang, dan menyulitkan para pelajar dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, seperti pelarangan mengibarkan bendera merah-putih dan pembentukan organisasi atau partai politik, bahkan larangan berkumpul di atas jumlah lima orang.

Klimaks permusuhan dengan pemuda Tjikini 71 antara lain ketika terjadinya aksi penggundulan mahasiswa oleh tentara Jepang di asrama pelajar kedokteran Ika Daigaku dan Menteng 31 yang diwarnai protes para pelajar, sampai Bung Karno ikut turun tangan meleraikan konfrontasi. Beberapa mahasiswa dilarang melanjutkan studinya bahkan ada yang mengalami masa tahanan dan mendekam di penjara.

Menurut kesaksian para anggota BAPERPI, momen kegiatan politik pertama dari BAPERPI adalah ketika mereka menghadiri pertemuan dan perkenalan resmi untuk pertama kalinya dengan dwitunggal Sukarno-Hatta saat mereka berdua pulang dari

pengasingan di Bengkulu tahun 1942. Semenjak itu, hampir rutin setiap bulan anggota BAPERPI kerap diundang ke rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur No. 56 untuk menghadiri diskusi kebangsaan.

Asrama BAPERPI selanjutnya menjadi ruang akumulatif perjuangan pemuda dan mahasiswa menjelang detik-detik akhir untuk terus mendorong golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kiprah pamungkas BAPERPI terjadi pada suatu malam menjelang 16 Agustus 1945. Di serambi atau paviliun belakang *ropo*, berlangsung sebuah rapat yang dipimpin Chairul Saleh serta dihadiri penghuni asrama bersama eksponen opsir PETA Ksatriyan Jaga Monyet dan Ksatriyan Rengasdengklok.

Mereka kembali merundingkan laporan Wikana dari perwakilan pemuda dan Darwis dari perwakilan pelajar yang ditolak oleh Sukarno, Hatta, dan anggota golongan tua lainnya untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 16 Agustus, sebagaimana hasil rapat di kompleks Mikrobiologi UI (*Koningin het Hygiene en Bacteriologisch*) pada malam 15 Agustus. Dari asrama BAPERPI inilah, akhirnya mereka memutuskan untuk "mengangkut" atau "menculik" pasangan dwi-tunggal Sukarno-Hatta keluar dari Jakarta demi menetralsir pengaruh Jepang demi menyambut keniscayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

1.2 Tinjauan Arsitektur Asrama BAPERPI

"Roemah pondokan" (*ropo*) atau asrama BAPERPI terletak di Jalan Tjikini No. 71, tepat bersisian dengan kebun binatang (*planten en dieren-tuin*) yang kelak sempat menjadi Taman Raden Saleh dan sekarang Taman Ismail Marzuki. Informasi yang terkumpul dari para anggota BAPERPI dalam memoar *BAPERPI*(1990), bangunan *ropo* adalah sebuah gedung hunian/rumah yang berukuran cukup besar dan luas.

Area lahan asrama BAPERPI meliputi bangunan rumah utama yang memiliki empat kamar besar, serta dilengkapi dua bangunan paviliun di sayap kanan dan kiri yang berderet membujur ke sisi belakang bangunan utama. Hari ini, tatanan ruang dan bangunan tersebut benar-benar hilang dari tapak lokasi aslinya yang telah

mengalami perubahan total, sehingga dalam rangka merekonstruksi aspek keruangan bangunan, diperlukan sumber-sumber arsip primer yang dapat membantu dalam membayangkan wujud fisiknya semasa ia berdiri.

Dalam koleksi peta lama Jalan Tjikini No. 71, terlihat bahwa pada tahun 1921 telah nampak hadirnya massa bangunan yang mirip dengan susunan bangunan utama yang diapit oleh dua bangunan memanjang, sehingga dapat diduga bahwa bangunan ini telah berdiri sekurang-kurangnya sejak dekade kedua abad ke-20.

Lokasi gedung asrama BAPERPI yang persis bersisian dengan Kebun Binatang membuat para anggotanya cukup rutin berolahraga di sekitar halaman kebun binatang. Tampak luar bangunan gedung asrama menunjukkan sebuah kualitas dan karakteristik rumah Indis modern, di mana rancang bangun dengan sentuhan Eropa telah berhasil mengakar dan menyesuaikan iklim tropis di Hindia-Belanda. Jenis arsitektur kolonial akhir (*late colonial*) semacam ini umumnya juga dilengkapi satu-dua bangunan "paviliun" di sisi gedung utama yang berfungsi sebagai unit penunjang.



1897



1904



1911



1921



1938



1945

Gambar 5.10. Lokasi Tjikini 71 (tanda panah mengacu koleksi peta Batavia 1897-1945)

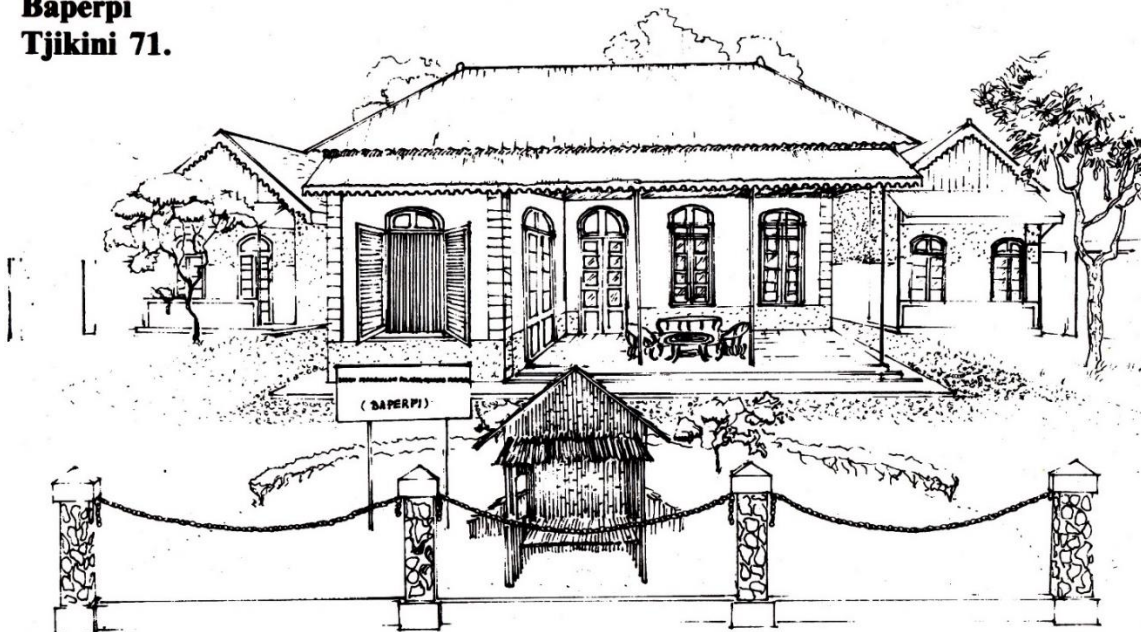


Gambar 5.11. Tampak aerial kawasan Tjikini tahun 1920-1930-an. Sumber: Tropenmuseum



Gambar 5.12 Tampak aerial kawasan Tjikini tahun 2022. Tanda panah menunjuk ke sekitar bekas lokasi Asrama BAPERPI Jalan Tjikini Raya No. 71. Sumber: Google Earth (2022)

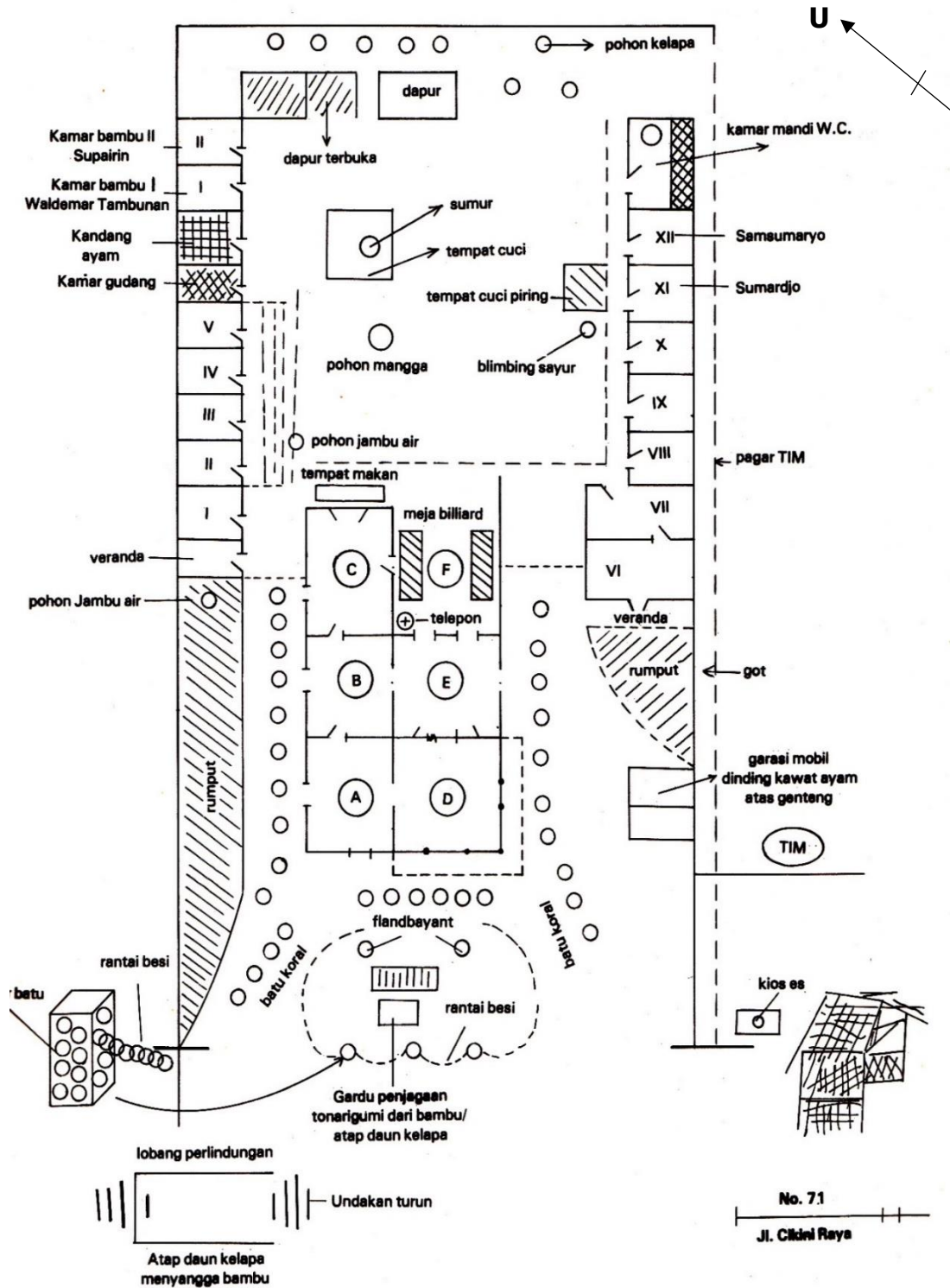
**Baperpi
Tjikini 71.**



Gambar 5.13 Sketsa tampak luar asrama BAPERPI. Sumber: *BAPERPI* (1990)

Menelisik gambar sketsa asrama yang tersisa, dapat terbaca bahwa gaya rancang modern rumah asrama BAPERPI telah sampai pada tingkatan lanjutan, di mana tatanan elemen bangunan tidak terlalu mementingkan prinsip simetrikal-rasional khas kolonial Eropa abad 18-19 dan lebih banyak lagi menonjolkan aspek fungsionalnya. Hal ini misalnya dapat terlihat dari teras depan rumah yang tidak serta merta dibuat terbuka lebar kiri-kanan dan seimbang, tetapi dibuat di sisi samping untuk menghadap langsung ke arah halaman kebun binatang di sisi tenggara.

Adapun ruangan di sisi samping teras depan memuat kamar-kamar tidur dengan jendela berprofil krapyak dan kaca, memiliki bentuk kusen jendela *arch* yang melengkung. Atap bangunan utama terdiri dari atap perisai yang dibantu dengan atap kanopi atau teritisan berornamen hias. Untuk dua bangunan paviliun menggunakan atap pelana lengkap dengan atap teritisan, gable, dan jendela bermodel serupa dengan bangunan utama. Pagar dibuat dari rantai dan tiang-tiang kecil, serta terdapat pos jaga sederhana.



Gambar 5.14. Denah skematik *ropo* atau asrama BAPERPI. Sumber: BAPERPI (1990)

Denah area asrama BAPERPI cukup kompleks dan terperinci (**Gambar 6**). Semua yang bertinggal di sini adalah kaum laki-laki. Di bangunan induk, kode **D** adalah ruang terbuka atau teras depan, sedangkan kode **E** adalah bagian tertutup, dan **F** menjadi ruang makan sekaligus ruang rekreasi biliard. Kamar-kamar dibagi ke setiap beberapa orang, sehingga satu kamar bisa dihuni empat sampai delapan orang tergantung dari luasan kamarnya.

Mengacu pada **Gambar 6**, kamar **A, B, C**, adalah kamar-kamar yang berada di gedung induk. Kode kamar **A** adalah tempat tidur Darwis, Ma'arif Mangunkusumo, Talibin Arifin Mochtar, dan Nuzmir. Kamar **B** dan **C** memuat paling banyak orang, yaitu masing-masing delapan orang. Kamar **B** terdiri dari Gono Parsalimbangan Pane, Hamonangan Harahap, Gatot Karsono, Supardjan, Bena Sitepu Pandebes, Mohamad, Tagor Ginagan Harahap, dan Suyudno Brotodiharjo. Kamar **C** diisi oleh Sudjati, Moh. Thahir, Subroto, Ali Cash, Kusnandar, Suwahyu, Kustedjo, dan Wiratno.

Berikutnya bangunan paviliun yang berukuran lebih kecil dibandingkan gedung induk memuat tiga sampai empat orang per kamar. Di paviliun barat laut, terdapat lima kamar tembok dan dua kamar bambu yang dibuat seadanya karena kurangnya ruang tidur yang mengakomodasi para penghuni. Di **Kamar I** terdapat Subagio Reksodipuro, Sumarno (*Kambing*), Sumarman (*Gajah*), dan Abdullah (*Domble*). **Kamar II** berisi Sudarpo (*Sambo*), Subadio (*Kiuk*), Susanto Djojosingito (*Tengki*), dan Suryaningrat. **Kamar III** ada Illahude, Suhaji Hadibroto, Nusyirwan Adil Hamzah, dan Supono. **Kamar IV** ditinggali Sumono, Sanusi, Suhardi Pung, dan Setiadi. Sedangkan **Kamar V** diisi Alimurti, Suroso, Amin Katamsi, dan Ismoyo.

Di paviliun tenggara yang berbatasan langsung dengan kebun binatang atau Taman Ismail Marzuki terdapat ruang-ruang yang disulap menjadi 7 kamar. **Kamar VI** dihuni Sayoko, Sumarno (*Samkok*), dan Suparto Yarman. Di **Kamar VII** ada Teuku Karimuddin, Teuku Moh. Yusuf, dan Hasan Tan. **Kamar VIII** diisi Utoyo, Muharto, dan Sudarko; **Kamar IX** oleh Sumantri, Burhanudin Harahap, dan Kadarusman; sedangkan **Kamar X** dihuni Arifin Andanasasmita, Sutikno, dan Sunario (*Mr. Sioe*).

Hanya dua orang yang mendapatkan satu kamar sendiri, yaitu Sumardjo (**Kamar XI**) dan Samsunaryo (**Kamar XII**). (*BAPERPI*, 1990)

Beberapa anggota yang besar hatinya untuk tidak mendapatkan kamar tidur yang lebih layak dari teman-temannya terpaksa mencari siasat ruang tinggal lainnya yang tersedia. Tilam Purwohusodo memakai gudang, adapun kamar bambu (sebelah dapur) diisi oleh Waldemar Tambunan dan Supairin, bahkan sang administratur Siegfried alias Suyono Hadipranoto bersama Subiyono Tjitrowinoto harus memiliki tempat tidur di kandang ayam!

1.3 Asrama BAPERPI dan Kelanjutan Kelompok Tjikini 71 Kini

Menurut anggota BAPERPI sendiri, tidak ada catatan yang jelas atau pasti mengenai kapan secara resmi BAPERPI dibubarkan. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, masing-masing anggota pemondok *ropo* mulai sibuk masing-masing. Mereka tersebar ke berbagai penjuru wilayah Indonesia dan tenggelam dalam pekerjaan mereka di berbagai bidang kehidupan. Sebagian anggota bergabung dalam *Committee van Actie* yang berkantor di Menteng 31, sebagian lain ikut dalam barisan Lasykar Rakyat Jakarta Raya, dan ada pula yang terjun ke dalam partai politik atau masuk ke barisan tentara BKR-TNI.

Kusnandar sebagai salah satu pemondok mengungkapkan, berkurangnya penghuni *ropo* terutama di masa perpindahan ibukota darurat ke Yogyakarta berdampak pada menunggaknya biaya sewa bangunan, yang akhirnya membuat sang pemilik, janda van Rhijn, meminta kembali gedung asrama tersebut. Kemungkinan besar, nasib *ropo* selanjutnya dialihfungsikan oleh pemiliknya menjadi bangunan komersial, terlihat dari banyaknya iklan yang mencantumkan alamatnya di Tjikini 71.

Beberapa kali alamat ***Tjikini 71*** muncul dalam iklan surat kabar kolonial Hindia-Belanda. Jauh sebelum hadirnya bangunan asrama, pernah dibuka jasa kursus akuntansi atau pembukuan yang diiklankan oleh perusahaan W.R. de Vries tahun 1916 menggunakan alamat kantor *Tjikini 71*, namun belakangan, perusahaan mengubah nomor alamatnya menjadi Tjikini 69 seiring bertambahnya gedung-gedung baru di

sekitarnya. *Tjikini 71* selanjutnya juga merujuk pada rumah seorang pendeta bernama **Ds. BOELMAN** yang diketahui dari iklan surat kabar tahun 1925. Sekitar 20 tahun berikutnya (17 Februari 1942), alamat *Tjikini 71* telah berubah menjadi **gedung kantor layanan pos delegasi** yang menunjang kantor pos Tjikini dalam layanan jasa rekening giro. Tidak lama kemudian, pendudukan Jepang pun berlangsung.

Jika memang bangunan asrama BAPERPI adalah milik seorang janda pensiunan van Rhijn, sebagaimana keterangan para anggota pemondok BAPERPI selaku saksi sejarah, serta dengan asumsi bahwa bangunan yang dimaksud adalah bangunan yang sama seperti alamatnya, maka kemungkinan besar rumah tersebut memang pernah disewakan kepada kantor pos Tjikini oleh keluarga van Rhijn.

Alamat Tjikini 71 juga pernah dimiliki oleh lebih dari satu bangunan. Rumah makan **restoran "Hawaii"** yang iklannya muncul di surat kabar sejak tahun 1946, dan toko atau *stationary "I'Art"* yang menjual berbagai barang produk olahan timah sepanjang 1946-1957 sama-sama menggunakan nomor alamat Tjikini 71. Dengan demikian, diketahui sepanjang waktu bahwa satu alamat Tjikini 71 tersambung dengan beragam macam jenis bangunan -kantor akuntansi, kantor pos, rumah pribadi, asrama BAPERPI, restoran, hingga toko perlengkapan- membuat jejak Asrama BAPERPI semakin kompleks untuk ditelusuri.

Pascaperalihan fungsi eks-asrama BAPERPI, tidak lagi diketahui kapan bangunan itu terakhir bertahan sampai benar-benar hilang dari tapak lokasi. Menurut keterangan arkeolog senior Candrian Attahiyat, gedung eks-asrama BAPERPI dihancurkan sekitar tahun 1970-an, dan ketika ia berkunjung tahun 1987, bangunan tersebut telah raib. Setelah 45 tahun berselang, para alumni BAPERPI beberapa kali mengadakan reuni. Reuni pertama berlangsung di Gedung Kebangkitan Nasional pada tanggal 1 Juli 1979, dan reuni kedua diadakan enam tahun setelahnya, tepatnya 29 Desember 1985 dan bertempat di Gedung Joang Menteng 31. Belakangan waktu, mereka juga mendirikan Yayasan Tjikini 71 dengan akte Notaris tertanggal 3 April 1986 No. 10 A.

Di kalangan anggota senior BAPERPI yang masih hidup, pernah ada usulan untuk memugar dan merekonstruksi kembali eks-ropo/asrama Tjikini 71 ketika mereka

mengadakan reuni sesama pemondok tahun 1979, 1985, dan 1989, akan tetapi gagasan tersebut tetap belum terwujud sampai hari ini. Saat itu mereka juga pernah mengupayakan agar eks-asrama tersebut dinyatakan sebagai bangunan bersejarah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jakarta No. GB/11/412/82 tentang Penetapan Bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah DKI Jakarta, namun ketiadaan struktur bangunan bersejarah itu hanya tinggal menyisakan cerita saja.

Kondisi Asrama BAPERPI kini tak menampilkan bekas-bangunan historis, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola bangunan di Jalan Tjikini 71, diperkirakan sekitar tahun 70-an bangunan berawal berubah fungsi dan kini menjadi area usaha travel dan usaha kontrakan komersial.



Gambar 5.15. Kondisi Area Asrama BAPERPI terakhir.
Sumber: koleksi Andi Sopandi (2022)

Pengkajian Data “Kawasan Menteng Jilid 2”;
Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan



Gambar 5.16 Kondisi Area Bekas-Asrama BAPERPI saat ini (2022)



Gambar 5.17 Pемancangan spanduk di tanah bekas asrama Tjikini 71. Dalam foto, atas: Siegfried, ..., Subagio (*Bubuk*), ..., Kusnandar; bawah: Subagio (*Bubuk*), Kusnandar. Sumber: *BAPERPI* (1990)

PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

- SATU TONGGAK DALAM JALANNYA SEJARAH
- PANGKAL SEMUA PERISTIWA
- AWAL BERBAGAI DINAMIKA
- MENGGEMA JAUH DALAM BENTANGAN JAMAN
- MASYARAKAT ADIL MAKMUR TUMPUAN HARAPAN

**NAMA-NAMA MAHASISWA YANG PERNAH MENJADI PENGHUNI
ASRAMA BADAN PERWAKILAN PELAJAR-PELAJAR INDONESIA
(BAPERPI) DI CIKINI RAYA NO. 71
JAKARTA RAYA**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Talibul Arifin | 30. Mr. Sumarno (Klaten) |
| 2. Dr. M. Darwis | 31. Mr. Soemarman |
| 3. Dr. Nuzmir | 32. Mr. Soebagio Reksodipuro |
| 4. Dr. Hasan Tan | 33. Soebadio Sastrosatomo |
| 5. Hamonangan Harahap | 34. Soedarpo Sastrosatomo |
| 6. Dr. Gono Parsambilangan Pane | 35. Mr. Soesanto Djojosingito |
| 7. Ginagan Tagor | 36. Prof. Dr. Soehadji Hadibroto |
| 8. Soepardjan | 37. Nusjirwan Adil Hamzah |
| 9. Gatot Karsono | 38. Illahude |
| 10. Dr. Soedjati | 39. Dr. Soebroto |
| 11. Dr. Moh. Thahir | 40. Dr. Alimurti |
| 12. Dr. Moh. Ali Kas | 41. Koesnandar |
| 13. Dr. Sajoko Sastrokarono | 42. Amin Katamsi |
| 14. Mr. Soemarno P. Wirjanto (Solo) | 43. Dr. Soeroso |
| 15. Dr. T.M. Jusuf | 44. Mr. Waldemar Tambunan |
| 16. Dr. T. Karimuddin | 45. Setiadi |
| 17. Dr. Oetojo | 46. Dr. Soepono |
| 18. Muharto | 47. Wiratmo |
| 19. Mr. Burhanudin Harahap | 48. Prof. Dr. Soebiono |
| 20. Dr. Soemantri | 49. Mr. Soerodjo |
| 21. Dr. Soetikno | 50. Dr. Abdullah |
| 22. Arifin Andanasasmita | 51. B.M. Soemono |
| 23. Soedarko | 52. Bena Sitepu Pandebesri |
| 24. Soejudno | 53. Soerjaningrat |
| 25. Mr. Kadarusman | 54. Soejono Hadipranoto |
| 26. Drs. Soemardjo | 55. Dr. M. Tilam |
| 27. Dr. Samsunarjo | 56. Soepairin (pembantu Mas Sarwono
Jenderal, pegawai CBZ.) |
| 28. Mohammad | 57. Prof. Dr. Koestedjo |
| 29. Soenarjo (Mr. Sioe) | 58. Dr. Soehardi Poeng |

Gambar 5.18. Daftar penghuni asrama BAPERPI Tjikini 71. Sumber: *BAPERPI* (1990)

No. KTA :
N. R. I. :

**DIRGAHAYU
PANGKAWINDU
PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I**

"ANGKATAN 45"
DEWAN HARIAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

TANDA PENGHARGAAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA.

Berkenaan dengan Pangkajene Winoto HUT Proklamasi 17 Agustus 1985 jatuh bersamaan babak akhir perampungan tugas historis Angkatan 45 dengan pengabdian tanpa mengenal purna bakti dalam merebut dan mengisi kemerdekaan serta tugas pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 1945, DHD ANGGKATAN 45 DKI Jakarta selaku Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 bersama ini menyampaikan secara khidmat kepada :

Nama *Asrama Baperpi*
Umur
Alamat *Jl. Cikini Raya 72/71*

Tanda Penghargaan dalam rangka pengabdian yang tulus dan ikhlas bagia cita-cita Angkatan 45.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi para Pejoang.
Sekali Merdeka Tetap Merdeka!

Jakarta, 17 Agustus 1985
DHD. ANGGKATAN 45 DKI-JAKARTA
Sekretaris Umum.

[Signature]
(SOETOP)

PIAGAM KEMERDEKAAN
DEWAN HARIAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

GEDUNG JOANG 45, MENTENG RAYA 31, Telp. 375187 & 375405, JAKARTA PUSAT

Gambar 5.19. Tanda penghargaan bagi Asrama BAPERPI sebagai bagian dari Angkatan '45'.
Sumber: BAPERPI (1990)

SALINAN DARI SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 039/TK/TAHUN 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja** : Surat Ketua M.P.R.S. tertanggal 18 Desember 1969 jang telah diteliti oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan R.I. seperti tersebut dalam suratnja NO. S/OL 1/BDXX/1/70 tanggal 18 Djuni 1970, tentang usul penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dan suatu Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Kelas III kepada Sdr. SUPENO (alm.), Menteri Negara Urusan Pembangunan dan Pemuda R.I. tahun 1949.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menghargai djasa luar biasa jang telah disumbangkan Sdr. SUPENO Menteri Negara Urusan Pembangunan dan Pemuda R.I. tahun 1949 sehingga meninggal dunia dalam mendjalankan tugas Negara perlu menganugerahkan suatu Gelar dan suatu Tanda Kehormatan jang sesuai dengan djasa-djasanya.
2. Bahwa demikian itu dianggap perlu untuk menjadi teladan bagi setiap Warga Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 111).
3. Undang-undang No. 6 Drt. tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 46).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menganugerahkan kepada Almarhum Sdr. SUPENO, Menteri Negara Urusan Pembangunan dan Pemuda Republik Indonesia tahun 1949 dalam Kabinet Presidentil II, suatu Gelar "PAHLAWAN NASIONAL" dan suatu Tanda Kehormatan "BINTANG MAHAPUTRA KELAS III", setjara anumerita sebagai penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanannja serta atas keberanian dan ketebalan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewadajiban dalam pelaksanaan tugasnja jang telah disumbangkan terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.
Dengan ketentuan, bahwa:
Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : 13 Djuli 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan aslinja
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
Pds. Kepala Biro II,

t.t.d. Tjap.
S U B A G Y O S H.
Major Laut NRP. 2159/P

t.t.d.
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Disalin oleh Ketua
Yayasan Cikini 71

(S. Hadipranoto)

Gambar 5.20. Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Supeno, salah satu penghuni asrama BAPERPI Tjikini 71. Sumber: BAPERPI (1990)

BOEKHOUDEN.
Opleiding voor examens ook schriftelijk.
Privaatlessen f 3.— per lesuur, 2 lesuren
per week, f 20.— per maand. Voor club-
lessen zeer verminderde prijzen. 11174
W. R. DE VRIES, Tjikini 71,
Tel. No. 1999, Weltevreden.

BOEKHOUDEN.
Opleiding voor examens ook schriftelijk.
Privaatlessen f 3.— per lesuur, 2 lesuren
per week, f 20.— per maand. Voor club-
lessen zeer verminderde prijzen. 11174
W. R. DE VRIES, Tjikini 71,
Tel. No. 1999, Weltevreden.

BOEKHOUDEN.
Opleiding voor examens ook schriftelijk.
Privaatlessen f 3.— per lesuur, 2 lesuren
per week, f 20.— per maand. Voor club-
lessen zeer verminderde prijzen. 11174
W. R. DE VRIES, Tjikini 71,
Tel. No. 1999, Weltevreden.

Gambar 5.21. "Iklan kursus akuntansi. Pelatihan untuk ujian tertulis. Pelajaran privat f 3.— per pelajaran, 2 pelajaran per minggu, f 20.— per bulan. Potongan harga untuk pelajaran klub. W. R. DE VRIES, Tjikini 71, Telp. No. 1999, Weltevreden." Sumber: *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* 5, 7, 9 September 1916.

Tehuis in Holland
Jong Echtpaar met 1 kindje, waar-
van de vrouw in 't bezit der Hoofd-
acte, begin Juni a s. repatrieerende,
is genegen kinderen mede te nemen
en hun in Holland een prettig te-
huis met toezicht op studie te ver-
schaffen. Brieven onder No. 2442
aan Aneta, Weltevreden.
Informaties in te winnen bij
Mr. Meyroos, burgemeester van
Batavia, Ds. Boelman, **Tjikini 71,**
Weltevreden, J. Tideman, resident
van Menado, Hr. Wilmink, Inspec-
teur I. O. Tomohon. 17976

"Tehuis in Holland," *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* 31-10-1925.



"Tehuis in Holland," *De locomotief* 2 November 1925.



"Tehuis in Holland," *Deli courant*, 4 November 1925.

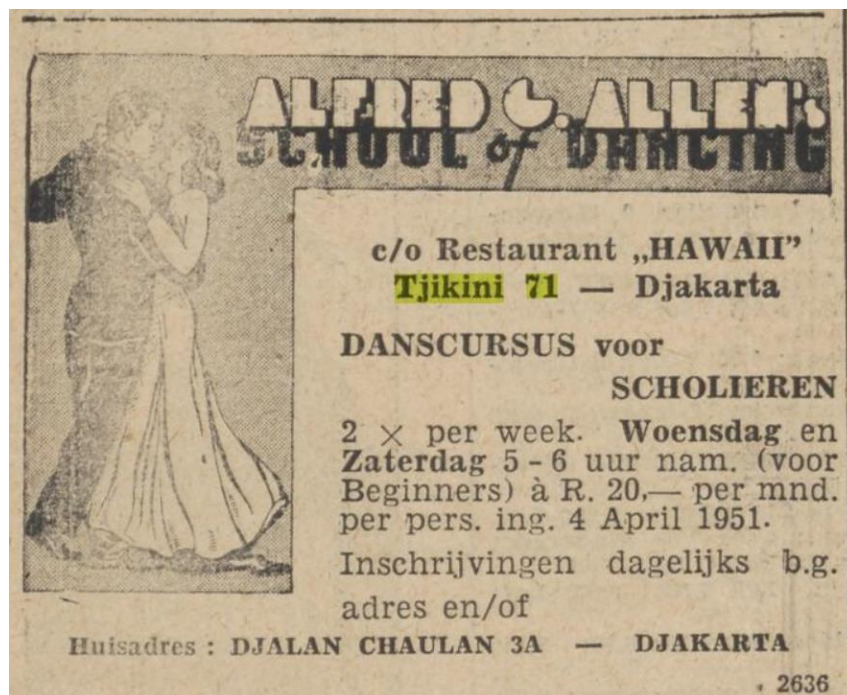
Gambar 13. "Rumah di Belanda. Pasangan muda 1 anak, istrinya adalah pemilik tindakan utama, yang akan dipulangkan awal Juni, bersedia membawa serta anak-anak mereka dan memberi mereka rumah nyaman di Belanda dengan pengawasan studi mereka. Surat di bawah no. 2442 kepada Aneta' Weltevreden.. Informasi dapat diperoleh dari Tn. Meyroos, walikota Batavia, Pdt. Boelman, Tjikini 71, Weltevreddn, J. Tideman, penduduk Menado, Hr. Wilmink, Inspektur I. O. Tomohon."



Gambar 5.22. "KANTOR POS TJKINI. Pelayanan rekening koran (giro) serta penanganan delegasi oleh kantor pos utama Bataviacentrum akan dilakukan mulai 18 Februari di gedung baru di Tjikini 71, yang telah digunakan oleh layanan pos." Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad* 17 Februari 1942.



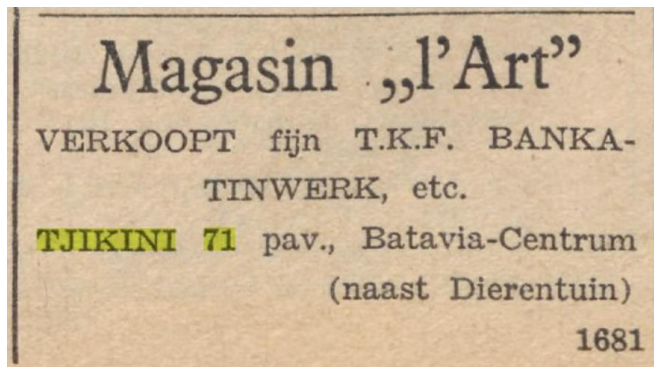
Gambar 5.23 Restoran "Hawaii". Lokasi indah-Makanan lezat-Layanan sopan. Tjikini 71 Batavia-Tengah (sebelah Kebun Binatang). Sumber: *Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 11 Juli 1946.*



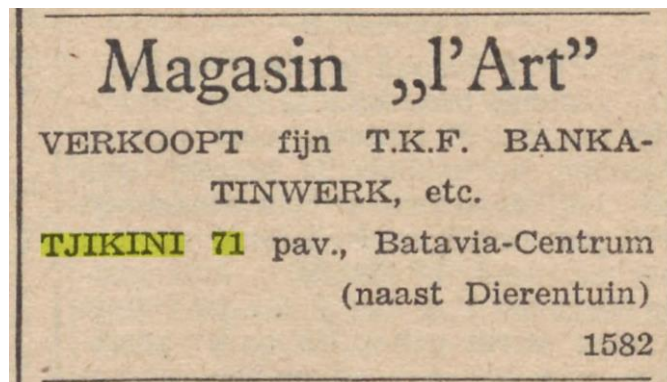
Gambar 5.24. Iklan sekolah dansa di Restoran Hawaii Tjikini 71.
Sumber: *De nieuwsgier*, 31 Maret 1951



Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 13 Juli 1946



Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 12 Juli 1946



Gambar 5.25 "Magasin "l'Art" verkoopt fijn T.K.F. BANKATINWERK, etc. Tjikini 71 paviliun, Batavia-Centrum (naast Dierentuin). Majalah "l'Art" menjual T.K.F. BANKATINWERK, dll. Paviliun Tjikini 71, Batavia (sebelah Kebun Binatang)." Sumber: *Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia*, 9 Juli 1946.

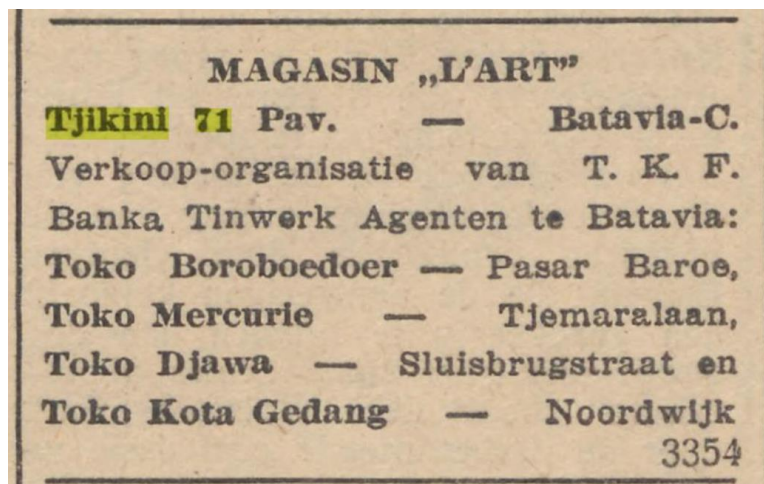


Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 17-07-1946.

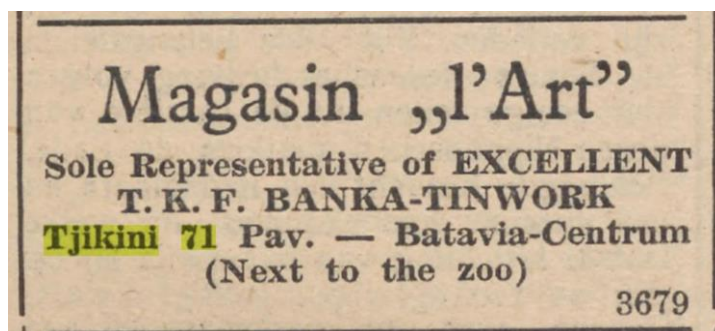


Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 20-07-1946

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 19-08-1946



Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 09-08-1946



Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 14-08-1946



Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 02-10-1946



Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 26-08-1947



Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 10 April, 12 April, 29 April, 28 Mei, 04 Juli, 18 Juli 1947



Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
25 Juli 1957

2. Asrama Prapattan 10

2.1 Perkembangan Asrama Parapattan 10

2.1.1. Sejarah Parapattan 10

Pelayanan kesehatan masyarakat umum dalam sejarah kolonialisme Eropa-Belanda di Hindia-Belanda baru hadir setidaknya pada awal abad ke-19 melalui pembentukan layanan kesehatan militer (*Militair-Geneskundige Dienst*, atau MGD), layanan kesehatan sipil (*Burgerlijke Geneskundige Dienst*, atau BGD), dan layanan khusus vaksinasi di bawah *Vaccinatiedienst*.

Akan tetapi, pembentukan tiga lembaga tersebut belum sepenuhnya didukung jumlah dokter sipil yang memadai di Hindia-Belanda, sehingga pelayanan kesehatan penduduk belum cukup terpenuhi. Hal itu berlangsung sampai didirikannya institusi pendidikan sekolah Dokter Djawa dan STOVIA (1913) hingga menjadi sekolah tinggi atau fakultas kedokteran *Geneskundige Hoogeschool* (1927) yang terus melahirkan banyak mantri dan dokter yang berpraktik di Batavia dan Jawa.

Burgerlijke Geneskundige Dienst (BGD) yang melayani kesehatan sipil secara resmi terbentuk sebagai departemen baru pada tahun 1911. Pada awalnya, BGD memiliki kantor pusat di Gunung Sahari dengan Dr. W.T. Vogel menjabat sebagai pengawas sepanjang tahun 1913-1921. Kantor pusat ini berfungsi sebagai pusat administrasi kesehatan, pusat statistika angka tingkat kelahiran dan kematian penduduk akibat penyakit, dan fasilitas laboratorium pendukung.

Laboratorium utama di Batavia sendiri berdiri sejak 1887 dan dikembangkan tahun 1932-1933 yang kelak dinamai sebagai “Eyckman Institute”, mengacu pada sosok ahli bakteriologi dan higiene terkenal Christiaan Eyckman yang memenangi Hadiah Nobel dan pernah bekerja di sana tahun-tahun awal laboratorium berdiri.



Gambar 5.26. Kantor lama BGD di Gunung Sahari (1921). Judul asli: *Het oude hoofdbureau van de Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Goenoengsari in Batavia* 1921. Sumber: KITLV A1350, shelfmark KITLV 68956



Gambar 5.27. Kantor lama BGD di Gunung Sahari (1920-1921). Judul asli: *Het Hoofdbureau van de Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Parapatan [Gunung Sahari?] in Batavia*, Kantor Pusat Dinas Kesehatan di Jl Prapatan, Batavia, 1920-1921. Sumber: Bintoro Hoepoedio

Tugas utama dinas BGD di masa awal lebih banyak berfokus menangani masalah wabah menular seperti epidemi kolera, pes, cacar, difteri, hingga tifus yang

diderita penduduk Jawa, serta layanan pengendalian hama dan karantina kesehatan Hindia-Belanda. Hal itu berlanjut sampai tahun 1920, ketika muncul penekanan terhadap prinsip kesehatan berbasis kebersihan (*higiene*) dalam kampanye kesehatan masyarakat. Hal ini berdampak pada berubahnya nama dan tugas dinas *Burgerlijke Geneeskundige Dienst* (BGD) menjadi ***Dienst der Volksgezondheid (DVG)***, atau “Dinas Kesehatan Publik”.

Seiring perubahan administratif itu, kantor pusat eks-BGD pun dipindahkan dari Gunung Sahari ke Jalan Parapattan Nomor 10. Fungsi kantor pusat masih sama, Penyakit umum yang selanjutnya diperangi DVG adalah malaria, gangguan gastro-intestinal, khususnya tifus abdominalis, disentri basiler dan amuba, demam tifoid, demam paratifoid, tuberkulosis, avitaminosis, beri-beri, infeksi cacing tambang, trakoma dan penyakit kelamin.

DVG juga mendirikan biro pengendalian malaria pusat tahun 1924, serta mendorong program sehat seperti vaksinasi dan serum, perbaikan perumahan penduduk, pemasangan pipa air minum dan pembuangan tinja. Selanjutnya, didirikan Departemen Propaganda Medis yang berfokus kampanye kesehatan dan higienitas masyarakat melalui poster, pemutaran film dan kunjungan rumah. Perhatian juga diberikan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan perjuangan melawan kusta.

Layanan DVG mulai mengalami kemunduran serius akibat depresi ekonomi tahun 1930-an. Tidak banyak pengembangan lebih lanjut dan beberapa program dikurangi. Kiprah DVG disebut sebagai lembaga percontohan bagi kolonialisme Eropa-Belanda dalam sejarah pelayanan kesehatan di daerah tropis. Misi ini kemudian diestafet dengan pendirian sekolah atau fakultas kedokteran *Ika Dai Gaku* ketika berlangsungnya pendudukan tentara Jepang di Jawa dan Hindia-Belanda tahun 1942.



Gambar 5.28 KITLV A1350 – Kantor utama *Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Parapattean in Batavia* circa 1920-1921. Waktu itu belum berganti nama, tetapi sudah pindah kantor. *Titelpagina fotoalbum*: "Aan Dr. W. Th. de Vogel bij zijn vertrek naar Nederland op 2 November 1921 aangeboden door het Personeel van het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst." Sumber: KITLV shelfmark 68957

Layout awal halaman depan gedung Parapattan 10 terdiri dari pepohonan kelapa rimbun, membentuk akses jalur masuk yang mengarah secara langsung ke bangunan. Ketika dr. W. Th. De Vogel beranjak dari kantor ini dan meninggalkan Batavia tahun 1920-1921, papan nama *Dienst der Volksgezondheid* (DVG) belum terpasang di parapet gedung. Kala itu gedung baru dipakai sebagai kantor atau dalam proses perpindahan dari kantor sebelumnya di Gunung Sahari. Fasadnya bersih, dengan atap perisai bangunan di sisi belakang terlihat jelas. Atap kanopi menggunakan material seng (*zinc*) bergelombang, dengan profil *list plank* gigi balang. Teras depan diisi dengan kursi-kursi dan meja untuk ruang pertemuan informal bersantai.

Sejarah gedung Parapattan 10 tidak terlepas dari wabah penyakit Pes yang melanda Jawa Timur, pada 1910-1916 dan pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. di gedung ini lah pernah berkantor Dinas Kesehatan Sipil dan Lembaga Layanan

Kesehatan Publik. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini kemudian menjadi asrama pemuda yang menjadi mahasiswa Sekolah Pendidikan Kedokteran dan Sekolah Farmasi, Ika Daigaku dan Yakugaku. Pemuda-pemuda ini tidak hanya sekolah, tapi juga ikut dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Akibat wabah Pes yang melanda Jawa Timur, pemerintah Hindia Belanda memisahkan pelayanan kesehatan sipil dan pelayanan kesehatan militer. Terbentuklah Dinas Kesehatan Sipil atau *Burgerlijke Geneeskundige Dienst* (BGD), terpisah dari *Militaire Geneeskundigen Dienst* (MGD), pada 1911. BGD berkantor di Gunung Sahari, dan kemudian pindah ke Parapattan no. 10.

Awal mulanya Endemi Pes adalah keputusan pemerintah Kolonial Belanda untuk mengimpor beras dari Burma atau Myanmar, pada akhir 1910. Keputusan ini untuk menjaga ketahanan pangan selama Bulan Ramadhan. Beras impor itu ternyata mengandung bakteri pes yang berasal dari tikus-tikus. Bakteri Pes berkembang biak dengan cepat di tubuh manusia. Dalam waktu cepat ditemukan kasus Pes pertama kali di Turen, Malang, pada November 1910 (Syefri Luwis: "Epidemi Penyakit Pes Di Malang 1911 - 1916", Desember 2008:2). Pada kasus pertama kali ini, sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat penyakit Pes (Cha cha, 2020). Setelah itu wabah menjadi tidak terkendali. Wabah menyebar cepat ke Surabaya, Madura, Pasuruan, Kediri, Madiun, Tulungagung, Probolinggo, dan daerah lainnya.

Pemerintah Hindia Belanda, melalui Dinas kesehatan Sipil (BGD) mengatasi wabah Pes di Jawa Timur dengan sistem desentralisasi dan peran satuan tugas di bawahnya, seperti *Dienst der Pesbestrijding* atau Dinas Pemberantasan Pes di Malang, Kediri, dan daerah lain. Dinas Pemberantasan Pes bertugas mencegah, mengobati, dan memberantas Penyakit Pes.



Gambar 5.29 KITLV A1350 - *Het personeel van het Hoofdbureau van de Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Batavia in 1921, onder wie (vooraan in het midden met snor) W.Th. de Vogel.* Sumber: KITLV 68925



Gambar 5.30. KITLV A1045 - *Medewerkers voor het hoofdkantoor van Dienst van Volksgezondheid te Batavia circa 1924-1925.* Sumber: KITLV 116904

Burgerlijke Geneeskundigen Dienst (BGD) sebagai lembaga yang bertanggungjawab pada kesehatan masyarakat sipil harus mengambil peran. Peran

tersebut melalui pengambilan kebijakan-kebijakan seperti penelitian dan pengobatan, karantina/isolasi, vaksinasi dan desinfeksi dan penerbitan lembaga otonom, hal ini dilakukan sebagai wujud peran *Burgerlijke Geneeskundigen Dienst* (BGD) dalam menangani epidemi pes di Jawa Timur pada tahun 1910-1916 yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung (Fatwatun Nurlaili: 2021:1)

Untuk mencegah penyebaran wabah Pes, pemerintah juga melakukan karantina sesuai dengan *Staatsblad* 1911 No. 277 pada pasal 1 ayat 1 (Fatwatun Nurlaili, 2021:7). Dalam pasal itu disebutkan bahwa karantina berlaku untuk beberapa penyakit, termasuk Pes. *Staatsblad* ini juga mengatur ketentuan siapa saja harus dikarantina di pelabuhan, tentang biaya, penanganan dokter-dokter terhadap, laporan petugas-petugas kesehatan tentang karantina, dan hukuman untuk mereka yang menolak atau tidak mengikuti aturan karantina (gambar 6).



Gambar 5.31. Militer ikut menjaga karantina wilayah ketika terjadi pandemi Pes di Malang, 1911-1916. Foto: Topenmuseum.

Pencegahan penyebaran di darat dilakukan berdasarkan *Staatsblad* 1911 No. 299 yang anatar lain mengatur isolasi suatu daerah. Isolasi dilakukan antara lain di *afdeeling* seperti Malang, Pasuruan, Kediri, dan Tulung Agung. Di Malang, barak-barak dibangun untuk memisahkan penderita Pes dengan yang tidak. Begitu juga di Kediri, isolasi dilakukan dengan cara menempatkan penderita pes pada barak tersendiri (gambar 5.32).



Gambar 5.32 Pembangunan barak-barak untuk mengkarantina penderita penyakit Pes (Foto: Tropenmuseum).

Dari laporan yang disampaikan oleh BGD dalam *Mededeelingen van den Burgerlijke Geneeskundigen Dienst* (MBGD) ini pula diketahui bahwa puncak epidemi pes di Jawa Timur terjadi pada rentang tahun 1914-1916, yang mana kasus-kasus epidemi pes mengalami kenaikan yang cukup signifikan begitu pun dengan jumlah kematian di tiap-tiap daerah di Jawa Timur yang dilalui oleh epidemi pes ini (Fatwatun Nurlaili: 2021:5).

Upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam menanggulangi epidemi pes di Jawa Timur adalah melalui vaksinasi dan desinfeksi. Vaksinasi merupakan sebuah upaya pemberian vaksin melalui suntikan atau tetesan ke mulut, yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan antibodi terhadap suatu penyakit. Sementara deinfeksi merupakan upaya untuk menghilangkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada permukaan benda-benda mati non biologis seperti lantai, dinding atau pakaian.

Desinfeksi yang dilakukan adalah sulfurisasi, seperti yang diusulkan oleh Dr. P. C. Flu dari Laboratorium Kesehatan Weltevreden. Ia mengklaim bahwa desinfeksi dengan sulfur ini dapat membuat rumah terbebas dari bakteri pes secara efektif. Sulfurisasi ini tidak memberikan hasil yang optimal, karena selama tahun 1915-1916 korban yang berjatuhan justru bertambah. Hal ini dikarenakan sulfurisasi ini hanya bersifat pembersihan sementara (Fatwatun Nurlaili: 2021:8)

Penanganan Wabah Pes mulai menunjukkan hasilnya. pada 1916, wabah mulai mereda. Pemerintah kemudian memberikan tugas lain kepada BGD, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat. Karena itu dibentuklah Layanan Kesehatan Publik atau Diensi der Volksgezondheid (DVG) menggantikan BGD. DVG gencar melakukan kampanye kesehatan untuk memberantas penyakit-penyakit yang melanda masyarakat. Pelayanan kesehatan preventif lebih ditekankan dari pada pelayanan kuratif (gambar 5.33).



Gambar 5.34: Kampanye kesehatan ke rumah-rumah masyarakat oleh *Dienst der Volksgezondheid* (DVG). Foto: Tropenmuseum

Untuk menjalankan tugasnya, DVG kemudian mendatangkan dokter ahli kesehatan pertama di Amerika, yaitu J.L. Hydrick, dengan dibiayai Rockefeller Foundation. Hydrick membuat proyek sanitasi di Purwokerto atau Banyumas. Program ini dikenal sebagai *Medisch Hygienische Propaganda* atau *Propaganda Kebersihan Kesehatan*. Keberhasilan program ini juga tidak lepas dari bantuan dokter pribumi, tokoh pribumi, dan para siswa (gambar 5.35).

Pada tahun 1936, DVG tercatat mempekerjakan 177 dokter Eropa, 316 dokter Djawa (Jawa) dan 17 dari Cina. Selain itu tercatat ada 150 perawat Eropa, 1.210 perawat pribumi, ditambah 150 bidan. Selain itu juga disebut ada 30 mantri malaria, 435 petugas vaksinasi, dan 415 petugas pengendalian hama. **Dokter Djawa** merupakan sebuah gelar akademis untuk siswa yang lulus pendidikan kedokteran.



Gambar 5.35: Sisi samping Kantor *Dienst der Volksgezondheid* (DVG) Batavia circa 1935. Judul lain: *Hoofdkantoor DVG Parapattan 10; A wing of the head office of the 'Dienst der Volksgezondheid' (Public Health Service)*. Sumber: Tropenmuseum TM-60032903

2.1.2. Pusat Pendidikan Kedokteran

Gelar Dokter Djawa diberikan pada lulusan Sekolah Pendidikan Kedokteran di Weltevreden yang dibuka sejak 1851. Lulusan sekolah tersebut digelari Dokter Djawa lewat Surat Keputusan Gubernur tanggal 5 Juni 1853 No.10. Pemerintah Hindia Belanda pertama kali mendirikan pendidikan kedokteran melalui Keputusan Gubernur No. 22 di Batavia pada 2 Januari 1849. Pendidikan kedokteran di Rumah Sakit Militer ini menjadi awal pendidikan kedokteran di Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda pertama kali mendirikan pendidikan kedokteran melalui Keputusan Gubernur No. 22 di Batavia, pada 2 Januari 1849. Pemerintah akan mendidik 30 pemuda Jawa dari keluarga baik-baik serta pandai menulis dan berbahasa Melayu dan Jawa. Mereka akan menjadi dokter pribumi dan "vaccinateur" atau mantri cacar (Direktorat Jendral Kebudayaan: Dari Sekolah Dokter Jawa ke

STOVIA). Pendidikan kedokteran yang dilaksanakan di Rumah Sakit Militer ini menjadi awal dari pendidikan kedokteran di Indonesia

Meskipun bergelar dokter, Dokter Djawa hanya diberi wewenang sebagai Mantri Cacar. Sepuluh tahun lebih, 1864, baru masa pendidikan diubah menjadi tiga tahun dan para lulusan dapat menjadi dokter mandiri, namun masih dalam pengawasan dokter Belanda. Pada tahun 1898 berdiri sekolah pendidikan kedokteran ***School tot Opleiding voor Indische Artsen*** (STOVIA). Lulusan STOVIA disebut ***Inlandse Arts***. STOVIA menempati gedung barunya di Hospitaalweg (sekarang Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh), pada 1 Maret 1902. sekaligus mengubah masa pendidikan dari tujuh tahun menjadi sembilan tahun. (gambar 10)



Gambar 5.36: Direktur STOVIA, Dr. H. F. Roll dengan para mahasiswa di ruang pendidikan anatomi, 1902. KITLV

Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswanya, pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan Rumah Sakit Sipil Pusat atau *Centrale Burgerlijke Ziekenhuis* (CBZ), pada akhir tahun 1919 (gambar 11) . Rumah sakit ini digunakan sebagai rumah sakit pendidikan mahasiswa STOVIA. Sekarang ini CBZ menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).



Gambar 5.37: Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, sekarang RSCM.
Foto: Koleksi Tropenmuseum

Para mahasiswa STOVIA meninggalkan kampus lamanya di Hospitaalweg untuk menempati kampus barunya, di sebelah Rumah Sakit Sipil Pusat (CBZ), pada 5 Juli 1920. Pendidikan kedokteran resmi menjadi pendidikan tinggi kedokteran dengan nama ***Geneeskundige Hooge School*** (GHS), pada 1927. Sejak itu pendidikan paling rendah untuk pendidikan tinggi kedokteran adalah setingkat SMA atau pada masa itu disebut sebagai Algemene Middelbare School (AMS) dan Hogere Burger School (HBS).

Pada Masa Pendudukan Jepang tahun 1945. Pemerintah Jepang membuat pendidikan tinggi kedokteran tidak jelas. Sebagaimana mahasiswa menerima Jepang, sementara sebagian lagi menentang kedatangan negara dari Asia Timur itu. Namun, para mahasiswa tetap bersatu untuk kelangsungan pendidikan kedokteran. Soejono Martosewojo, seorang mahasiswa sekolah kedokteran di Surabaya, *Nederlands Indische Artsenschool* (NIAS) mengusahakan sekolah kedokteran dapat berjalan kembali, setelah enam bulan terhenti. Ia dibantu Dr. Abdul Rasjid dan beberapa dosen

lainnya. Soejono mengusulkan penggabungan kurikulum GHS dan NIAS. Usul ini disetujui Kepala Kantor Kesehatan Pemerintah Militer Jepang, Prof. Ogira Eiseibucho (fk.ui.ac.id, sejarah FKUI). Untuk itu, dibuatlah sebuah komite untuk mengembangkan kurikulum baru dan mempromosikan staf pengajar sebagai dosen, asisten dosen, dan guru besar. Para mahasiswa kedokteran di Jakarta dan Surabaya juga membuat komite untuk menggabungkan eks-GHS dan eks-NIAS.

Pemerintah Jepang di Jakarta kemudian memprakasai pendidikan kedokteran di Jakarta. Maka berdirilah **Djakarta Ika Daigaku**, pada 29 April 1943. Prof. Utjama dan Prof. Tanaka bertanggung jawab terhadap perkuliahan dan Prof. Itagaki menjadi dekan Ika Daigaku. Sekolah kedokteran ini beroperasi sangat singkat, yaitu April 1942 sampai April 1945 dan meluluskan tiga Angkatan (Handoko Widagdo. Kiprak Dokter Nias – Djakarta Ika Daigaku: 2019)

Pada tahun 1943, terdapat instruksi untuk menggunduli rambut dan memakai topi pet, yang ditentang oleh mahasiswa dalam bulan Oktober 1943. Namun bulan Desember 1943 secara mendadak asisten-asisten Jepang sebelum kuliah dimulai secara paksa menggunduli sebagian mahasiswa, sehingga menimbulkan protes dan perlawanan. *Empat Serangkai* (Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kyai Mansyur) ikut turun tangan meredakan suasana.

Pertemuan empat tokoh dengan para mahasiswa diadakan di asrama Tjikini 71 dan sebagai juru bicara tampil Soedjatmoko dan Soedarpo. Setelah mendapat penjelasan dari keempat pemimpin Indonesia, sebagian besar mahasiswa dapat menerima dan secara beramai-ramai atas kemauan sendiri dilakukan upacara penggundulan bertempat di Asrama *Oranje Boulevard* (Gedung PAMS) (Ensiklopedia Jakarta, Ika Daigaku, Jakarta, 2018).

Selama mengikuti perkuliahan, para mahasiswa Ika Daigaku tinggal di asrama yang berada di Jalan Parapattan no. 10. Asrama ini kelak dikenal dalam sejarah pergerakan pemuda, terutama menjelang proklamasi kemerdekaan. Para pemuda dari asrama Parapattan 10, asrama Menteng 31, dan asrama Tjikini 71, mendesak Soekarno untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia secepatnya, karena

mereka mendengar Jepang sudah menyerah setelah di bom atom oleh Amerika Serikat.

2.1.3. Masa Pergerakan Kemerdekaan

Mahasiswa Sekolah Kedokteran Ika Daigaku tidak hanya sibuk belajar, tapi juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menetapkan ideologi yang dianut, yaitu *Reine Jugend Ideologie*, cita-cita Pemuda Murni. Dengan pengetahuan, ilmu, disiplin, dan *Reine Jugend Ideologie*, kelompok pemuda ini menjadi tangguh dalam memelopori dan membakar semangat perjuangan rakyat.

Bagi pemuda Parapattan 10, *Reine Jugend Ideologi* selaras dengan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Mereka yakin bahwa melalui persatuan bangsalah kemerdekaan Indonesia dapat dicapai. Keyakinan yang kemudian terbukti benar dan ampuh (Koesnadi Hardjasoemantri, 2007:2). Selama di asrama Parapattan 10, mereka dibekali ceramah-ceramah politik dan latihan fisik secara teratur oleh Pemerintahan Militer Jepang. Mereka belatih dalam hal kedisiplinan militer, kemahiran menggunakan senjata, dan memimpin pertempuran. Semua itu membuat beberapa mahasiswa asrama Parapattan 10 kemudian bergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) ketika terjadi perang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949.

Selain latihan militer, para pemuda Asrama Parapattan 10 juga menghadirkan para senior mereka yang aktif berjuang, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Sukarjo Wiryopranoto, Otto Iskandar Dinata, dan lainnya. Para senior memberikan pendidikan dan kursus politik melalui diskusi kepada para pemuda mahasiswa di asrama. Pertemuan yang sering terjadi antara pemuda mahasiswa dengan para seniornya membuat hubungan menjadi dekat. Para pemuda tak segan untuk membantah Bung Karno, seperti yang terjadi di Asrama Tjikini 71, saat Bung Karno menghimbau para mahasiswa menghentikan pemogokan yang dilakukan mereka. Tokoh mahasiswa, Sudarpo Sastrosatomo dan Sujatmoko menentangnya, meskipun keduanya bisa memahami sikap Bung Karno (Hendrajit, 2016).

Berita Jepang menyerah kepada sekutu di Kapal USS Missouri, pada 14 Agustus 1945, membuat para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamkan

kemerdekaan Indonesia secepatnya. Para pemuda, Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, Chaerul Saleh, mendengar melalui radio BBC bahwa Jepang akan mengembalikan kekuasaan mereka di Indonesia kepada sekutu. Desakan para pemuda ditolak, karena golongan tua tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Mereka mempersiapkan rapat PPKI untuk membahas kemerdekaan Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan, pada 16 Agustus 1945. Golongan muda menolak rencana rapat itu, karena PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang. mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha sendiri, bukan pemberian Jepang.

Sehari sebelum rapat PPKI, para pemuda menggelar rapat di salah satu ruangan di Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur, (sekarang menjadi Gedung Mikrobiologi UI), pada 15 Agustus 1945, jam 20.00 WIB. Rapat pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala ikatan dan janji kemerdekaan dari Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Chairul Saleh, dan pemuda yang hadir antara lain, Djohan Nur, Kusnandar, Subianto, Subadio, Margono, Wikana, dan Armansyah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: "Kami Ingin Segera Merdeka Bung!. 2020). Setelah rapat, Wikana dan Darwis diutus menghadapa Bung Karno untuk menyampaikan keputusan rapat pemuda. Hampir bersamaan dengan kedatangan Wikana dan Darwis, Bung Karno juga didatangi Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dr, Buntaran, dan Mr. Iwa Kusumasumantri untuk melaporkan persiapan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akan dilaksanakan, pada 16 Agustus 1945.

Pertemuan golongan muda dan tua ini menimbulkan perdebatan sengit dan tidak selesai. Perdebatan buntu, sehingga Wikana dan Darwis memutuskan kembali ke Asrama Tjikini 71. Di sana berkumpul pemuda asrama Parapatan 10, Menteng 31, dan Tjikini 71. Para pemuda menggelar rapat pada pukul 00.00, dipimpin oleh Sukarni dan dihadiri antara lain oleh Chairul Saleh, Djohan Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Armansyah, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, dan Shodanco Singgih.

Rapat tengah malam itu memutuskan untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota, yaitu ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Rengasdengklok dipilih karena termasuk daerah yang dikuasai PETA. Diputuskan bahwa Sukarni dan Yusuf Kunto menjemput Hatta. Sementara Chairul Saleh dan dr Muwardi menjemput Soekarno. Penculikan dilakukan, pada jam 04.00 (Vincentius, 14 Agustus 2020). Di Rengasdengklok, keduanya dibawa ke rumah Djiauw Kie Siong, seorang keturunan Tionghoa. (**Gambar 12**)



Gambar 5.38: Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok, saksi sejarah penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda, pada 16 Agustus 1945. Foto: Kompas

Di Rengasdengklok, para pemuda kembali mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamarikan kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta, salah satu golongan tua, Achmad Soebardjo, menemui Wikana setelah mengetahui peristiwa penculikan. Keduanya sepakat bahwa kemerdekaan harus segera dinyatakan di Jakarta. Setelah itu, Achmad Soebardjo bersama Sudiro dan Jusuf Kunto menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengasdengklok.

Kembali ke Jakarta, pada malam harinya, Bung Karno dan Bung Hatta menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda, sekarang di Jalan

Imam Bonjol (gambar 13). Pembuatan naskah proklamasi dilakukan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Achmad Soebardjo, dan disaksikan tokoh-tokoh muda Sukarni, B.M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, pukul 10.00, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur no.56 (gambar 14). Rumah Bung Karno kemudian dikenal sebagai Rumah Proklamasi, sayang Bung Karno kemudian memerintahkan pembongkaran rumah tersebut, pada 1960. Di lokasi tersebut dibangun Taman Proklamasi, dan nama jalan diubah menjadi Jalan Proklamasi.



Gambar 5.39: Rumah Laksamana Muda Maeda yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Foto: Mahanizar Djohan

Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran Adam Malik, yang mendapatkan teks naskah proklamasi. Ia kemudian mengutus Syahrudin untuk memberikan surat pendek berisi naskah proklamasi ke radio Hoso Kyoku, radio militer milik pemerintah kolonial Jepang, di Jakarta, untuk menemui Mohammad Yusuf Ronodipuro. Yusuf ditugaskan untuk menyebarkan luaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia luar melalui radio.

Tidak mudah, karena studio siaran di *Hoso Kyoku* tidak terhubung lagi dengan pemancarnya. Seorang teknisi berhasil memperbaiki sehingga, pada jam 19.00, Yusuf akhirnya dapat menyebar luaskan berita kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Berita yang disiarkan Yusuf ini kemudian ditangkap oleh radio Australia dan Amerika Serikat. Radio-radio asing ini kemudian memancarkan kembali berita kemerdekaan Indonesia. Kabar soal kemerdekaan Indonesia semakin meluas ke berbagai penjuru dunia (National Geographic Indonesia, 2018).



Gambar 5.40 Presiden Soekarno saat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Sumber: Antara/IPPHOS

Setelah menyebarkan berita itu, Yusuf dan kawan-kawan yang membantunya dihukum fisik dan disiksa oleh pemerintah militer Jepang. Yusuf dihukum paling berat, bahkan seorang perwira militer Jepang sempat mengeluarkan *Katana* untuk memenggalnya. Namun, pemenggalan itu dapat dicegah oleh Letkol Tomo Bachi, pimpinan radio *Hako Kyoku* saat itu.

2.1.4. Asrama Parapattan 10: Wadah Gerakan Pemuda

Sejarah mencatat peran pemuda-pemuda, yang menghuni asrama Parapattan 10, asrama Menteng 31, dan Tjikini 71, dalam proses kemerdekaan Indonesia. Merekalah yang mendesak golongan tua, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, untuk secepat menyatakan Inonesia merdeka dan menolak kemerdekaan sebagai pemberian pemerintah Jepang. Indonesia harus merdeka karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Beberapa kali tercatat, pada 15 Agustus dan 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat untuk mendesak golongan tua melupakan janji Jepang dan segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, pada rapat terakhir di Asrama Tjikini 71, mereka memutuskan untuk mengamankan Soekarno Hatta ke Rengasdengklok. Langkah ini untuk memuluskan desakan mereka ke golongan tua. Aksi pemuda membuahkan hasil dan akhirnya Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada 10.00, 17 Agustus 1945.

2.2 Tinjauan Rancangan Arsitektur Parapattan 10 dan Keletakan Gedung

Hadirnya berbagai kampanye dan promosi tentang gaya hidup sehat di daerah tropis berdampak pada program perbaikan lingkungan binaan untuk mencegah penyakit. Hal ini turut tercermin dalam rancangan bangunan kantor dinas DVG sendiri, yang berupaya memenuhi kaidah-kaidah bangunan yang sehat pada jamannya.

Komposisi antara elemen bangunan modern kolonial Eropa di sisi depan dan elemen bangunan tropis di sisi belakang merupakan rancangan yang lazim ditemukan pada bangunan kolonial zaman normal (late-modern colonial) yang menerapkan gaya arsitektur Indis Baru sepanjang awal abad ke-20. Sisi depan hanya menampilkan wajah atau fasad mencakup teras depan yang diapit dua kamar samping, sedangkan sisi interior yang memuat sebagian besar volume bangunan telah berjiwa Indis.

Bangunan sisi depan asrama Parapattan 10 tampak modernis dan simpel. Temboknya bercat putih, sedangkan elemen arsitektural lainnya yang terlihat seperti atap kanopi, konsol, kusen pintu dan jendela, hingga tiang-tiang baja bercat hijau.

Atap bangunan berbentuk datar, memuat susunan entablature yang terdiri atas lapisan *architrave*, *frieze*, *cornice* eksterior, hingga parapet. Di atas parapet, terpasang tipografi "PARAPATTAN 10" berbahan aluminium.

Dulu, nama bangunan cukup tertera pada papan yang dipasang di bagian entablature ini (Gambar X). Di masing-masing sudut kamar samping teras depan, terdapat tiang-tiang pilaster dengan kapital dan pedestal yang mencuat di tembok. Atap kanopi dengan list plank gigi balang. Jendela krapyak di masing-masing kamar samping beratap teritisan yang disangga dua konsol besi.

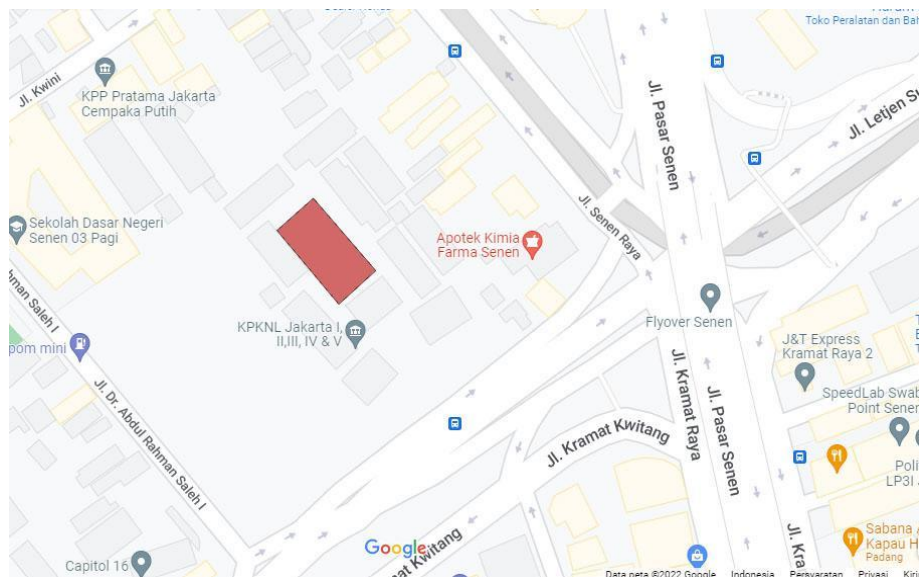
Tiang-tiang baja menopang balok, sekur konsol dekoratif. Di bagian base setiap tiang ini, terdapat tanda merk dagang "Taylor & Lawson Batavia", yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pada zaman kolonial akhir. Pada awalnya, ada total enam pintu di teras depan, empat pintu dan satu pintu di masing-masing kamar samping. Akan tetapi, dua pintu tengah belakang dibobok (berikut tembok di antaranya) untuk dibuatkan pintu kaca yang lebar.

Tampak luar bangunan asrama kini tidak secara langsung terlihat dari jalan raya. Bangunan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan UU no.11 Tahun 2010, sekarang menjadi bagian dari Kompleks Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (Kanwil DJKN). Kementerian Keuangan. Letaknya di tengah-tengah kompleks perkantoran (peta 1). Di kalangan DJKN dikenal dengan sebutan Pendopo Kanwil DJKN. Statusnya adalah Barang Milik Negara.

Dikenal dengan sebutan Asrama Parapattan 10 karena letaknya di Jalan Parapattan no. 10. Kini nama jalan sudah berubah menjadi Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun. Secara administrasi, Gedung Prapattan 10 terletak di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (peta 2). Letaknya agak di sudut, dekat persimpangan Jalan Senen Raya , Jalan Kramat Raya, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, dan Jalan Letjen Suprpto.



Peta 5.1: Asrama Parapattan 10 terletak di tengah-tengah kompleks Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara.



Peta 5.2. Asrama Parapattan 10 terletak Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen.

Gedung Asrama Parapattan 10 terletak pada koordinat (peta 5.3):

Titik **A**: -6.178599, 106.848902

Titik **B**: -6.178732, 106.840958

Titik **C**: -6.178475, 106.840622

Titik **D**: -6.178294, 106.840628



Peta 5.3: Titik koordinat gedung Asrama Parapattan 10

Cagar Budaya ini atapnya pernah roboh sehingga perlu direstorasi. Restorasi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kanwil DJKN), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, dan para ahli cagar budaya, selesai, pada 27 Desember 2018 dan diresmikan, pada 3 Mei 2019. Gedung seluas hampir 800 meter persegi ini memiliki gaya arsitektur *Nieuw Indische* (Hindia Baru), Gaya yang memadukan gaya Eropa dan Tradional ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, sebelum Perang Dunia ke-2.

Lahirnya gaya Hindia Baru terkait dengan adanya bahan bangunan baru, munculnya Modernisme, dan standar baru yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda di bawah *Depeartement voor Burgerlijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum). Pemerintah menyusun standar pembangunan gedung baru yang disesuaikan dengan iklim lokal atau tropis. Ketentuan ini untuk mengurangi biaya pembangunan dan perawatan bangunan.

Gaya arsitektur Hindia Baru mulai mengurangi dekorasi dan lebih memilih aspek fungsionalnya. Pintu dan jendela dibuat besar dengan jumlah yang cukup banyak

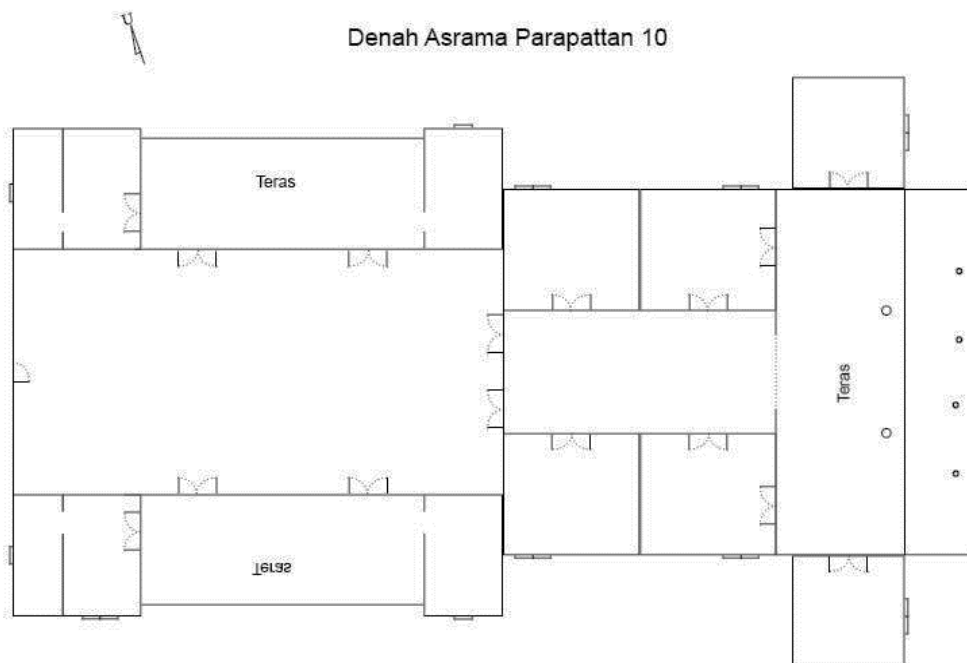
untuk menyesuaikan dengan iklim tropis yang panas. Plafon dibuat tinggi, dengan jarak dari lantai empat meter lebih.

2.3. Deskripsi Bangunan

2.3.1. Denah dan ruangan.

Berdenah empat persegi panjang yang membujur dari Timur ke Barat, gedung ini memiliki ukuran 41,2 m x 19,3 m. Bangunan ini dibuat simetris dengan ruangan atau kamar berada di sisi Utara dan Selatan, terdiri atas:

- 1) Asrama Prapattan 10 memiliki teras di depan, samping Utara dan selatan. Teras depan memiliki ukuran yang besar, 16,2 m x 7,5 m. Teras samping berukuran 11,8 m x 4,8 m. Di Utara dan Selatan teras depan terdapat sebuah ruangan berukuran 4,78 m x 3,90 m.
- 2) Ruangan-ruangan terletak di pinggir kiri dan kanan. Bagian tengah merupakan ruangan besar. Ada dua ruangan besar di gedung ini, yaitu di depan berukuran 10,8 m x 6,2 m dan di belakang 21,96 m x 9,5 m.

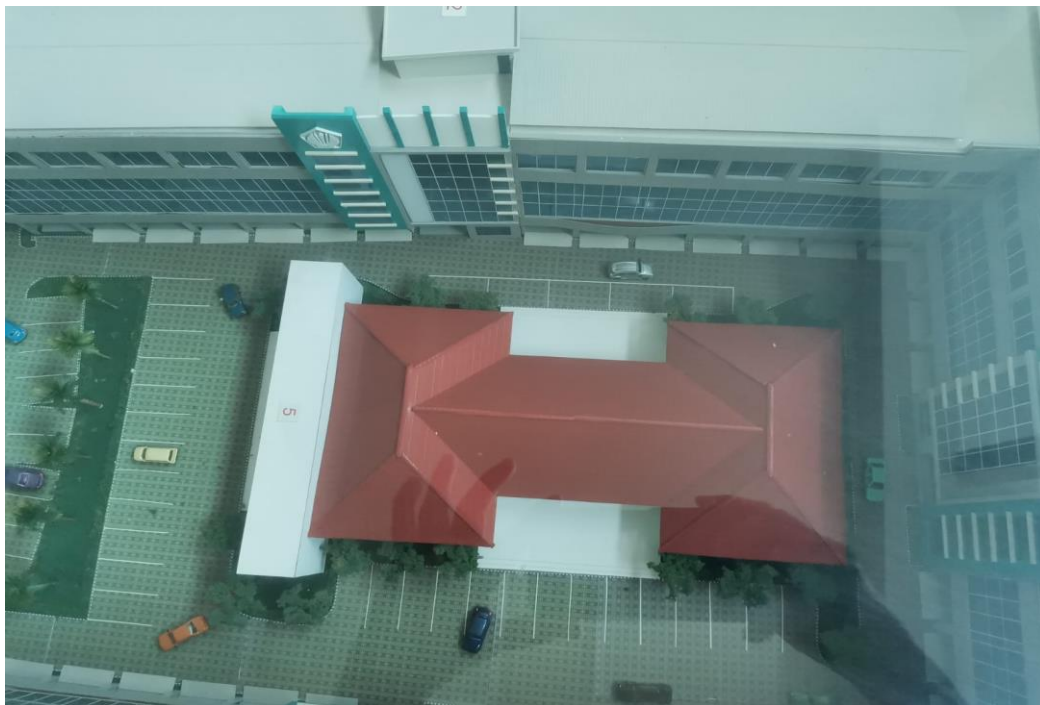


Gambar 5.41: Denah Asrama Parapattan 10

- 3) Di ruang besar depan terdapat empat kamar dengan ukuran yang cukup besar, yaitu: 4,9 m x 5,4m. Ruangan besar belakang berhubungan langsung dengan teras samping. Terdapat pintu keluar di dinding barat ruangan besar. Di ujung barat teras samping terdapat ruangan berukuran 4,90 m x 3,50 m dan ruang yang lebih kecil berukuran 4,90 m x 2,05 m.

2.3.2. Atap

Bangunan ini beratap limasan menjulang. Bila dilihat dari atas, ada dua atap limasan di timur dan barat sementara penghubungnya dapat disebut model atap pelana. Atap teras depan rata, berwarna putih. Bila dilihat dari depan, atap limasan terlihat hanya sebagian karena tertutupi atap teras yang terbuat dari tembok. Atap menggunakan penutup dengan material genteng berwarna merah maroon. Genteng yang dipakai setelah restorasi sudah tidak asli lagi dan merupakan genteng tanah liat yang dilapisi glasir. Atap teras bergelombang warna putih. juga sudah tidak asli lagi.



Gambar 5.42: Maket Asrama Prapattan 10. (Foto: Mahanizar Djohan)



Gambar 5.43: Tampak depan Asrama Parapattan 10 . (Foto: Mahanizar Djohan)

2.3.3. Dinding

Dinding Asrama Parapattan 10 terbuat dari batu bata, ketebalan sekitar 25 Cm, dengan plesteran di kedua sisinya dan dicat warna putih.



Gambar 5.44: Dinding dalam berwarna putih. (Foto: Mahanizar Djohan)



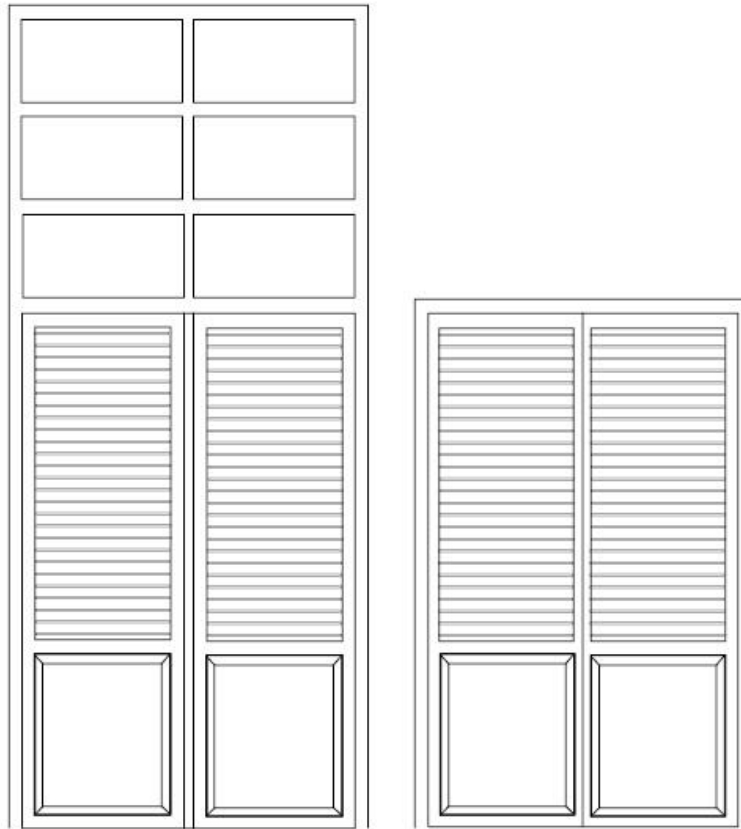
Gambar 5.45: Dinding luar berwarna putih. (Foto: Mahanizar Djohan)

2.3.4. Pintu dan Jendela.

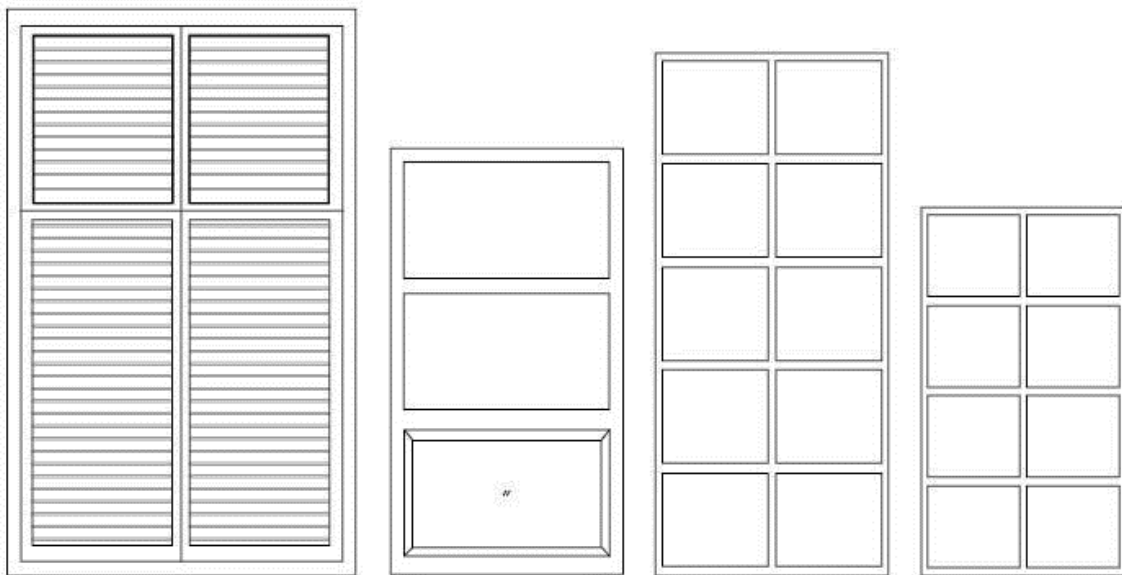
Ruangan di gedung ini memiliki bingkai pintu yang besar, yaitu 3,9 m x 1,76 m. Berdaun pintu ganda, masing-masing berukuran 2,3 m x 0,75 m. Jendela juga berukuran besar, 3,08 m x 1,48 m. Bingkai atau kusen pintu dan jendela terbuat dari kayu besar, rata-rata berukuran 20 Cm x 14 Cm. Jendela mengkombinasikan material kayu dan kaca. Terdapat beberapa bentuk pintu dan jendela, dengan ukuran berbeda.



Gambar 5.46: Jendela bermaterial kayu dan kaca (Foto: Mahanizar Djohan).



Gambar 5.47: Dua model pintu asrama Parapattan 10.



Gambar 5.48: Bentuk-bentuk jendela Asrama Parapattan 10.

2.3.5. Lantai

Lantai teras depan gedung ini menggunakan marmer putih, sementara di ruangan dalam menggunakan ubin atau tegel polos berwarna abu-abu, dengan pola pemasangan ada hiasan belah ketupat warna hitam di setiap sudut pertemuan ubin (gambar 23). Bangunan ini juga menggunakan ubin enkaustik (*encaustic tile*), sebagai lis (gambar 24). Ubin enkaustik memiliki nilai seni dan pertama kali diproduksi di Eropa, pada 1800-an. Tegel yang terbuat dari bahan tanah liat ini dapat memiliki hiasan dua warna atau lebih. bahkan ada yang enam warna. Pola atau gambar bukan terbuat dari glasir, lukisan, atau cap, tetapi karena perbedaan tanah liat sebagai bahan bakunya (Sarjiyanto, 2017:54).



Gambar 5.49: Ubin atau tegel Asrama Parapattan 10. (Foto: Mahanizar Djohan)



Gambar 5.50: Ubin Enkaustik sebagai lis. (Foto: Mahanizar Djohan)

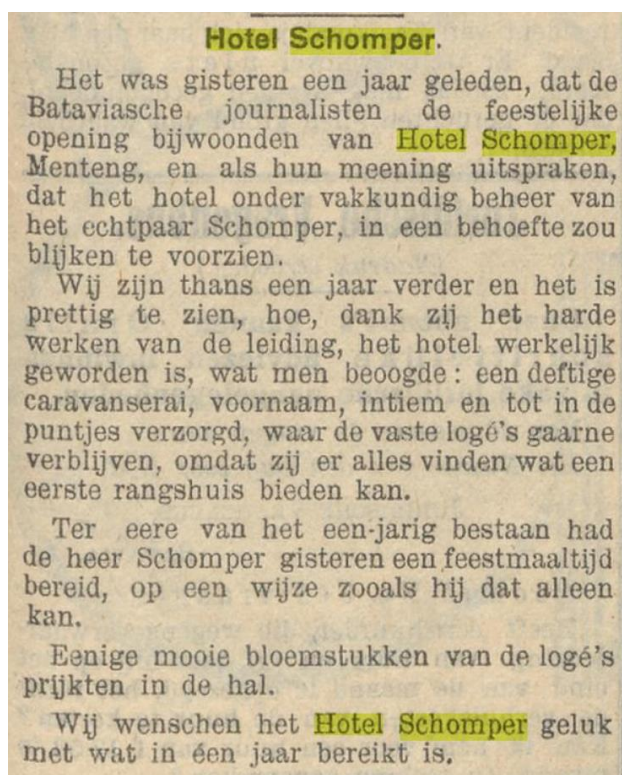
3. Asrama Menteng 31; Dari Hotel Mewah ke Asrama Perjuangan

3.1. Perkembangan Asrama Menteng 31 pada Masa Awal Pembangunan Hotel Schomper (1930-1942)

Informasi mengenai kapan gedung Asrama Angkatan Baru Menteng 31 pertama kali didirikan cukup simpang siur, karena lebih banyak tulisan tentang sejarah bangunan ini hanya bermula dari perannya sebagai “Gedung Joang 45” dan ruang-ruang diskusi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Padahal, ia telah berdiri jauh sebelum tahun 1945, di mana fungsi aslinya melainkan sebuah hotel yang dikelola oleh pasangan suami-istri Eropa-Belanda bernama **Schomper**.

Dalam sebuah surat kabar *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* tanggal 11 Maret 1931, terdapat artikel berita yang memberitakan pada 10 Maret 1931, keluarga Schomper baru saja merayakan pesta ulang tahun berdirinya “Hotel Schomper” di tempat tersebut. Jika mengacu pada berita ini, maka dapat diduga bahwa bangunan hotel Schomper telah resmi digunakan sejak tanggal 10 Maret 1930.

Wartawan Batavia yang menghadiri peresmian dan ulang tahun Hotel Schomper pada tahun 1931 di Menteng ini berpendapat, manajemen hotel yang dipimpin oleh pasutri Schomper ini cukup terampil dan memenuhi kebutuhan pelayanan sebagai ruang inap dan transit (atau "karavanserai") yang elit, bermartabat, terhormat, serta terawat sampai ke detail terakhir. Hotel ini tergolong cukup mewah pada jamannya, di mana para penginap atau pemondok mendapatkan semua penawaran dengan kualitas ruang inap kelas satu. Beberapa rangkaian bunga yang indah dari para pemondok sampai menghiasi aula atau ruang tengah hotel.



Gambar 5.51: "Hotel Schomper," *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* 11 Maret 1931, hlm. 2.

Fakta lain dari sumber arsip menunjukkan bahwa Hotel Schomper pada awalnya beralamat di *Oud Menteng* (Menteng Lama) Nomor 31-32 atau Nomor 32 Batavia Centrum (Jakarta Pusat), namun belakangan waktu, alamat tersebut akhirnya ditegaskan menjadi Nomor 31. Hotel ini beberapa kali mengiklankan layanan inapnya di kolom advertensi surat kabar Batavia, dengan mencantumkan kontak telepon bernomor 3482 WI, serta beberapa pilihan layanan inap dan fasilitas penunjang.

Pada tahun 1934, terdapat dua jenis layanan inap yang bisa dipilih pemondok di Hotel Schomper; antara lain menginap harian (*dagkamers vanaf*) yang dikenakan biaya sebesar f 4.50 per malam, dan menginap bulanan (*maandkamers vanaf*) yang dikenakan biaya sebesar f 65.50. Fasilitas *amenities* seperti kasur tambahan dan sarapan (*logies met ontbijt*) dikenai biaya tambahan sebesar f 3.50.



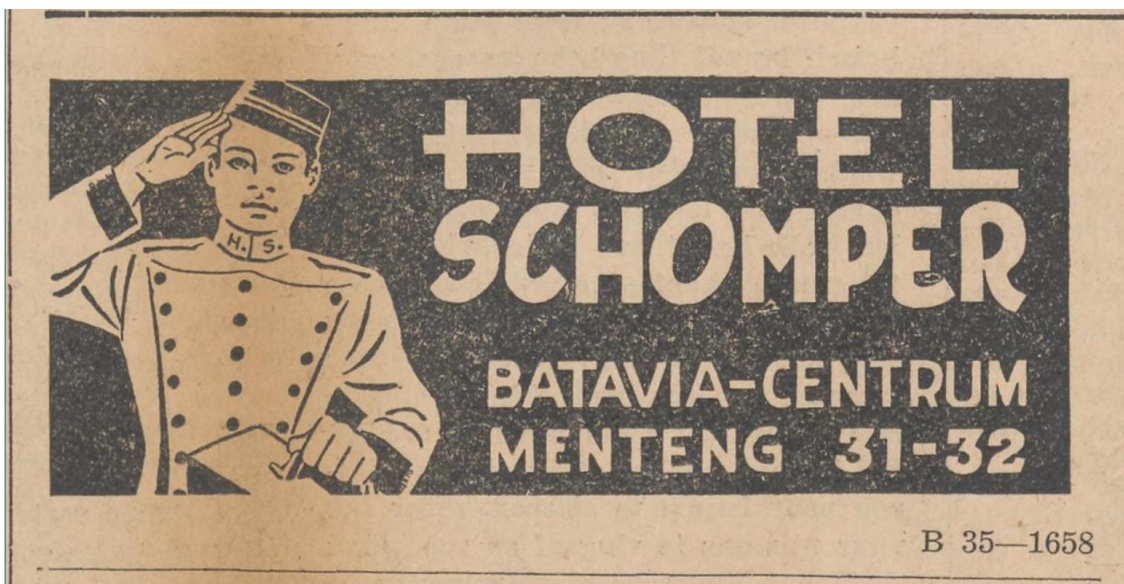
Gambar 5.52: Iklan "Hotel Schomper" di Batavia. Sumber: *De locomotief*, 18 April 1934.



Gambar 5.53: *Bataviaasch nieuwsblad*,
18 Juli 1936



Gambar 5.54 *Bataviaasch nieuwsblad*,
15 Agustus 1936



Gambar 5.55: Iklan surat kabar *De locomotief*, 7 Februari 1940.

Beberapa nama pemondok berkebangsaan Eropa-Belanda yang tercatat pernah menginap dan bertinggal di hotel ini antara lain J.C.H. Fischer yang merupakan tokoh masonik di Batavia; H. Planting selaku ketua Asosiasi Guru Pendidikan Dasar dan Menengah (*Vereeniging van Leeraren en Leerressen bij bet Middelbaar Onderwijs*) di bawah Dinas Pendidikan dan Pelayanan Utama (*Department van Onderwijs en Eerendienst*); H.J.W.N. van Rantwijk; E.M. Ruzette anggota VIVOS dan VVAO.

Selain menjadi tempat pondokan, Hotel Schomper juga menawarkan fasilitas gedungnya untuk digunakan sebagai tempat menginap semi-permanen, kantor, hingga *venue* acara resmi seperti akad pernikahan. G.M.J. Schaub, seorang editor rubrik olahraga *bridge* profesional pernah menjadikan Hotel Schomper sebagai alamat kediamannya sekaligus kantor editor olahraga *bridge* di Batavia pada tahun 1936.

Sebelum diduduki oleh tentara Jepang dan dialihfungsi menjadi asrama Angkatan Baru Indonesia tahun 1942, gedung hotel yang tergolong berkelas dan mahal ini membuat para pemondok yang menikmati fasilitas gedung hotel memang didominasi kalangan masyarakat Eropa-Belanda saja. Di sisi lain, sebagian besar *jongos* atau *bujang* yang dipekerjakan sebagai pelayan hotel berasal dari kalangan pemuda bumiputra yang berusia remaja. Tidak lama menjelang pendudukan Jepang di Batavia

yang merebut bangunan ini, rupanya di hotel ini juga pernah terjadi peristiwa tragedi pembunuhan seorang istri oleh suami pasangan Eropa-Beland, yang diketahui sang suami tidak lain merupakan mantan manajer Hotel.



Gambar 5.56: Hotel Schomper Menteng 31-32



Gambar 5.57. 'Alamat editor bridge kami tidak lagi di Molenvliet-W. 7K, tapi Hotel Schomper di sini'.
Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad*, 14 September 1936.



Gambar 5.58. Pengumuman akad nikah pasangan Eropa-Belanda Claartje Troostwijk dan H. van Waasdijk di Hotel Schomper dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 28 Januari 1932.



Gambar 5.59. *Soeawie, hoteljongen in Hotel Schomper te Batavia* karya Th. H. E. Metz dari Abcoude (1931). Sumber: Digital Collection KITLV 40500



Gambar 5.60: "PEMBUNUHAN DI HOTEL SCHOMPER. Batavia, 18 Agustus (Aneta). Pagi ini Majelis Hakim di Batavia mulai mengadili kasus terhadap terdakwa J. T. Th. N. aan, mantan manajer hotel Schomper. Seperti diketahui, ia beberapa waktu lalu pernah berupaya untuk mengambil nyawa istrinya." Sumber: *De Sumatra post*, 18 Agustus 1941, hlm. 1.

FAILLISSEMENTEN	
Raad van Justitie Batavia	Curatrice Weeskamer Batavia
UITGESPROKEN bij vonnis dd. 2 Juli 1941 (R. Cs. Mr. M. L. Swaab) J. J. de Haan, Kebon Waroe Noord no. 6, Bandoeng	
UITGESPROKEN bij vonnis dd. 4 Juli 1941 (R. Cs. Mr. M. L. Swaab) Lim Soei Nen, wonende Batavia-C., Krekot 47, aldaar een bedrijf uit- oefende o/d naam van Café Biljart Oriental.	
INDIENING SCHULDVORDERINGEN uiterlijk op 28 Juli 1941 Tjio Tiang Heng merk „Toko Balilla”, Bandoeng	
VERIFICATIE-VERGADERING 10 u. v.m. gebouw R. v. J. Batavia ddo. 28 Juli 1941 Tjio Tiang Heng merk „Toko Balilla”, vd. 30 „ 1941 instede van 18 Juni '41 Tan Beng Kauw merk Eng Djoe Liong, Tandjong-Pandan. 30 „ 1941 instede van 18 Juni '41 Nal. v/w B. van Vianen, Bandoeng 13 Augs. 1941 instede van 18 Juni '41 E. H. H. Buck („Woning- en Administratiekantoor”) Bandoeng. 13 „ 1941 instede van 18 Juni '41 Mr. N. J. Feldmann, Batavia. 27 „ 1941 instede van 25 Juni '41 J. F. van der Poorten (Kapper- bedrijf Nizam) Bandoeng. 27 „ 1941 instede van 25 Juni '41 N.V. „Mercurius”, exploitante van het Hotel „Schomper”, Batavia-C.	
VERNIETIGD bij vonnis dd. 27 Juni '41 Phan Kim Siong, destijds han- delende onder het merk Toko Siong, Batavia-C.	
BEEINDIGING door het verbindend worden der slotuitdeelinglijst. dd. 10 Juni '41 The Se Tjiauw merk Guan Seng Hong, Djambi 17 „ '41 Nio (Njo) Fen Foen merk Fen Foeng Ho, Buitenzorg. 24 „ '41 W. E. la Porte, Batavia-C. 13925	

Gambar 5.61: Berita lain yang menyebut Hotel Schomper.
Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad* 05-07-1941

FAILLISSEMENTEN	
Raad van Justitie Batavia	Curatrice Weeskamer Batavia
UITGESPROKEN bij vonnis 7 Nov. 1941 (R. Cs. Mr. A. A. Kroon). Kwee Tjie Hiong alias Kwee Hiang Hway, Madjalaja bij Bandoeng. Kwee Kie Lin, koopman, Batavia, Gan g Lamtjeng 2.	
VERIFICATIE-VERGADERING 10 u. v.m. gebouw R. v. J. Batavia ddo. 19 Nov. 1941 instede van 29 Oct. 1941 J. F. van der Poorten, Bandoeng.	
NEDERLEGGING UITDEELINGSLIJST ter inzage ter Griffie R. v. J. (Af- schrift bij de Weeskamer) vanaf 11 November 1941 gedurende ; 2 weken Lo Joeng Sam, waronghouder, Batavia (1e. tev. slot 0%). 2 „ F. C. Ladders, Ambt. Dept. v. Marine, Bat.-C. (2e. tev. slot 42%). 3 „ Tjia Kloe Kloe, handelaar, Koeningan (1e. tev. slot 0%).	
BEEINDIGING door opheffing bij besch. R. v. J. ddo. 24 Oct. 1941 N.V. „Mercurius”, exploitante van het Hotel „Schomper”, Batavia-C. 24 „ 1941 Ng. Tek Moek, handelaar, Bandoeng. 24 „ 1941 P. Slierendrecht, architect, Batavia-C. 31 „ 1941 H. Smit, particulier, Ban doeng. 31 „ 1941 Vrouwe A. L. Pangkey geboren Bigot, Bandoeng. 23409	

Gambar 5.62 Berita lain menyebut Hotel Schomper.
Sumber: *Bataviaasch nieuwsblad* 08-11-1941

3.2. Tinjauan Arsitektur Hotel Schomper (Asrama Menteng 31)

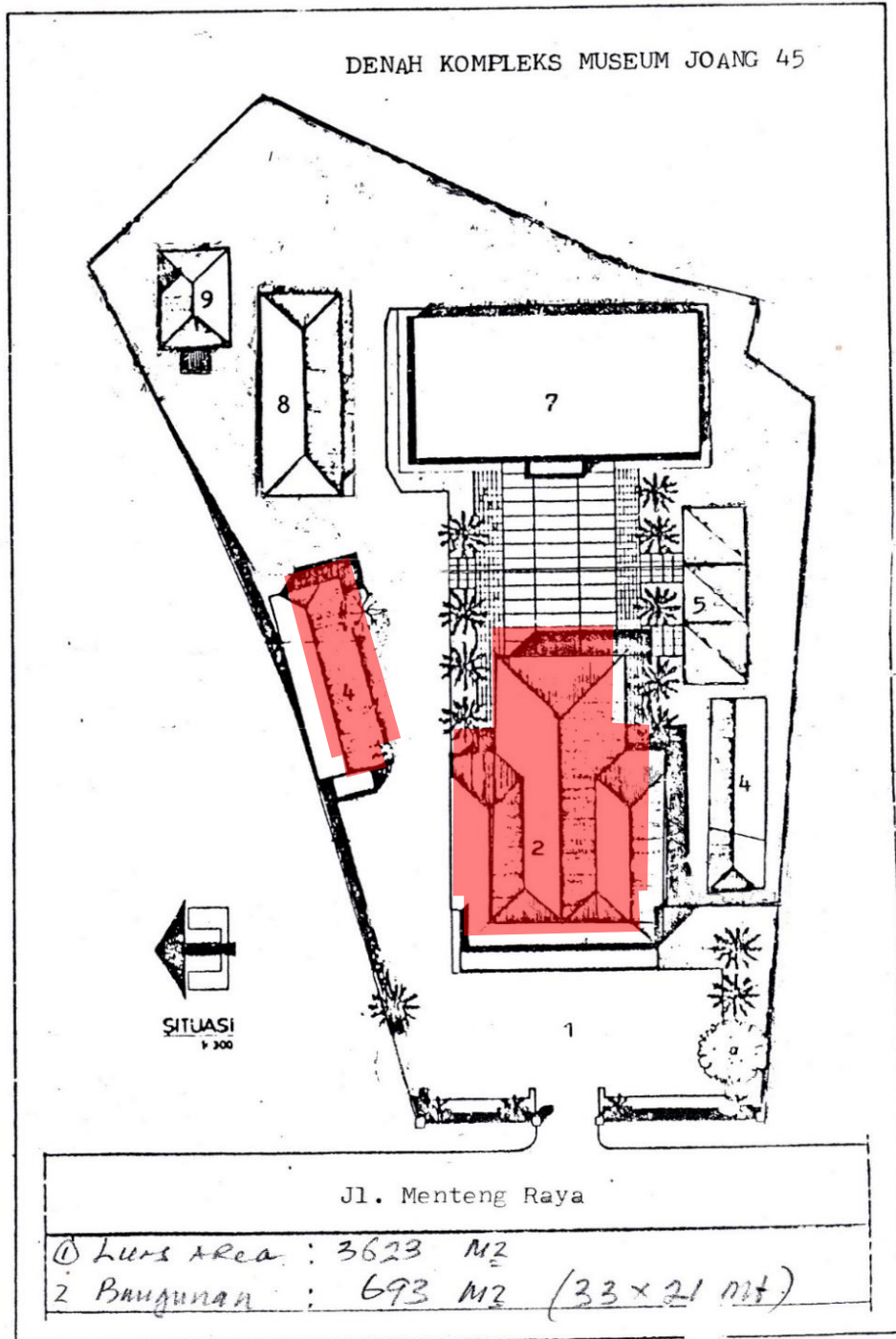
Berdasarkan hasil pengamatan dan kunjungan lapangan identifikasi elemen arsitektur, Asrama Menteng 31 (kini Gedung Museum Joang '45) dapat dikatakan menerapkan pendekatan gaya bangunan Indis Baru (*Nieuw Indische Bouwstijl*) dan sesuai dengan masa gaya ketika ia dibangun. Pendekatan merancang arsitektur kolonial modern akhir (*late modern colonial*) ini menghadirkan kemegahan fasad depan bernuansa Neo-klasik dipadu dengan langgam arsitektur tropis setempat di Hindia-Belanda.

Tropikalitas Asrama Menteng 31 (Gedung Djoang 45) ditunjukkan dengan hadirnya susunan organisasi ruang berupa teras depan (*voor galerij*), teras belakang (*achter galerij*), dan ruang galeri utama yaitu aula atau ruang tengah (*central room*) yang mendominasi denah bangunan. Adapun kamar-kamar pemondok di sisi samping menunjukkan kemiripan dengan denah rumah tinggal orang Jawa dan Indis awal (*Indische woonhuis*). Bangunan kolonial semacam ini biasanya juga dilengkapi satu-dua bangunan "paviliun" di sisi gedung utama yang berfungsi sebagai unit penunjang dengan desain yang lebih sederhana.

Ciri lain yang terlihat jelas adalah susunan ruang yang simetris. Terdapat aula/ruang tengah, kamar tidur utama dan kamar tidur lainnya yang terhubung dengan ruangan-ruangan lainnya. Adanya atap kanopi atau atap teritisan pada teras juga mengelilingi tampak depan bangunan secara fungsional untuk menghindari masuknya sinar matahari langsung dan tampiasnya air hujan. Konsol-konsol besi berbentuk kurva melengkung berfungsi secara struktural sekaligus estetis menopang atap kanopi dan tiang kolom. Jendela diperbanyak agar lancar mengalirkan angin ke luar-dalam bangunan, khususnya kamar-kamar.

Area museum memiliki luas total lahan sebesar 3.623 m², sedangkan luas total bangunannya mencapai 693 m². Memang ada beberapa massa bangunan yang eksis dalam kompleks Museum Joang 45, tetapi hanyalah dua bangunan utama yang menjadi bagian otentik Hotel Schomper (1930-1942) dan asrama Angkatan Baru (1942-1945);

yaitu gedung utama museum, serta satu gedung paviliun penunjang di sisi utara yang dulu juga dijadikan kamar-kamar inap. Adapun gedung lainnya relatif baru didirikan belakangan waktu demi menunjang kebutuhan program museum.



Gambar 5.63: Denah *site plan* atau situasi area Museum Joang 45

Atap gedung utama museum berbentuk campuran, terdiri dari atap limas atau perisai berukuran besar yang diapit oleh dua atap perisai lainnya yang berukuran lebih kecil untuk menaungi selasar kiri dan selasar kanan. Terdapat total 6 tiang kolom doria dan 4 kolom pilaster di teras depan, dengan susunan 2 pasang kolom doria merapat di sisi tengah dan 1 kolom doria di tiap sisi berdekatan dengan pilaster yang menyatu dengan tembok. Seluruh kolom menopang bentang balok beserta atap kanopi dengan hadirnya konsol-konsol besi/baja melengkung, yang secara estetis sekaligus fungsional tersambung ke tiap kolom.

Pada bagian parapet fasad depan bangunan, terdapat keterangan nama "Gedung Joang 45 Menteng 31". Listplang dekoratif terpasang di sepanjang pinggiran atap kanopi yang ditemukan di seluruh atap kanopi atau teritisan gedung ini. Tiga plakat terpasang di tembok fasad; antara lain plakat Pemerintah DKI Jakarta era Gubernur Ali Sadikin yang menandai pemugaran gedung tahun 1973-1974, plakat gedung museum itu sendiri, serta plakat terbaru dari Pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 yang berukuran lebih kecil.

Tiga pintu utama di teras depan semuanya memiliki kusen pintu ganda dan berlapis luar-dalam, sebagaimana semua kusen jendela bangunan ini. Pintu atau jendela sisi luar bermodel *krapyak (louvre)*, sedangkan pintu atau jendela sisi dalam menggunakan material kayu berbingkai kaca. Di bagian ruang makan, jendelanya hanya satu dan berprofil kaca.

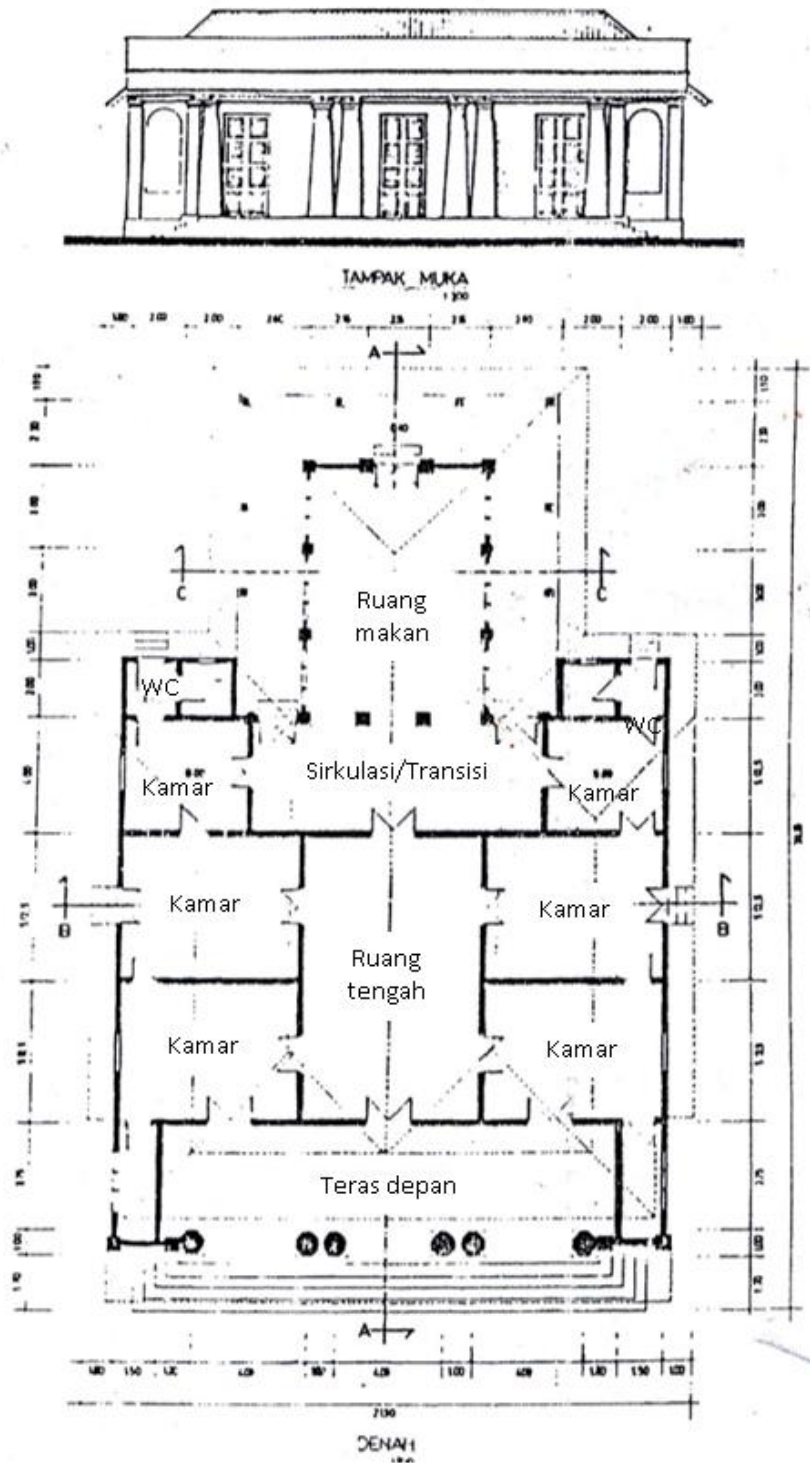
Pintu-pintu kamar menggunakan satu daun pintu kayu yang memiliki lubang angin (*bovenlicht*) dengan bingkai kayu berpola garis silang sederhana. Tangga lantai bordes dan *plinth* gedung terbuat dari batu marmer yang masih asli sejak awal dibangun. Lantai interior setiap ruangan bekas kamar hotel menggunakan tegel (*tiles*) bermotif floral, mirip dengan sebagian motif teralis pada jendela kamar dan ruang makan. Sebagian teralis jendela kamar lainnya berbentuk sel biasa.



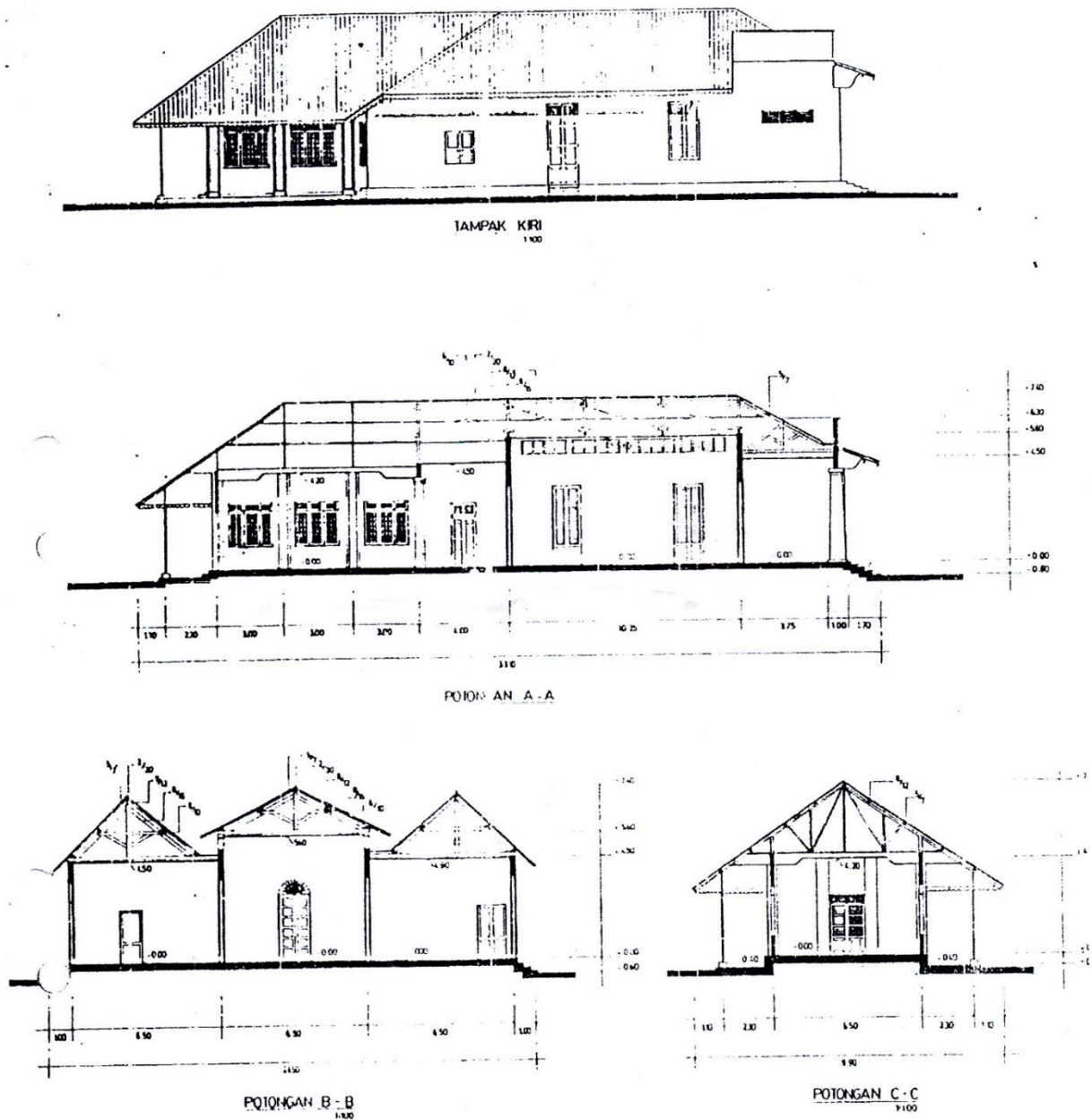
Gambar 5.64: Gedung Joang 45 Menteng 31 saat ini (2022)

Memasuki area interior gedung utama, tersedia total 6 kamar dengan rincian 4 kamar berukuran besar yang terhubung ke aula, dan 2 kamar berukuran kecil yang terhubung ke area sirkulasi atau transisi antara ruang tengah dan ruang makan. Setiap kamar memiliki toilet/WC dalam, dan setiap kamar yang bersebelahan memiliki pintu penghubung (*connecting door*) yang berfungsi sebagai akses mitigasi darurat. Dua kamar di sisi tengah memiliki akses tangga ke luar.

Di antara aula/ruang tengah dan area sirkulasi terdapat gerbang tak berdaun pintu yang diapit oleh dua pilaster serta ornamen detail nan indah pada bagian *arch transom*. Antara area sirkulasi dan ruang makan terdapat empat kolom doria yang seolah-olah menopang ruang makan secara khusus. Kolom-kolom pilaster mengelilingi ruang makan, dan pemandangan ini berbeda halnya dengan area kamar hotel yang lebih banyak menggunakan dinding pemikul (*bearing wall*) dan sedikit kolom pilaster.



Gambar 5.65 Denah gedung utama Hotel Schomper alias Asrama Angkatan Baru Menteng 31



Gambar 5.66: Tampak dan potongan Hotel Schomper alias asrama Angkatan Baru Menteng 31

Dari ruang makan, terdapat pintu akses mengarah ke halaman atau ruang terbuka di luar teras belakang yang dulu biasa digunakan para pemondok Hotel Schomper untuk bersosialisasi dan berpesta dansa. Di sisi utara nampak sebuah paviliun penunjang yang memuat 4-5 ruang kamar hotel. Bangunan yang memanjang ini menggunakan atap limas atau perisai yang menutupi serambi paviliun dan ditopang

oleh kolom tiang besi atau baja. Setiap kolom memiliki sekur konsol besi di bagian atas untuk tujuan estetika dan batu umpak pedestal di bagian bawah.

Hari ini, terdapat lebih banyak lagi bangunan di area museum, antara lain paviliun untuk menampung dan memamerkan mobil-mobil bersejarah yang dahulu pernah digunakan sebagai mobil pertama pimpinan negeri ini oleh Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta keluarga presiden.



Gambar 5.67: *Aerial view* kawasan sekitar Menteng 31 hari ini via Google Maps.

Koleksi peta kawasan Menteng abad 20 menunjukkan adanya kemungkinan bahwa gedung hotel atau asrama sebenarnya telah terbangun lama sebelum tahun 1930, dibuktikan dari hadirnya massa bangunan di posisi yang sama sejak tahun 1911-1925. Kawasan ini sejak awal dipadati oleh bangunan dengan beragam fungsi, dan posisinya tidak jauh dari persimpangan jalan menuju Tjikini dan Gondangdia.



1897



1911



1921



1925



1938



1945

Gambar 5.68: Menteng 31 dalam peta lama. Sumber: Leiden University Libraries

4. Laboratorium Mikrobiologi; 90 Tahun Riwayat (1932-2022)

4.1 Sejarah Awal Pembangunan (1931-1933)

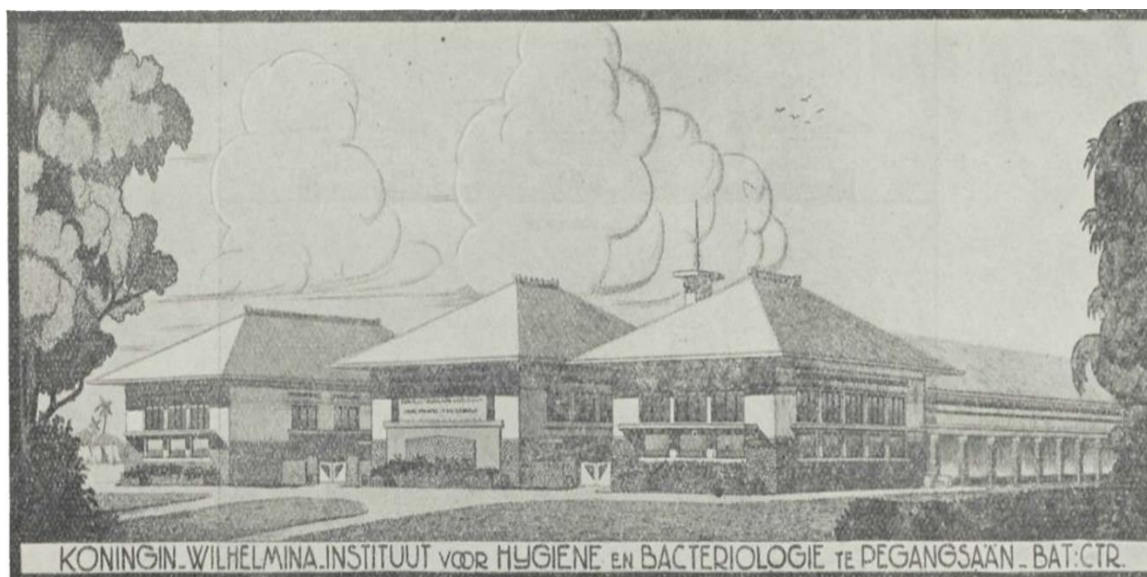
Sejak awal dibangun pada masa kolonial akhir Hindia-Belanda tahun 1932-1933, kompleks gedung Mikrobiologi FKUI telah berfungsi sebagai pusat penelitian bakteriologi paling moderen dan mutakhir di Hindia-Belanda yang menunjang penelitian kesehatan dan pendidikan kedokteran di Batavia. Adalah seorang arsitek-insinyur bernama **Ir. J. van Gendt** yang merancang gedung ini, yang sebelumnya sukses merancang gedung Stasiun Manggarai pada tahun 1914.



Gambar 5.69: *Het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie*, Batavia (1930-1939).
Sumber: Tropenmuseum inv. nm. TM-60038164

Ir. van Gendt mengulas secara lengkap riwayat pembangunan gedung Mikrobiologi UI dalam sebuah artikel jurnal *De Waterstaats-Ingenieur* (1933) No. 9, yang diterbitkan kembali dalam majalah *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*, Edisi 36, No. 18/19, 1 November 1933, hlm. 85-90 dengan tajuk “**Het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie**”, atau ‘Institusi Ratu Wilhelmina untuk Higienitas dan Bakteriologi’. Ia sendiri merupakan pejabat struktural di Dinas

Pekerjaan Umum atau **Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.)** dan terlibat langsung dalam manajemen konstruksi pembangunannya.



Gambar 5.70: *Perspectief tekening van het ontwerp.*
Sumber: *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* (1933)

Ide pembangunan gedung ini berawal pada tanggal 20 Mei 1931, ketika rapat umum pengurus Yayasan Ulang Tahun Ratu Wilhelmina (**Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting**) memutuskan akan membangun dua gedung institusi kesehatan di Batavia; antara lain Sekolah Tinggi Kedokteran (**Geneeskundige Hoogeschool**, atau G.H.S.) dan Laboratorium Higienitas dan Bakteriologi (**Laboratorium voor Hygiëne en Bacteriologie**). Lembaga G.H.S. sudah terbentuk sejak tahun 1927, sedangkan gedung laboratorium benar-benar baru akan didirikan. Yayasan bertanggung jawab dalam manajemen institusi, dan Ir. J. van Gendt diberikan izin oleh Direktur B.O.W. untuk melaksanakan dan mengarahkan pembangunan desain agar disetujui. Desain bangunan dibuat di kantor *Landsgebouwdienst* di Batavia dan mengambil lokasi lahan di Pegangsaan Timur No. 15, Jakarta Pusat.

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda tanggal 24 November 1931 menyampaikan apresiasi Gubernur-Jenderal atas rencana tersebut, dan mengusulkan agar bangunan itu nantinya bisa diterima oleh Negara setelah selesai dibangun untuk dijadikan sebagai laboratorium Higiene dan Bakteriologi Fakultas Kedokteran di Batavia.

Pemerintah juga mengumumkan dalam surat tertanggal 25 Februari 1932 bahwa Ratu Wilhelmina tidak berkeberatan jika nama laboratorium ini menyandang namanya.

Ketika gambar desain sudah siap, lelang umum pun diluncurkan. Pelelangan proyek berlangsung sejak 29 April 1932, sedangkan bagi penunjukan di tempat dilakukan pada 22 April 1932. Cukup banyak nama firma atau perusahaan jasa konstruksi yang melakukan penawaran harga, antara lain:

1. N. V. Nederlandsh Aannemer Maatschappij voor het Firma H.F. Boersma (Nedam),, f 84590.—
2. Firma Westmaas & de Pagter,, f 88550.—
3. Firma Selle & de Bruyn,, f 85693.—
4. Bouwkundig Bureau D. J. Muis,, f 112988.—
5. N. V. Hollandsche Beton Maatschappij,, f 85580.—
6. Tjoa Kim Tjoan,, f 96220.—
7. Bouwkundig Bureau Evenhuis & van Schelt,, f 94380.—
8. J. Pattipilohy,, f 81770.—
9. Arch. En Aannemer Bureau Reyerse & de Vries,, f 83100.—
10. N. V. Bouwkundig Bureau Sitsen & Louzada,, f 79473.—

Dewan Pengurus Yayasan akhirnya menyetujui penugasan kontraktor utama diberikan kepada N.V. Bouwbureau Sitsen & Louzada yang beralamat kantor di Yogyakarta. Selanjutnya, pada 13 Juni 1932 dibuatlah kontrak pembangunan di hadapan Notaris Bpk. G. L. P. Bouman selaku pengganti sementara Notaris Ma. AH. van Ophuysen di Batavia. Perlu dicatat bahwa tender asli tidak termasuk renovasi bekas paviliun rumah dinas direktur C.B.Z. (sekarang RS Cipto Mangunkusumo), serta pendirian rumah penunjang di halaman belakang. Artinya, sebelum diadakannya pembangunan di lokasi (*site*), terdapat bangunan lain yang berdiri di tapak lokasi.

Total biaya pembangunan fasilitas ini mencapai f 78.957,35, atau sebesar f 49,50 per m² luas permukaan bangunan. Biaya itu termasuk dengan rincian fitur jendela baja senilai f 5.400; engsel dan kunci f 900; tudung besi seharga f 4.535.42; partisi halaman f 510; wastafel dan meja beton untuk ruang laboratorium hewan

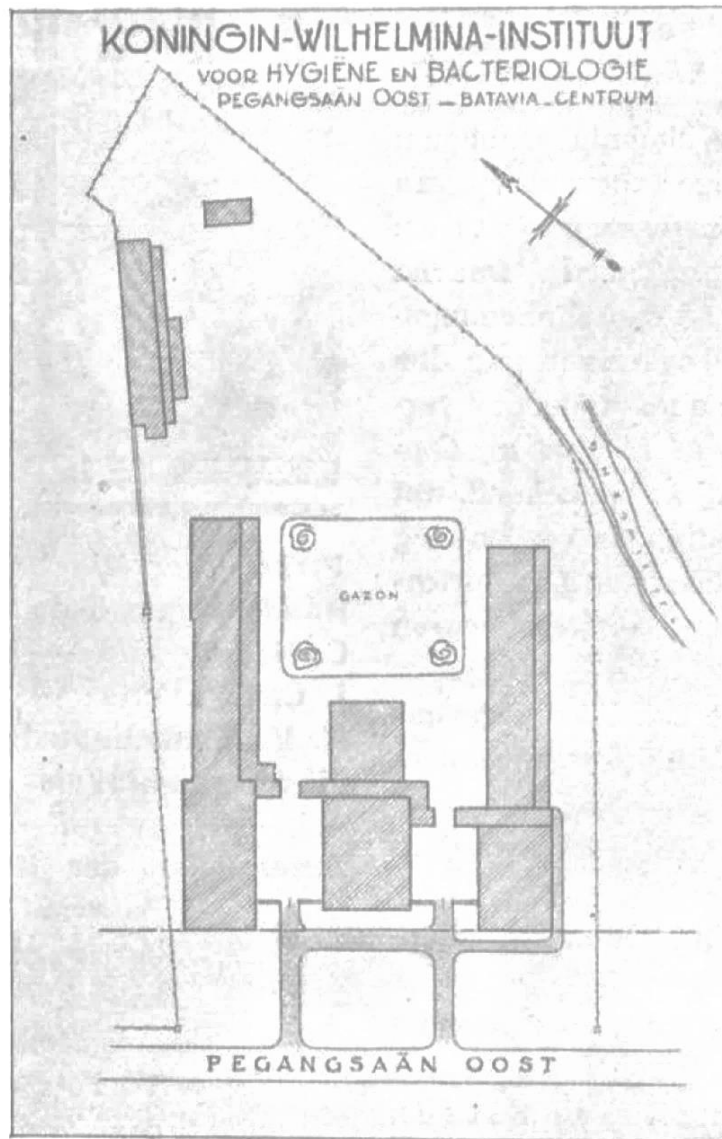
senilai f 425; sarana air bersih dan sanitasi f 1.789.50; fasad tembok prasasti seharga f 224; pipa gas dan listrik f 833; hingga alokasi papan tulis senilai f 105. Berikut ini adalah informasi umum penanggung jawab di setiap bagian dalam konstruksi proyek:

1. **Manajemen konstruksi** : Ir. J. van Gendt, insinyur struktural di B.O.W. (Departemen Pekerjaan Umum)
2. **Kontraktor utama** : N.V. Bouwkundig Bureau Sitsen & Louzada dari Yogyakarta
3. **Supervisor**: Kepala Inspektur Biro N. V. Bouwkundig Sitsen & Louzada, W. Margadant
4. **Pengawas harian**: A. van Doorn, arsitek dari B.O.W., dan F. Wetzel
5. **Kontraktor lampu, listrik dan pipa lonceng**: Firma Hoogeveen di Batavia-Centrum
6. **Kontraktor pipa gas**: Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij
7. **Kontraktor penyediaan air**: perusahaan Veen & Vis di Batavia-Centrum
8. **Kontraktor tudung besi**: N. V. Machinefabriek Molenvliet
9. **Kontraktor besi lainnya dan gerbang masuk besi**: Firma Mesman Schultz di Batavia-Centrum
10. **Pemasok wajan**: Firma Heijnen di Ujungberung dekat Bandung
11. **Pemasok lemari asam dan bahan glasir saluran air limbah, serta prasasti di glasir buatan di depan bagian tengah**: Firma A. Dubois di Bandung
12. **Pemasok perlengkapan saniter dan ornamen lampu**: Firma J. W. Stokvis di Batavia-Centrum
13. **Pemasok ubin**: Firma J. S. Maul di Batavia-Centrum
14. **Pemasok jendela baja**: Firma W. F. Braat di Delft
15. **Pemasok ruang kuliah**: Firma M. K. de Vries di Bandoeng
16. **Pemasok gorden untuk menggelapkan ruang kuliah**: Firma Ledimy di Batavia-Centrum
17. **Pemasok kayu**: Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen
18. **Pemasok jaring harmonika dan kandang besi kandang hewan**: N. V. Rasterwerken di Batavia-Centrum



Gambar 3. *Het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie*, Batavia (circa 1930s). Sumber: Koleksi Bintoro Hoepoedio

Lokasi kompleks *Het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiene en Bacteriologie* di Pegangsaan Timur sangat strategis. Selain berseberangan dengan Halte Tjikini, pada awalnya tempat ini merupakan lokasi kediaman mantan direktur **Rumah Sakit Sipil Pusat atau *Centraal Burgelijke Ziekenhuis (C.B.Z.)***, yang saat ini dikenal sebagai RS Cipto Mangunkusumo. Kondisi rumah dinas direktur waktu itu telah rusak, sehingga perbaikannya membutuhkan pengorbanan finansial terlalu besar. Lokasinya juga bersisian tepat dengan asrama mahasiswa kedokteran, sehingga jaraknya relatif dekat dari C.B.Z. dan kampus G.H.S.. Orientasi gedungnya pun cocok dengan pemandangan yang menghadap posisi matahari. (**Gambar 5.71**)



Gambar 5.71 *Situatie Konigin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie*
Sumber: *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* (1933)

Pada awalnya, terdapat rencana tambahan untuk membangun fasilitas Laboratorium Farmakologi di sisi utara atau area halaman belakang C.B.Z. dan G.H.S. (Gambar 5.71), namun karena lokasi tapaknya terlalu kecil, maka keputusan harus segera dibuat untuk membangun sebuah lantai saja. Perkiraan biaya rencana pembangunan itu mencapai 250.000 NLG (*Nederlandsch Gulden*), sedangkan kesempatan perluasan lahan C.B.Z. di masa depan sangat berkurang. Kekurangan lainnya adalah sirkulasi udara di kompleks C.B.Z. yang sudah cukup padat akan menambah derita dengan hadirnya konstruksi baru yang bertingkat. Akhirnya dengan

izin Ratu Wilhelmina, sebuah lembaga independen tersebut sukses didirikan dan disumbangkan ke G.H.S., ketika pemerintah kolonial tidak dapat membangunnya sendiri.

4.2. Tinjauan Arsitektur Laboratorium Bakteriologi dan Sekolah Kedokteran

Rancangan kompleks Bakteriologi (Saat ini menjadi Laboratorium Mikrobiologi UI) di masa awal merupakan hasil tukar pikiran dan kerjasama antara Ir. J. van Gendt selaku perancang, Badan Pembina Yayasan Ulang Tahun Ratu Wilhelmina sebagai klien, dan Prof. dr. WaIch selaku pakar medis dan calon pengguna. Salah satu konsep utama dari konstruksi desain bangunannya adalah pentingnya segi pencahayaan dan memperhitungkan sebanyak mungkin konteks pengalaman ruang yang diperoleh dari berbagai laboratorium preseden lainnya yang mempertimangkan iklim tropis Hindia-Belanda. Desain ini akhirnya disetujui oleh Prof. Walch. Selama proses konstruksi, kontak erat dan konsultasi intensif selalu dipertahankan bersama Dr. Schuurman pengganti Prof. Walch.

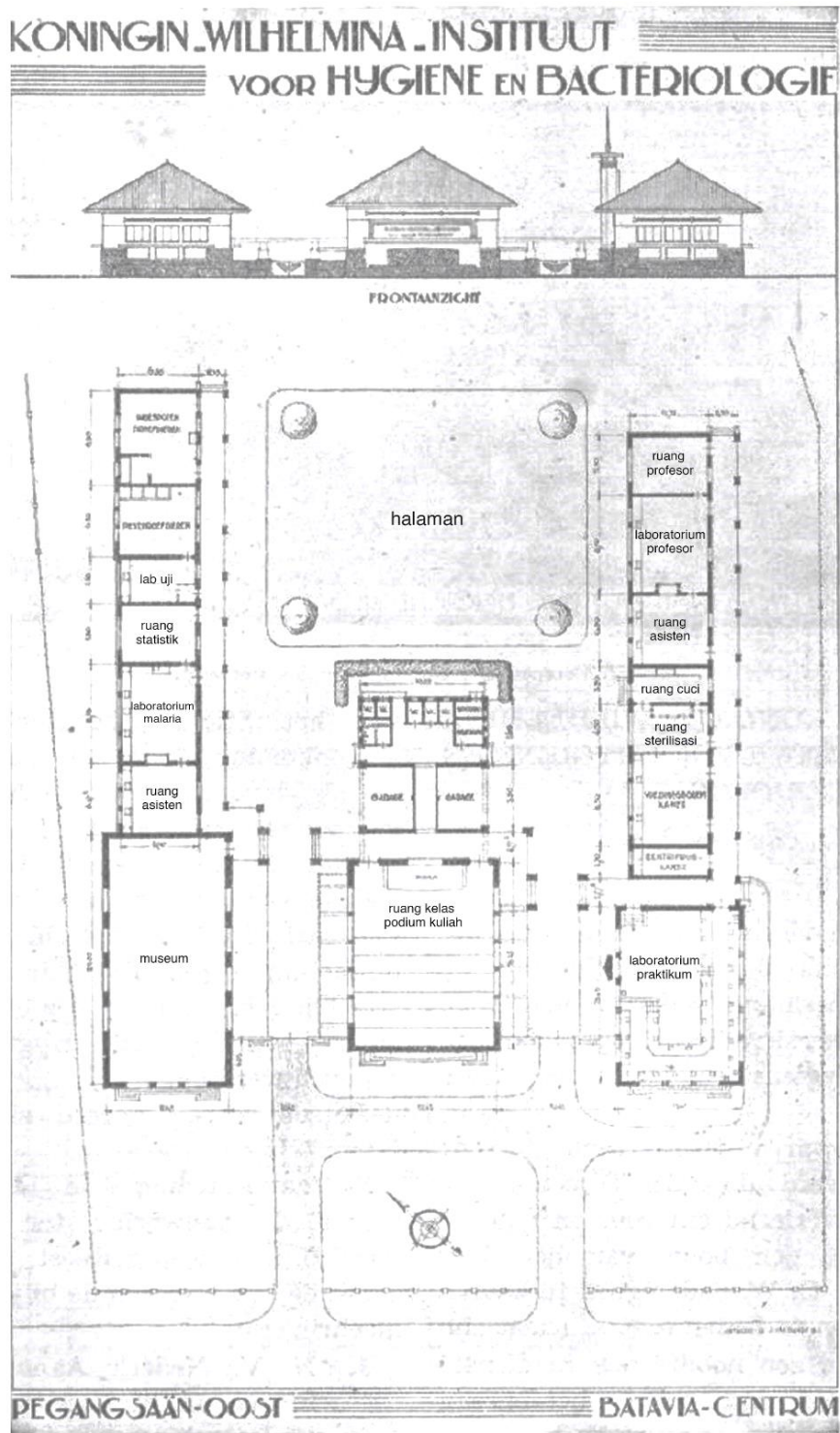
Dilihat dari denah gedung induk pada **Gambar 5.72**, kompleks Mikrobiologi UI terbagi menjadi tiga bagian utama; antara lain sayap selatan, bagian tengah, dan sayap barat; sedangkan di bagian belakang terdapat pendopo lama yang merupakan bekas rumah direktur. Pada tahun 1933, rumah itu telah diubah menjadi kandang hewan laboratorium beserta rumah penjaga baru yang telah didirikan. Dalam keseluruhan desain skematik, sebenarnya terdapat semacam ambiguitas visual yang tampak dari bangunannya karena fungsi ruangan antara laboratorium dan institusi pendidikan bercampur baur. Perhatian terhadap isu ini telah dipertimbangkan agar tiap-tiap divisi dalam kompleks tidak mengalami masalah satu sama lain.

Bangunan di tengah berisi ruang perkuliahan (*collegezaal*). Gedungnya memiliki lantai bertingkat, sedangkan dinding sampingnya dilengkapi dengan pelat peredam suara. Dua ruang depan sayap masing-masing ditempati oleh laboratorium untuk latihan praktikum yang dapat menampung lebih dari 50 siswa. Di belakang ruang kuliah adalah garasi sepeda dan toilet (WC). Museum higiene bertempat di sayap kiri kompleks gedung. Di belakangnya, terdapat laboratorium dan ruangan yang tertutup

rapat yang digunakan sebagai kandang berbagai hewan percobaan. Sayap kanan terdiri dari aula besar, laboratorium praktikum dan penelitian ilmiah, serta ruang sterilisasi instrumen yang terletak di belakang laboratorium.

Di sayap tenggara, terdapat ruangan dan laboratorium untuk salah satu asisten, serta laboratorium untuk menyiapkan media kultur bakteri dan ruang centrifuge. Selain museum higiene, sayap barat laut juga memiliki laboratorium untuk asisten kedua, laboratorium untuk penelitian di bidang malaria dan sejenisnya, ruang statistik dan perpustakaan, hingga lab hama dan ruang observasi hewan. Di belakang kompleks gedung induk, terdapat halaman rumput yang luas tempat hewan-hewan percobaan seperti kuda dan domba merumput. Institut baru ini tidak diragukan lagi terbukti menjadi aset besar bagi GHS.

Luas area gedung *Het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie* sebesar 1850 m², di mana 1.592 m² dialokasikan untuk kompleks utama (**Gambar 5.73**). Adapun luas total seluruh bangunan dalam kompleks ini mencapai ± 8500 m². Semua massa bangunan tetap dipertahankan hanya menggunakan satu lantai, kecuali bilik kabin proyeksi yang terletak di atas koridor penghubung dengan aksesori bangunan. Untuk keperluan pendidikan, disediakan ruang kelas perkuliahan, ruang praktikum, serta museum dengan gudang sepeda dan asesorisnya.



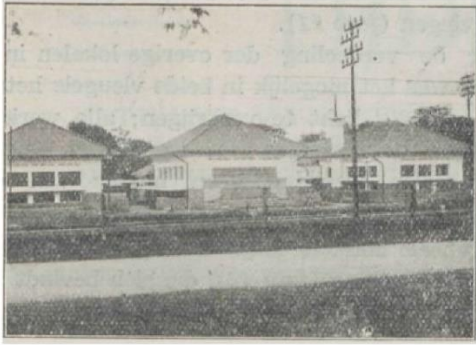
Gambar 5.73 Plattegrond met hoofdgevels.
Sumber: *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* (1933)



Gambar 5.74. Tampak bangunan. Sumber: *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* (1933)

Rak sepeda terletak di bawah kanopi beton bertulang dengan bentang kantilever selebar 2,50 meter di dekat pintu masuk kedua sisi ruang kuliah. Ruang aksesori seperti rak sepeda dan toilet untuk siswa, profesor, staf dan pelayan, terletak di gedung bagian tengah.

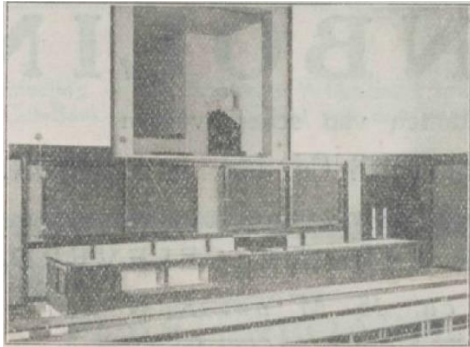
Dengan membagi ruangan laboratorium dan kelas menjadi dua kelompok, dimungkinkan untuk mendapatkan kualitas pencahayaan satu sisi yang sama di kedua sayap. Semua meja kerja diletakkan menghadap dinding bagian barat, sehingga pekerjaan tidak terhalang oleh sinar matahari langsung sepanjang hari.



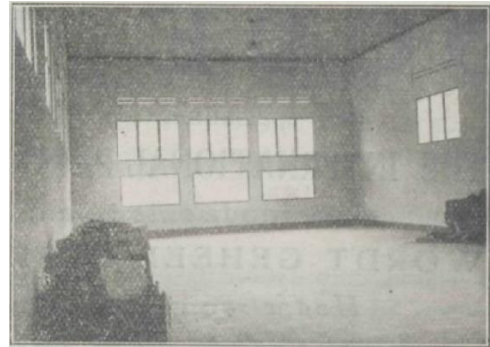
Gambar 5.75. Tampak luar Pegangsaan



Gambar 5.76. Laboratorium praktikum



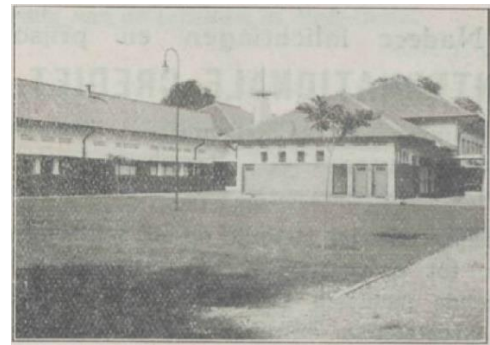
Gambar 5.77 Kelas dan kabin proyeksi



Gambar 5.78 Museum



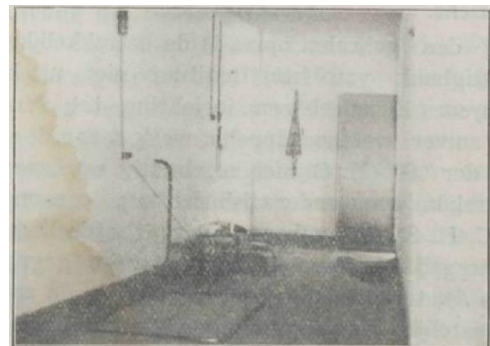
Gambar 5.79 Ruang kelas podium



Gambar 5.80 Achteraanzicht



Gambar 5.81 Laboratorium praktikum



Gambar 5.82 Kabin proyeksi

4.3 Laboratorium Bakteriologi bagi Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan

Sejarah pendirian Yayasan Ulang Tahun Ratu Wilhelmina berawal dari peringatan 25 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina pada tahun 1923 dan diresmikan pada tanggal 29 Maret 1924. Seiring dengan kebijakan Politik Etis pemerintah kolonial Hindia-Belanda, yayasan ini bertujuan mengembangkan penelitian di bidang pengendalian penyakit publik dengan mengelola dana abadi ±450.000 gulden.

Sepanjang tahun 1924-1942, sejumlah besar hibah diberikan untuk meneliti trakoma, tuberkulosis, kusta, malaria, dan aklimatisasi yang diderita penduduk di daerah tropis. Yayasan juga mendanai pembangunan dan pengadaan Institut Ratu Wilhelmina yang kini menjadi gedung laboratorium Mikrobiologi UI.

Bangunan gedung laboratorium bakteriologi pertama kali diserahkan kepada Fakultas Kedokteran atau Sekolah Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hoogeschool*) pada bulan Maret 1933 untuk dimanfaatkan sebagai tempat praktikum, namun peresmiannya baru diselenggarakan pada 18 Juli 1933. Dilansir dari buku dies natalis Fakultas Kedokteran, peresmian institut dilakukan di hadapan eks. Gubernur-Jenderal. Jumlah mahasiswa baru yang terdaftar dalam angkatan 1932-1933 saat itu sebanyak 68 orang; yang terdiri dari 11 orang Eropa, 31 orang Tionghoa peranakan, dan 26 orang pribumi. Jumlah siswa terus meningkat, terhitung sejak tahun ajaran 1927-1932 berturut-turut sejumlah 20, 21, 26, 53, 59, hingga 68 orang.

Saat peresmian gedung tanggal 18 Juli 1933, di hadapan Gubernur Jenderal dan atas nama Yayasan Ratu Wilhelminia, Dr. J. W. Meyer Ranneft memindahkan Institut Kebersihan dan Bakteriologi Ratu Wilhelmina untuk Negara. Setelah itu, beberapa guru besar Fakultas Kedokteran menyampaikan pidato sambutannya. Prof. dr. E.W. Walch selaku direktur institut dan profesor bidang hygiene di Fakultas Kedokteran Batavia yang terlibat dalam proses perancangan dan pembangunannya berpidato tentang pentingnya pemahaman kebersihan modern, dengan menyebut agama Islam sebagai "sekutu suci" karena ikut mengajarkan menjaga kesucian dan

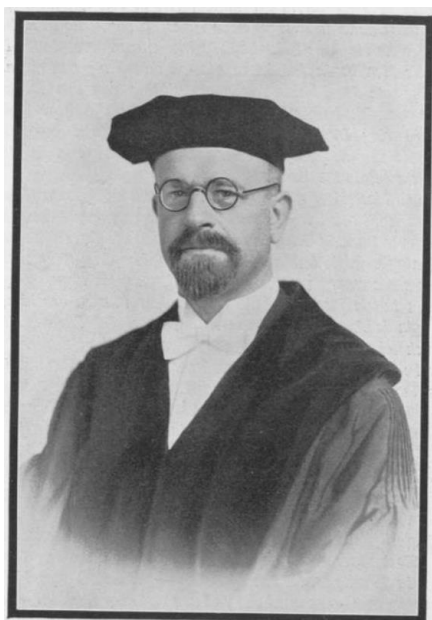
kebersihan bagi umatnya yang membentuk mayoritas penduduk Hindia-Belanda. Setelah sambutan, Gubernur-Jenderal diajak berkeliling ke gedung baru tersebut.



Gambar 5.83 Peresmian gedung bakteriologi dalam *Bredasche courant*, 19 Juli 1933

Setahun lebih berselang, dr. Walch tiba-tiba wafat di usianya yang relatif muda (44 tahun) karena bencana Uiver pada Desember 1934. Dalam sebuah obituari, C. Bonne selaku ketua fakultas sekolah kedokteran GHS (1931-1932) dan redaktur jurnal *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* menyatakan sosok Prof. dr. E.W. Walch berkontribusi dalam kesehatan masyarakat Hindia-Belanda. Walch memulai karir sebagai dokter perusahaan di pantai timur Sumatra tahun 1919 dan lulus dari Johns Hopkins School of Hygiene bergelar doktor di bidang kesehatan masyarakat.

Ia kemudian menjabat sebagai kepala kontrol malaria di dinas kesehatan hingga tahun 1931 dan dipindahkan ke Laboratorium Medis. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat (*Provinciale Raad*) dan ketua komisi kesehatan Batavia (*Gezondheidscommissie*). Untuk menghormati dan mengenang jasanya, dibuatkan plakat penghargaan yang diresmikan di gedung bakteriologi pada 26 November 1935 oleh "Komite Dana Walch".



Gambar 5.84 Potret dr. E. W. Walch



Gambar 5.85 Dr. A. Marseille achter zijn schrijftafel in het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie, Batavia (Mei 1939). Sumber: Tropenmuseum inv.nm. TM-60038165

Laboratorium bakteriologi bekerja sama dengan lembaga penelitian kusta atau lepra (*Koningin Wilhelmina Instituut voor Lepra Onderzoek*) untuk mengadakan penelitian dan konferensi ilmiah kusta pertama kalinya di Hindia-Belanda dengan mendatangkan para dokter ahli seantero Nusantara, baik dari kalangan dokter Eropa-Belanda maupun kalangan dokter pribumi ke Batavia pada tahun 1936.

Institut ini juga rutin mempublikasikan berbagai hasil penelitian bakteriologi dalam media jurnal *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* secara berkala. Setelah rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945 hingga ketika institut berada di bawah nama *Universiteit van Indonesië* dan *Eijkman Institute* tahun 1946, nama media jurnal berubah menjadi *Medisch Maanblad* dan dikelola oleh *Vereniging tot bevordering van Geneeskundige Wetenschappen in Ned.-Indië*.



Gambar 5.86 *Onderzoek door Hasim en Warsa in het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie, Batavia (circa 1939). Sumber: Tropenmuseum TM-60038166*



Gambar 5.87 *Hygiëne Centrum van de Studiewijk, Batavia (circa 1939). Sumber: Tropenmuseum TM-60038170*



Gambar 5.88 *Het museum van het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie, Batavia (1930-1939). Tropenmuseum inv. nm. TM-60038167*



Gambar 5.89 *Onderzoek door Warsa en Soardiman in het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie, Batavia (circa 1939). Sumber: Tropenmuseum inv. nm. TM-60038168*

4.4. Laboratorium Bakteriologi Jelang Kemerdekaan sebagai Ruang Diskusi dan Perjuangan Kaum Terpelajar (1942-1945)

Menurut catatan arsip Belanda, kegiatan yayasan di institut bakteriologi dihentikan sementara pada tahun 1942 karena berlangsungnya pendudukan Jepang di Hindia-Belanda. Di masa itulah justru menjadi titik balik perjuangan kaum intelektual bumiputra, khususnya pelajar sekolah kedokteran di Batavia, yang semakin giat mendiskusikan berbagai narasi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.

Setelah mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari Sukarno-Hatta sebagai golongan tua soal usulan proklamasi kemerdekaan secepatnya pascajatuhnya Jepang akibat serangan bom atom Nagasaki-Hiroshima, pada 14 Agustus 1945 malam sekitar pukul 20.00 WIB para pemuda berkumpul di laboratorium bakteriologi dan sekolah kedokteran di Jalan Pegangsaan Timur 17. Menurut Rushdy Hoesein, pertemuan pemuda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar itu berlangsung di sebuah ruangan atau gedung sekitar halaman belakang lingkungan ini.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Chairul Saleh. Dalam tulisan Adam Malik *Riwayat Proklamasi 17 Agustus (1956)*, topik pembicaraan utama yang dibahas saat itu adalah sikap yang perlu diambil supaya rakyat Indonesia dapat menyatakan kemerdekaannya sendiri dan bukan sekadar "hadiah", serta bagaimana menentukan sikap terhadap Sukarno-Hatta.

Akhirnya diputuskan bahwa para pemuda akan bernegosiasi kembali dengan Sukarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Wikana dan Darwis dikirim untuk menyampaikan hal itu sekali lagi ke Sukarno di rumahnya Jalan Pegangsaan nomor 56. Proses ini ternyata belum selesai, karena para pemuda kembali mengadakan perundingan di Asrama BAPERPI pada tanggal 15-16 Agustus 1945.

Pengkajian Data "Kawasan Menteng Jilid 2";
Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan



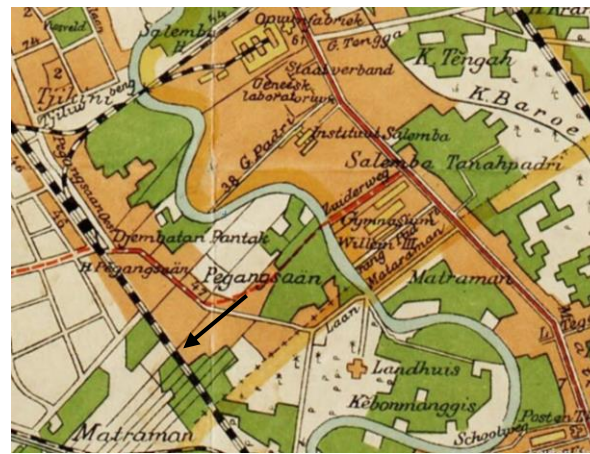
1897



1911



1914



1919



1921



1945

Gambar 5.90 Letak *Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie* (1897-1945).

Sumber: Leiden University Libraries

4.5. Gedung Laboratorium Bakteriologi Kini

Saat ini, bangunan gedung *Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie* yang terdiri dari laboratorium bakteriologi dan sekolah kedokteran telah menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, khususnya Bagian Mikrobiologi, Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas, dan Program D-3 Perumahsakitan. Secara umum, susunan ruangnya masih menunjukkan keaslian bentuk sesuai rancangan awal desain tahun 1932, dan gedung-gedungnya masih digunakan dan terpelihara dengan baik.



Gambar 5.91 Situasi kompleks gedung Mikrobiologi UI saat ini (Mei 2022)



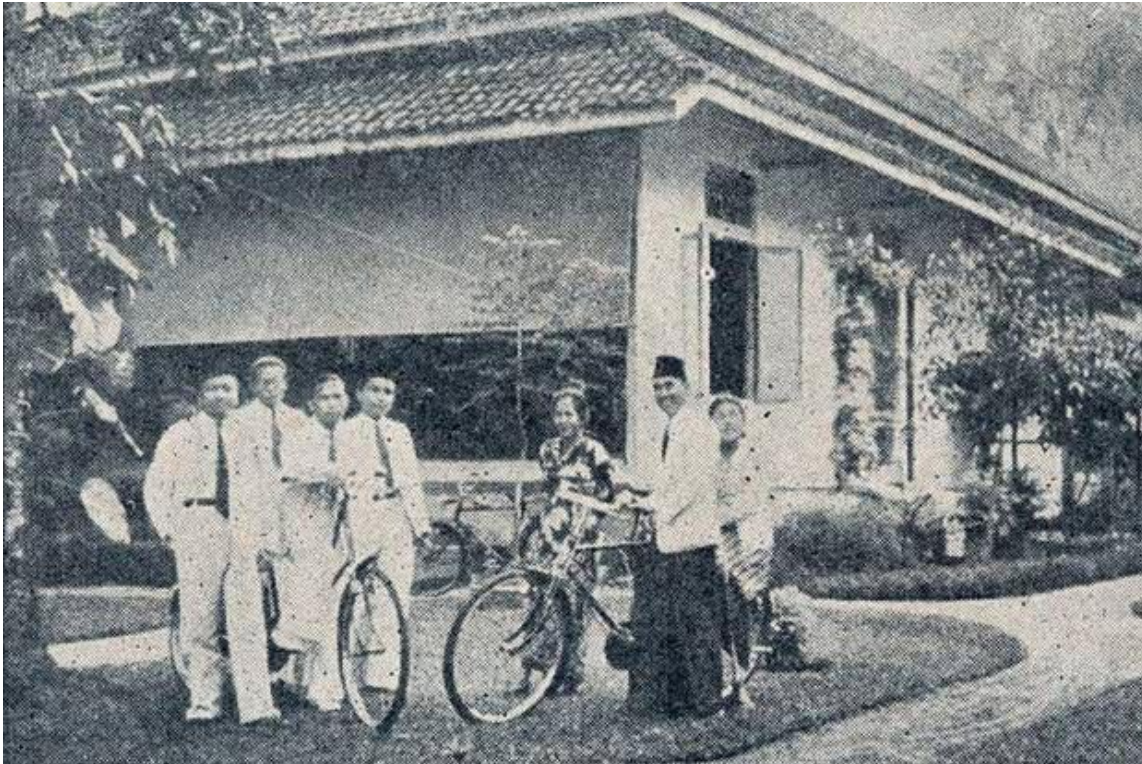
5. Taman Proklamasi (Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta)

5.1. Sejarah Taman Proklamasi

Sejarah rumah proklamasi dimulai sejak kepulangan Soekarno dari pengasingan di Bengkulu, pada 1942, setelah kekalahan Belanda dari Jepang. Kedatangan Jepang ke Indoensia membuat Gubernur Jendral Hindia Belanda, Hebertus Johannes van Mook kabur ke Australia, pada 6 Maret 1942. Lima hari sebelumnya, pasukan Jepang mulai mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Banten, Indramayu, dan Bojonegoro, pada 1 Maret 1942. Belanda sendiri memutuskan tidak mempertahankan Batavia dan menyatakan sebagai kota terbuka, sehari sebelum van Mook kabur, 5 Maret 1945.

Memanfaat situasi ini, Soekarno memutuskan untuk meninggalkan Bengkulu, tempat ia diasingkan selama empat tahun, yaitu sejak 1938 hingga 1942 (foto 1). Kepulangannya tidak mudah. Untuk menghindari penangkapan, Soekarno ikut temannya selama di Bengkulu, HM Azharie. HM Azharie adalah saudagar asal

Palembang yang sering bolak balik Palembang Bengkulu. Soekarno dibawa Azharie ke rumahnya di Kampung Laut Perigi 2 Ulu untuk sembunyi. Kisah ini dituturkan oleh HM Azharie, Nur Ellis kepada media sindonews, pada 2020.



Gambar 5.92 Soekarno ketika dalam pengasingan di Bengkulu

Setelah tiga hari sembunyi, Soekarno bersama istrinya Inggid dan delapan orang lainnya, kemudian kembali ke Jakarta melalui laut. Rombongan Soekarno menggunakan kapal kecil yang panjang delapan meter dengan mesin kecil menuju Pulau Jawa. Setelah berlayar selama empat hari empat malam, akhirnya rombongan Soekarno berlanah di Pasar Ikan. Soekarno disambut oleh mantan iparnya, Anwar Tjokroaminoto, putra dari HOS Tjokroaminoto. Anwar menyambut Soekarno bersama beberapa sahabat dekat Soekarno dan wartawan.

Soekarno sangat bahagia saat tiba di Pasar Ikan. Ini terungkap dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adam, "Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia", (1966). Bung Karno mengatakan: "Kawasan itu disesaki kios-kios yang menjual hasil laut. Airnya kotor. Daun-daunan, kepala ikan, dan sampah terapung di

permukaan air. Bau amis dari ikan mati memenuhi udara. Namun, selagi aku dibantu menaiki anak tangga dari batu yang menuju ke daratan, aku berpikir, 'Inilah pemandangan paling indah yang pernah kulihat dalam hidupku',"

Setibanya di Jakarta, Soekarno menempati rumah di kawasan Menteng. Dalam bukunya, Cindy Adam mengutip ucapan Soekarno: "Jepang telah menyediakan sebuah rumah bertingkat dua dan manis potongannya, terletak di sebuah jalan raya Jakarta". Rumah yang manis, namun Soekarno tidak terlalu menyukainya. Hal itu tergambar dari ucapan istrinya Inggid, seperti yang dituliskan oleh Cindy Adam. Bu Inggid mengatakan bahwa suaminya tidak senang naik turun tangga di rumah itu. Rumah bertingkat dua itu berada di Oranje Boulevard, Menteng, (kemudian dipastikan posisinya di Jalan Diponegoro Nomor 11).

Ketidak nyamanan ini membuat Soekarno pindah rumah. Ia ingin tinggal di rumah yang lebih besar dengan halaman yang luas agar dapat menerima rakyat banyak. Sejarah mencatat bahwa Soekarno kemudian menempati rumah dengan halaman luas di Jalan pegangsaan Timur no.56 (Eduard Lukman, Kompas 2021). Rumah yang kelak menjadi saksi sejarah peristiwa terpenting di Indonesia, karena di teras rumah ini lah Soekarno didampingi Mohammad Hatta, disaksikan para pejuang dan para pemuda, menyatakan kemerdekaan Indonesia. (foto 5.93)



Gambar 5.93. Rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 berhalaman luas.

Terdapat dua pendapat berbeda tentang asal usul rumah Pegangsaan Timur ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa rumah ini milik saudagara kaya Arab Indonesia, Faradj bin Said bin Awadh Martak atau disingkat Faradj Martak Pendapat (Ensiklopedia Dunia: Faradj Martak dan Yosafat Diva Bayu Wisesa, 2021). Faradj Martak lahir di Hadramaut pada tahun 1897 sebagai putra ketiga dari empat bersaudara, yang hijrah ke Indonesia, pada 1940.

Faradj mempunyai putra yang bernama Ali bin Faradj Martak, yang dikenal sebagai sahabat dengan Soekarno. Faradj Martak kemudian memberikan rumahnya kepada Soekarno. Pemerintah kemudian memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang ditanda tangani oleh Ir. Mananti Sitompoel selaku Menteri Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Indonesia, pada 14 Agustus 1950.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa rumah itu pemberian Jepang, melalui ahli proganda Jepang di Indonesia, Hitoshi Shimizu. Pendapat ini dinyatakan oleh seorang pelaku sejarah Chairul Basri. Dalam bukunya 'Apa yang Saya Ingat' dan artikel di Harian Kompas "Merah Putih, Ibu Fatmawati, dan Gedung Proklamasi" (Kompas, 16 Agustus 2001), Chairul Basri mengisahkan bahwa ia diminta Hitoshi Shimizu mencarikan rumah untuk Soekarno dan keluarganya. Bersama seorang teman, Adel Sofyan, ia naik sepeda berkeliling Menteng.

Chairul Basri, kini pensiunan TNI AD dengan pangkat Mayor Jendral dan pernah bertugas sebagai Sekretaris Jendral Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1966-1979), menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan Soekarno, yaitu halaman depan luas sehingga bisa menampung orang banyak, di Jalan Pegangsaan Timur no 56. Rumah itu milik orang Belanda yang bernama Baron van Asbeck yang sudah diinternir Jepang. Istrinya yang masih tinggal di rumah itu diminta mengosongkan rumah dan pindah ke Jalan Lembang.

Sumber-sumber lain, yaitu koran-koran Belanda menyebutkan penghuni rumah Pegangsaan Timur sebelum tahun 1942. Koran Belanda *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* terbitan 24 Oktober 1933 menyebutkan bahwa yang menghuni rumah Pegangsaan Timur no.56 adalah P. Anna, sementara koran yang sama edisi 11 April 1934 menulis penghuninya adalah Tahun 1934: L.C.C Suringa (Azings Venema). Koran *Bataviaasch Nieuwsblad*, terbitan 10 Mei 1938, 9 Januari 1941, dan 16 Januari 1941, menulis bahwa penghuni rumah itu adalah Nyonya Feith.

Tentang kepemilikan rumah ini, Jo Masdani, wanita pejuang kemerdekaan, pernah mengatakan bahwa ketika masih kecil, ia sering bermain-main di halaman rumah itu bersama teman-temannya sepulang sekolah. "Orang Belanda penghuninya tidak pernah melarang dan membiarkan kami bermain-main di sana," kata Jo Masdani dalam salah satu wawancaranya dengan Kompas, pada tahun 1976, seperti yang ditulis kembali oleh Mulyawan Karim, pada artikelnya di Kompas, 18 Agustus 2009..

Berdasarkan kesaksian Chairul Basri dan Jos Madani serta beberapa koran Belanda yang terbit, dapat dipastikan bahwa penghuni rumah Pegangsaan Timur no.56 Sebelum Soekarno adalah orang-orang Belanda.

Soekarno akhirnya menempati rumah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Pada awal kepindahan Inggit Ganarsih masih bersama suaminya, tapi ia memilih kembali ke Bandung setelah Soekarno menikahi Fatmawati. Bandung adalah kota asal Inggit Ganarsih. Di kota itulah ia bertemu dengan Soekarno yang saat itu sedang kuliah di ITB. Sedangkan Fatmawati dikenal Soekarno saat menjalani masa pengasingan di Bengkulu. Bersama Fatmawati, Soekarno menempati rumah itu.

Rumah Pegangsaan Timur ini menjadi saksi sejarah Kemerdekaan Indonesia. Di teras rumah, Soekarno didampingi Mohammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di sini pula, Fatmawati menjahit bendera Merah Putih pada malam sebelum kemerdekaan dikumandangkan oleh suaminya. Dan di halaman rumah ini, untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan. Peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia ini, yang dihadiri tokoh-tokoh pejuang dan banyak pemuda, terjadi pada Jumaat, 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 pagi.



Gambar 5.94 Tugu Peringatan Proklamasi di halaman rumah Pegangsaan Timur 56.

Foto: IPPHOS

Setahun setelah merdeka, tepatnya pada 17 Agustus 1946, berdirilah Tugu Peringatan Satoe Tahoen Kemerdekaan di halaman rumah Pegangsaan Timur 56. Tugu yang digagas kaum wanita pejuang ini diresmikan oleh Perdana menteri Sutan Sjahrir (foto 3 dan 4). Tugu ini sempat dinamai Tugu Proklamasi.



Gambar 5.95 Perdana Menteri Sutan Sjahrir meremikan Tugu Peringatan Proklamasi.
(foto IPPHOS)

Sejak saat itu, setiap 17 Agustus, Taman Proklamasi dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk meletakkan bunga dan menghormati prajurit yang gugur. Upacara tersebut juga dihadiri oleh tamu dari negara lain (foto 5).



Gambar 5.96 Presiden Soekarno meletakkan karang bunga di Tugu Proklamasi.

Rumah Pegangsaan Timur 56 kemudian disebut sebagai Rumah Proklamasi, karena tempat Soekarno memproklamkan Kemerdekaan Indonesia. Rumah bersejarah ini kini sudah tidak ada lagi. Sudah rata dengan tanah. Presiden Soekarno lah yang memerintahkan pembongkaran Rumah Proklamasi, juga Tugu Peringatan Satoe Tahoen Proklamasi Indonesia, pada Agustus 1960.

Presiden Soekarno kemudian membangun sebuah tugu yang tingginya 17 meter, di tempat ia berdiri ketika membacakan naskah proklamasi. Tugu berbentuk silinder ini dihiasi petir pada puncaknya, sehingga dikenal sebagai Tugu Petir. Presiden Soekarno sendiri beranggapan bahwa Tugu ini lah yang disebut sebagai Tugu Proklamasi, bukan Tugu Peringatan Satoe Tahoen Proklamasi. Soekarno juga membangun gedung besar seluas 3.000 meter persegi di belakang Tugu Petir. Gedung ini kemudian disebut sebagai Gedung Pola atau Gedung Perintis Kemerdekaan.

Atas usul Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, pada 1968, Tugu Peringatan Satoe Tahoen Proklamasi kemudian dibangun kembali di tempat aslinya. Bang Ali, nama akrab Ali Sadikin, mengajukan proposal yang disetujui pemerintah. Tugu itu kemudian diresmikan pada 17 Agustus 1972. Banyak tokoh yang hadir, antara lain proklamator Mohammad Hatta. Kini, di Taman Proklamasi ini terdapat empat

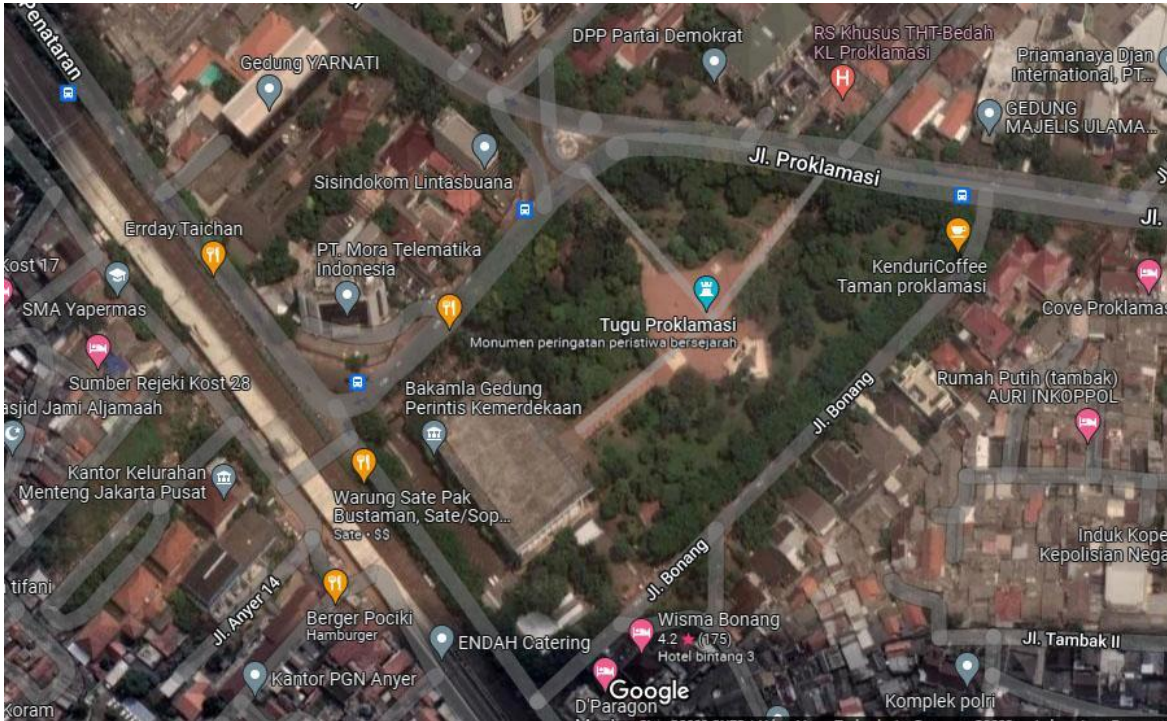
monumen yang mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu, yaitu Tugu Peringatan Proklamasi, Tugu Petir, Gedung Pola, dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Dan nama jalan pun sudah diubah menjadi Jalan Proklamasi, untuk mengingatkan semua rakyat Indoensia kepada peristiwa terpenting dalam sejarah berdirinya Negara Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan.

5.2. Tinjauan Arsitektur Taman Proklamasi

Taman Proklamasi berada di Jalan Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Di sinilah, dulu berdiri rumah tempat Soekarno Bersama Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dihadiri tokoh pejuang dan para pemuda, pada 17 Agustus 1945. Di rumah Jalan Pegangsaan Timur no. 56 ini juga Ibu Fatmawati, istri Soekarno, menjahit bendera yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah itu, pada Agustus 1960. Kini di lokasi rumah sudah berdiri sebuah tugu, dibangun tepat di tempat Soekarno berdiri saat membacakan naskah proklamasi, pada 17 Agustus 1945.

Taman Proklamasi telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya oleh Gubernur DKI Jakarta, pada 14 Januari 2022. Ditetapkan sebagai **situs** cagar budaya karena di taman ini terdapat struktur, bangunan, dan benda cagar budaya. Di dalam taman ini memang terdapat Tugu Proklamasi, Tugu Peringatan Setahun Proklamasi, dan Gedung Pola atau Gedung Perintis Kemerdekaan.

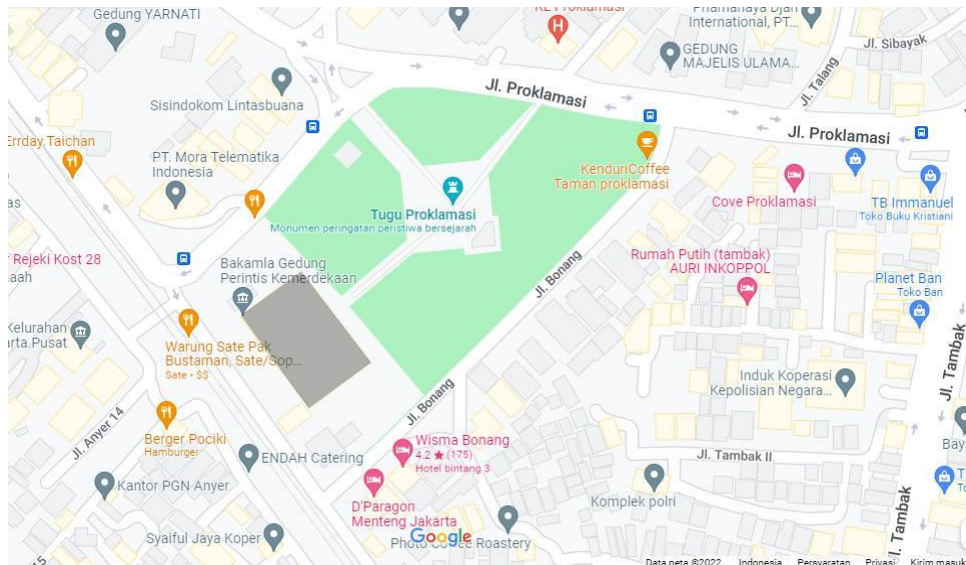
**Pengkajian Data “Kawasan Menteng Jilid 2”;
Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan**



Peta 1: Taman Proklamasi, Pegangsaan, Menteng. google.co.id/maps

Pada peta terlihat Taman Proklamasi terletak diantara beberapa jalan, yaitu:

- Utara : Jalan Proklamasi
- Timur : Jalan Bonang
- Selatan : Jalan Bonang
- Barat : Jalan Penataran



Peta 2. Taman Proklamasi berbatasan dengan Jalan Proklamasi, Jalan Bonang, dan Jalan Penataran. sumber google.co.id/maps

Situs Cagar Budaya Taman Proklamasi terletak pada titik koordinat (peta 3):

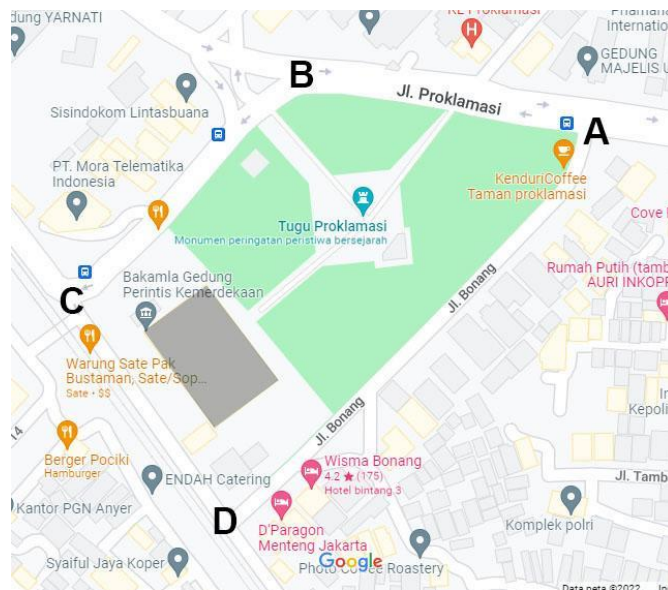
Titik A: -6.202608, 106.847785

Titik B: -6.202411, 106.846339

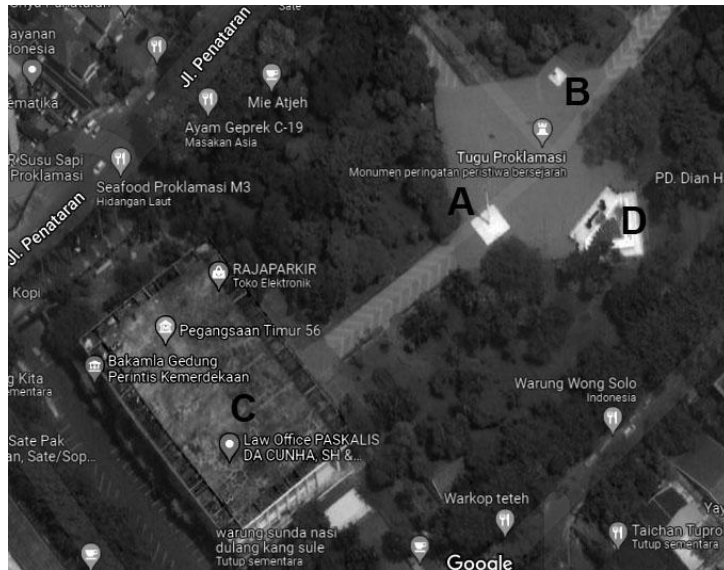
Titik C: -6.203484, 106.845210

Titik D: -6.204574, 106.845965

Taman Proklamasi berbentuk seperti trapesium, dengan sisi miring berada di utara (lihat peta 2 dan 3). Taman dengan luas sekitar 3,46 ha (tiga koma empat puluh enam hektar) menyimpan sejarah penting negara Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan. Di taman ini terdapat beberapa tinggalan sejarah, yaitu: tugu, monumen, dan gedung, yang dibuat untuk memperingati hari bersejarah itu (lihat peta 4 dan foto 6).



Peta 3: Koordinat Taman Proklamasi. google.co.id/maps



Peta 4: Sebaran tinggalan bersejarah di Taman Proklamasi. Tugu Petir (A), Tugu Peringatan Proklamasi (B), Gedung Pola (C), dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta (D). Diolah dari [google.co.id/maps](https://www.google.co.id/maps).



Gambar 5.97 Monumen Proklamator Soekarno-Hatta, Tugu Proklamasi, dan Gedung Perintis Kemerdekaan di Taman Proklamasi. (Foto: Mahanizar Djohan)

Pengelolaan Taman Proklamasi di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis Monumen Nasional (UPT Monas). Unit Pelaksana Teknis ini berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan –sebelum dipisah menjadi Dinas kebudayaan dan Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada Januari 2020–. UPT dibentuk dan ditugaskan untuk mengelola Kawasan Monumen Nasional, juga Tugu Proklamasi.

5.2.1 Tugu Proklamasi

Tugu Proklamasi dikenal dengan sebutan Tugu Petir karena di puncaknya terdapat hiasan petir. Tidak diperoleh penjelasan atau catatan sejarah yang menulis kenapa hiasan petir yang dipilih. Tugu Proklamasi berbentuk pilar silendris setinggi 17 meter dengan diameter bagian bawah 75,5 Cm. Tugu berada di atas dua pedestal berbentuk persegi atau bujur sangkar. Pedestal bawah berukuran 8 m x 8 m dan pedestal atas ukurannya 4 m x 4 m. Tugu ini terletak pada koordinat -6.203117, 106.846558° (foto 6).

Di bagian bawah tugu dipasang sebuah plakat logam yang bertuliskan "Disinilah Dibatjakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 djam 10.00 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta". Dulu, sebelum dibongkar, tempat tegaknya tugu petir adalah teras rumah Soekarno (foto 7).



Gambar 5.98 Tugu Proklamasi atau Tugu Petir. (Foto: Mahanizar Djohan)



Gambar 5.99: Plakat logam ditempel di bawah Tugu Proklamasi (Foto: Mahanizar Djohan).

Saat diwawancarai oleh media BBC. Chandrian Attahiyat –seorang Arkeolog dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta– mengatakan bahwa ia pernah melakukan pengkajian dan penggalian di lokasi rumah Pengangsaan Timur no. 56, pada tahun 2000. Candrian, kini anggota Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, menemukan pondasi sudut rumah di belakang Tugu Petir. Setelah penggalian, pondasi itu ditutup kembali dan di beri patok penanda.

Sampai saat ini alasan pembongkaran rumah bersejarah itu masih tidak jelas. BBC mewawancarai, Rusdhy Hoesein, seorang sejarawan yang ketika kecil pernah datang ke rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56. Rusdy Hoesen berpendapat bahwa pembongkaran terjadi karena Soekarno ingin membangun Gedung Pola atau Gedung Perintis Kemerdekaan di belakang rumah. Rumah akan mengganggu pemandangan dari arah depan (Heyder Affan, BBC News, 1 Maret 2021).

BBC juga mengutip pendapat senada yang dikemukakan oleh Bambang Eryudhawan, seorang arsitek yang peduli pelestarian bangunan bersejarah. Bambang Eryudhawan, kini termasuk anggota Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, menambahkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah Indonesia untuk membebaskan tanah. Pembebasan tanah tidak gampang bahkan untuk keperluan Asian Games 1962, negara (saat itu) harus menggunakan UU Darurat Perang.

5.2.2. Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi

Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi atau Tugu Peringatan Proklamasi merupakan monumen pertama yang dibangun di Jalan Pengangsaan Timur no. 56. Tugu itu diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, pada 17 Agustus 1946, tepat setahun setelah proklamasi Kemerdekaan. Sempat dibongkar oleh Presiden Soekarno, pada Agustus 1960, dan dibangun kembali di tempat aslinya atas usulan Gubernur Ali Sadikin, pada 1972.

Tugu berbentuk Obeliks ini terletak di utara Tugu Petir, pada koordinat - 6.203225, 106.846545. Berdiri di atas pedestal persegi atau bujur sangkar, tugu berdenah persegi tingginya 4,5 m (empat setengah meter) dengan puncak berupa limasan atau piramida. Di salah satu sisinya ditempelkan plakat yang bertuliskan "Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia Atas Oesaha Kaoem Wanita Djakarta". Dan di sisi sebaliknya terdapat dua plakat . Satu plakat berupa salinan teks proklamasi yang dibacakan Soekarno, dan satu plakat berupa gambar peta Indonesia. (foto 8).



Gambar 5.100 Plakat marmer di Tugu Peringatan Proklamasi (foto: Mahanizar Djohan)

Pendirian tugu ini diprakasai oleh sejumlah tokoh wanita Indonesia yang tergabung dalam Pemuda Puteri Indonesia (PPI) dan Wanita Indonesia. Lima di antaranya adalah Johanna "Yos" Masdani Tumbuan, Mien Wiranatakusumah, Zus Ratulangi (putri Sam Ratulangi), Zubaedah, dan Nyonya Gerung (Muhammad Naufal, Nursita Sari, Kompas 2021). Setelah dibongkar Presiden Soekarno, Johanna "Yos" Masdani, bersama Maria Ulfah dan Lasmidjah Hardi, menemui Soemarno Sosroatmodjo, gubernur Jakarta waktu itu, untuk menerima tiga plakat marmer bekas tugu. Yos menyimpannya hingga 12 tahun, kemudian plakat itu dipasang di tugu yang dibangun kembali.

Tugu Peringatan Proklamasi ini telah ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya oleh Gubernur DKI Jakarta, pada September 2021, atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta. Dalam Surat Keputusan Gubernur itu disebutkan bahwa tugu yang sekarang berdiri adalah hasil rekonstruksi tugu asli yang dibangun, pada tahun 1946.

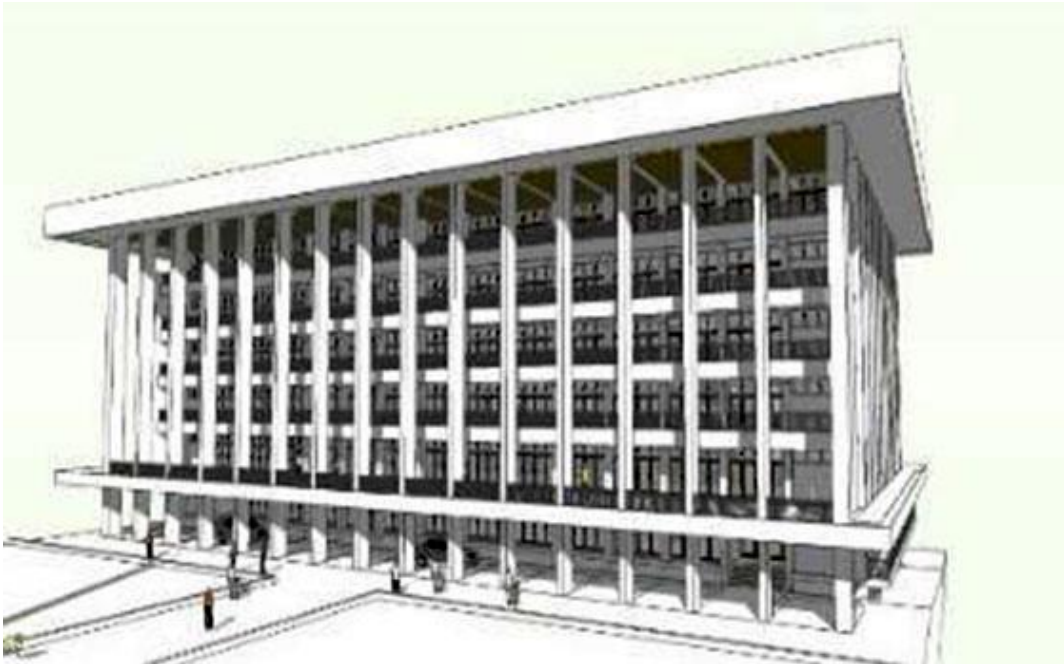


Gambar 5.101 Tugu Peringatan Proklamasi (Foto: Mahanizar Djohan)

5.2.3. Gedung Pola

Presiden Soekarno melakukan pencangkulan sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Pola, pada 1 Januari 1961. Gedung yang nama panjangnya adalah **Gedung Pola Rencana Pembangunan Semesta** —sekarang disebut sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan— dibangun pada persil atau tanah tempat berdirinya Rumah Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur no.56. Tidak cukup dengan luas tanah, maka dilakukan pembebasan tanah dan rumah lain di samping kiri dan

kanan rumah bersejarah itu. Soekarno ingin membangun gedung yang megah dan besar (foto 10).



Gambar 5.102: Gambar perencanaan Gedung Pola

Gedung yang luasnya 3.006 meter persegi, terletak pada koordinat -6.203651, 106.845960, ini rencananya akan dijadikan sebuah museum atau galeri yang memperlihatkan rencana-rencana pembangunan fisik yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Rencana-rencana pembangunan fisik itu adalah pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung besar bertingkat tinggi.

Diarsiteki oleh Friedrich Silaban, Gedung Pola merupakan bangunan tunggal berdenah persegi panjang. Bangunan ini memperlihatkan perpaduan gaya arsitektur modern *Stripped Classics* dengan Arsitektur Tropis. Gaya *Stripped Classics* ditunjukkan oleh jajaran kolom-kolom besar yang berfungsi sebagai penopang beranda dan atap bangunan. Gaya arsitektur Tropis ditunjukkan oleh penggunaan teritis atap yang lebar sebagai penahan sinar matahari dan tampias hujan (Lo Angela, 2014: 96)



Gambar 5.103 Gedung Pola dibangun di belakang Tugu Proklamasi. Foto Mahanizar Djohan

Tinggi kolom-kolom besar yang berada di luar Gedung Pola mencapai 20,50 meter. Dari luar, terlihat Gedung Pola terdiri atas kotak-kotak atau grid-grid. Kotak-kotak tersebut berukuran 4 m x 3 m, 4 m x 7 m, dan 4 m x 14 m (foto 12 dan 13. Permainan jarak antar kolom menimbulkan kesan statis pada tiap lantainya tapi berkesan dinamis secara keseluruhan (Lo Angela, 2014:99).



Gambar 5.104: Gedung Pola (Foto: Mahanizar Djohan)

Gedung Pola terbagi atas dua zonasi, yaitu zona publik dan zona servis. Zona Publik untuk ruang pameran, sementara Zona Servis untuk fungsi pelayanan. Ruang Gedung Pola berbentuk linier dengan keletakan sirkulasi pada bagian pinggir, yaitu di dinding luar bangunan. Bagian tengah terdapat area void atau ruang terbuka. Terdapat *mezzanine* untuk memberikan kesatuan antar lantainya. *Mezzanine* dapat dikatakan sebagai ruang tambahan yang letaknya antara lantai dan plafon atau di antara lantai satu dan dua pada sebuah bangunan bertingkat.

Lo Angela dalam penelitiannya tentang monumentalitas Gedung Pola menyebutkan bahwa bangunan Gedung Pola dengan skala bangunan yang besar dan warnanya yang kontras di antara lingkungan menjadikan Gedung Pola monumental. Keberadaannya di lingkungan yang mayoritas bangunan rendah, menjadikan Gedung Pola sebagai hirarki tertinggi di Taman Proklamasi dan menjadi *focal point* (Lo Angela, 2014:105). Dalam arsitektur dan desain interior, *focal point* berarti elemen yang lebih menarik atau dramatik dibanding elemen lainnya (Novianti Putri, 2021).

Monumentalitas dalam arsitektur adalah kualitas atau keadaan sebuah karya arsitektur sebagai sebuah bangunan monumental yang mengandung pesan atau makna. Pesan atau makna yang dikandung bertujuan sebagai simbol untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah atau tokoh penting yang dapat dilihat dari aspek fisik bangunannya. Sebuah bangunan dapat dikatakan monumental jika memiliki tatanan yang mencirikan monumentalitas (Lo Angela, 104-105)

Lebih lanjut Angela mengatakan bahwa rancangan sistem struktur yang unik dan berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitar menunjukkan hirarki Gedung Pola yang lebih tinggi dibanding bangunan lainnya. Penggunaan material beton untuk memberikan citra bangunan modern dan tahan lama agar monumentalitas Gedung Pola dapat bertahan lama dan tetap dikenang oleh masyarakat.

Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan Gedung Perintis Kemerdekaan atau Gedung Pola sebagai Bangunan Cagar Budaya, pada 12 Oktober 2021. Gedung yang kini dipakai sebagai kantor Bakamla dan sebagian menjadi kantor Yayasan Bung Karno ini, kini seakan terputus hubungannya dengan Taman Proklamasi. Di antara keduanya berdiri pagar yang memisahkan. Pintu masuk Gedung Pola atau kantor Bakamla berada di sudut belakang, di Jalan Penataran.

5.2.4. Monumen Proklamator Soekarno-Hatta

Monumen Proklamator Soekarno-Hatta belum ditetapkan sebagai cagar budaya mengingat usianya belum 50 tahun. Salah satu syarat penetapan Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya, adalah minimal telah berusia 50 tahun. Syarat itu tertulis pada UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010. Monumen berada di bagian Timur Taman Proklamasi, di antara Tugu Petir dan Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi, tepatnya pada koordinat (lihat peta 5):



Peta 5. Koordinat keletakan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta

Titik A : -6.205198, 106.646818

Titik B : -6.203207, 106.866833

Titik C : -6.203196, 106.846888

Titik D : -6.203342, 106.846917

Titik E : -6.203371, 106.866753

Titik F : -6.203326, 106.846748

Titik G : -6.203305, 106.846734

Monumen ini menggambarkan dua tokoh proklamator Soekarno dan Hatta yang berdiri berdampingan. Gestur kedua tokoh penting ini diambil dari foto Frans Mendur yang mengabadikan momen pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno didampingi Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur no.56, pada 17 Agustus 1945. Di antara patung perunggu Soekarno dan Hatta terdapat tablet lempengan perunggu yang bertuliskan naskah proklamasi (Foto 13).



Gambar 5.105. Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. foto: Galeri Nasional

Patung perunggu Soekarno tingginya 4,60 m dan tinggi patung Mohammad Hatta adalah 4,30 m. Soekarno tergambar sedang memegang naskah proklamasi, sementara Mohammad Hatta berdiri dengan tangan dibelakang (foto 14). Di belakang patung terdapat patung monolitik berjumlah 17 buah. Monolit tertinggi berada di tengah dan tingginya 8 meter. Terdapat 45 tonjolan pada air terjun riam. Semua angka itu melambangkan tanggal diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.

Seniman Budiono Soeratno, I. Sardono Sugiyo, Y. Sumartono, Nyoman Nuarta, dan G. Sidharta, merancang monumen yang digagas oleh Presiden Soeharto. Gagasan ini muncul saat Presiden Soeharto meresmikan Gedung Joang '45, pada 1974 dan meresmikan makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, pada 1979. Pembuatannya dilaksanakan pada bulan November 1979-1980 dan diresmikan Presiden Soeharto, pada 16 Agustus 1980.



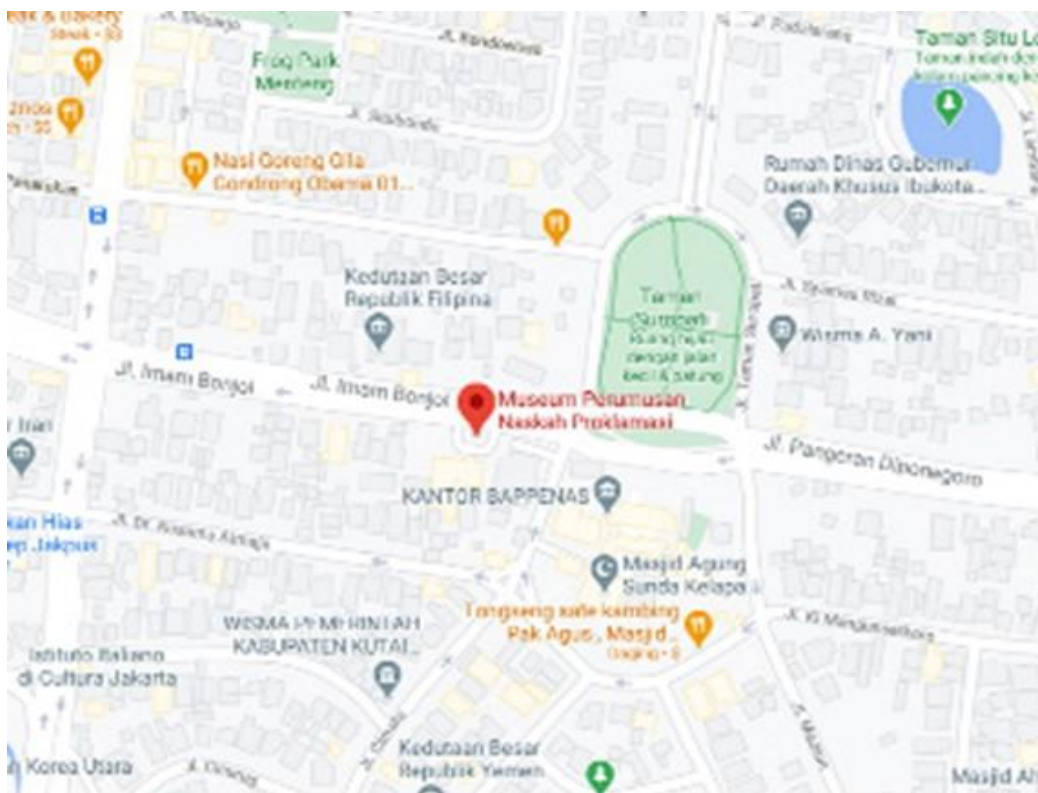
Gambar 5.106. Patung Perunggu Soekarno dan Mohammad Hatta

6. Eks-Kediaman Laksamana Maeda

6.1 Sejarah Eks-Kediaman Laksamana Maeda

Keberadaan Kediaman Laksamana Maeda (saat ini menjadi Museum Perumusan Naksah Proklamasi) ini dulunya dirancang sebagai bangunan “kota taman” pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedung ini dibangun pada 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Sampai akhirnya pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia.

Secara astronomis, keletakannya pada -6.200171 BT dan 106.831196 LS (gambar 1). Rumah ini berbatasan langsung dengan Jl. Imam Bonjol di bagian utara, Gereja Paulus di bagian timur, rumah warga di bagian selatan, dan Kedutaan Saudi Arabia di bagian barat.



Gambar 1.
Lokasi rumah Laksamana Maeda
(Sumber: Google Maps, 2022)

Gambar 5.106. Lokasi Rumah Kediaman Laksamana Maeda (Sumber: Googlemaps, 2022)

Rumah Laksamana Muda Maeda yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, sebagaimana yang termaktub di SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0476/1992 tanggal 24 November 1992. Rumah ini secara administratif kini terletak di Jl. Imam Bonjol no. 1, RT.9/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang berada 8 mdpl.

Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Saat itu, Laksamana Maeda menjabat sebagai seorang Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada 16 Agustus 1945, Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan naskah proklamasi Indonesia. Naskah proklamasi dirancang oleh Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Subardjo, dan Sayuti Melik (juru ketik).



Keberadaan Rumah Maeda pada dasarnya telah dikenal sejak sebelum masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berdasarkan surat ukur No. 955 tanggal 21 Desember 1931, Rumah Maeda pada awalnya dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya Nilmy (*Nederlands Levenzekering Maatschapajj*). Tepat sebelum pendudukan Jepang, Rumah Maeda berfungsi sebagai rumah Konsulat Jenderal Kerajaan Inggris untuk Pemerintah Hindia Belanda. Bangunan Rumah Maeda pada masa Belanda masuk ke dalam rumah di wilayah *Nassau Boulevard* (Nugroho 2019, 65).

Rumah Maeda pada masa pendudukan Jepang menjadi rumah dinas milik Laksmana Muda Tadashi Maeda. Maeda diketahui merupakan pejabat penghubung antara angkatan darat dan angkatan laut Jepang pada masa Perang Dunia II di Indonesia. Selama masa mendiami rumah tersebut, Maeda ditemani oleh beberapa orang. Menurut hasil wawancara terhadap Ny. Satzuki Mishima (alm) (sekretaris bidang rumah tangga Maeda), Rumah Maeda dihuni oleh dua orang sekretaris, staff Maeda dan tujuh orang pembantu pribumi (tiga orang perempuan dan empat

orang laki-laki). Rumah Maeda pada masa pendudukan Jepang juga menjadi tempat yang memiliki peran penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, mengingat naskah proklamasi kemerdekaan ditulis dan disepakati oleh para *founding fathers* kemerdekaan Indonesia pada Rumah Maeda (Nugroho 2019, 65–69).

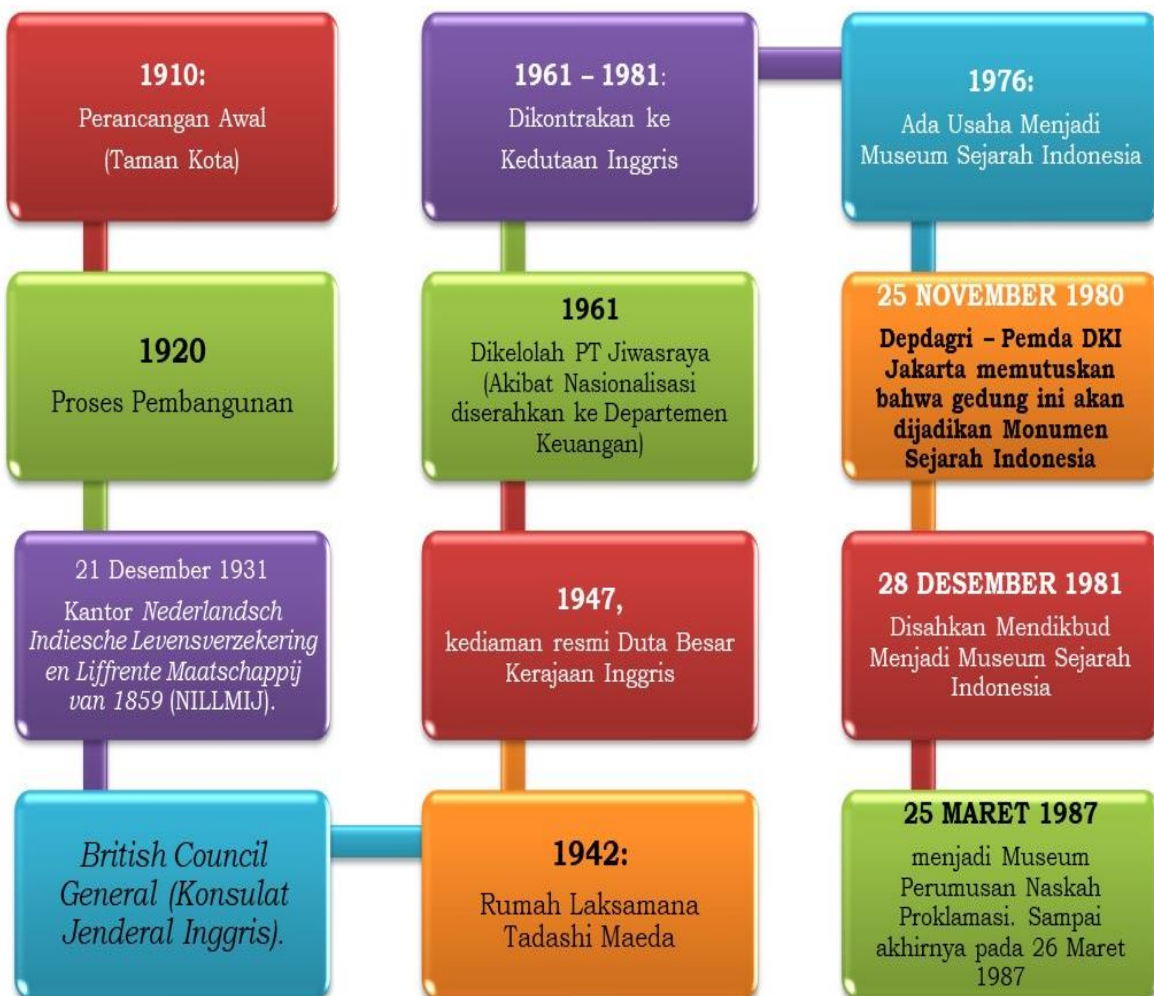
Secara historis, perkembangan Gedung ini selanjutnya berdasarkan dari surat ukur No. 955 Tanggal 21 Desember 1931, pemilik dari gedung ini adalah PT Asuransi Jiwasraya yang dulu bernama *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ). Sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Proklamasi, gedung ini sudah beberapa kali berubah fungsi. Sebelum Perang Pasifik, gedung tersebut dijadikan sebagai *British Council General (Konsulat Jenderal Inggris)*. Kemudian berganti lagi menjadi rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda, setelah Jepang menguasai Indonesia.

Pada tahun 1947, gedung ini berubah fungsi menjadi kediaman resmi Duta Besar Kerajaan Inggris. Terjadinya aksi nasionalisasi terhadap bangsa asing ini membuat pemerintah berniat untuk mengambil alih gedung tersebut. Gedung ini kemudian diserahkan kepada Departemen Keuangan dan dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Pada 1961, gedung ini kemudian dikontrak oleh Kedutaan Inggris selama 20 tahun, sampai tahun 1981. Sebenarnya, sejak tahun 1976, Indonesia sudah berusaha untuk menjadikan gedung tersebut sebagai gedung monumen bersejarah. Pada tanggal 25 November 1980, diadakan rapat Koordinasi Bidang Kesra Departemen Dalam Negeri dan Pemda DKI Jakarta. Hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa gedung ini akan dijadikan Monumen Sejarah Indonesia.

Keputusan ini juga didukung dan diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disahkan pada tanggal 28 Desember 1981. Pengertian museum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Kemudian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerima gedung tersebut dari PT Asuransi Jiwasraya dengan penggantian uang anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam beberapa waktu,

gedung ini dikelola lebih dulu oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Lalu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Nugroho Notosusanto memberikan perintah kepada Direktur Permuseuman untuk segera merealisir gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai akhirnya pada 26 Maret 1987, gedung ini diberikan kepada Direktorat Permuseuman dan dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Perkembangan penggunaan Gedung Eks-kediaman Laksamana Maeda dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



6.2 Tinjauan Arsitektur Bangunan Eks-Kediaman Laksamana Maeda

Halaman depan rumah ini terdapat taman berbentuk setengah lingkaran tepat di sebelah utara rumah. Terdapat sebuah jalan di samping rumah yang menghubungkan halaman depan dengan teras belakang. Arsitek yang merancang desain rumah ini adalah J.F.L. Blankenberg yang berasal dari Jerman. Selain rumah Laksamana Maeda, Blankenberg juga merancang tiga rumah lainnya di sekitar Taman Suropati, yang menjadi rumah-rumah terbesar di Menteng (Heuken and Pamungkas 2001, 88). Ciri khas dari rumah-rumah tersebut adalah atap perisai utama yang tinggi dan agak curam, sekurang-kurangnya di satu sisi sebagian rumah yang sedikit lebih rendah dan kurang lebar menjorok ke luar, balkon dengan *balustrade* tembok atau terali besi terdapat di tingkat dua, deretan lubang angin di bagian atas tembok kamar yang tinggi, jendela di lantai bawah agak panjang dan kadang-kadang menyerupai deretan pintu (gambar 2).



Gambar 5.106 Tampak depan rumah Laksamana Maeda.
(Sumber: Rousthesa, 2022)

Secara arsitektur, seluruh ciri khas yang disebutkan di atas terdapat di rumah Laksamana Maeda. Atap rumah tersebut berbentuk perisai utama yang tinggi dan agak curam dengan sisi di sebelah timur rumah yang lebih rendah dan menjorok ke luar. Balkon rumah dipagari dengan *balustrade* (tembok) dan tralis. Terdapat deretan lubang angin di bagian atas kusen jendela dan jendela di lantai bawah yang panjang dengan tinggi yang hampir serupa dengan pintu masuk.

Pintu masuk rumah Laksamana Maeda awalnya terletak di sebelah barat laut rumah, dengan balkon lantai dua yang menjorok dan membentuk teras kecil atau *onderrit* di depan pintu masuk tersebut. Namun kini, teras kecil tersebut sudah disekat menjadi sebuah ruangan dan pintu masuk tersebut tidak dapat dilalui kembali. Sekarang pintu yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah ini adalah pintu satunya yang berada di utara.

Rumah ini terdiri dari dua lantai. Walau rumah ini termasuk rumah yang terbesar, namun rumah ini memiliki kamar tidur yang sedikit. Kamar tidur di rumah ini hanya terletak di lantai dua. Lantai satu rumah ini terdapat dua ruangan besar yang dijadikan *ontvangkamer* atau ruang resepsi dan ruang makan. Selain itu terdapat pula ruang studi, toilet, dapur dan *denke* (tempat bermeditasi?) (gambar 3). Ruang resepsi merupakan ruang pertama yang dimasuki jika menggunakan pintu masuk yang lama. Ruang ini berukuran 7,1 x 8 m. Di sebelah selatan *ontvangkamer* terdapat toilet yang pintunya berhadapan dengan pintu masuk. Toilet ini berukuran 2,3 x 4,7 m. Di barat ruang resepsi dua buah pintu yang menghubungkan ke dua buah ruang. Ruang pertama, yang terletak di sebelah utara, merupakan ruang studi yang berukuran 6,6 x 4,7 m. Ruang selatan, yaitu ruang makan dihubungkan dengan ruang studi oleh sebuah pintu kaca (gambar 5.107).



Gambar 5.107. Ruang Persepsi.
(Sumber: Dokumentasi Rousthesa, 2020)

Ruang makan juga merupakan ruang terbesar di rumah ini dengan ukuran 11,8 x 6,6 m (gambar 5). Ruangan ini memiliki empat buah pintu yang menghubungkan 3 ruangan dan teras belakang. Di tembok barat ruang makan terdapat dua buah pintu. Pintu yang pertama menghubungkan dengan ruang resepsi. Pintu yang kedua menghubungkan dengan ruang *denke*. Ruangan ini menjadi ruang pengetikan ketika perumusan proklamasi, 17 Agustus 1945. Ruangan *denk* berukuran 2,8 x 4,7 m. Namun kini pintu yang menghubungkan ruang *denke* dengan ruang makan telah ditutup.

Sebelah barat ruang *denke*, terdapat dua buah ruangan yang merupakan ruang dapur. Pada salah satu ruang dapur yang berukuran lebih luas, terdapat sebuah tangga. Dapur pertama yang dianggap sebagai dapur utama berukuran 3,8 x 5,2 m. Dapur kedua yang lebih kecil dan terletak di belakang dapur utama berukuran 3,3 x 3,3 m. Tepat di sebelah dapur terdapat sebuah ruangan bernama gallery yang kini telah menjadi ruang audio visual (auditorium). Di sebelah timur dapur terdapat sebuah pintu yang langsung menuju ke tangga utama rumah ini.

Lantai dua rumah ini memiliki ruang lebih banyak dibanding lantai satu. Pada lantai ini terdapat 3 balkon, 5 ruangan, dan 3 kamar mandi (gambar 6). Tepat di depan

tangga terdapat kamar tidur sekretaris dengan ukuran 5,2 x 7,6 m. Pada ruangan ini terdapat dua buah pintu yang masing-masing menghubungkan dengan kamar mandi dan ruang tidur staff. Kamar mandi pertama ini memiliki dua buah pintu. Kamar mandi ini berukuran 5,2 x 2,8 m. Pintu pertama yang menghubungkan dengan ruang tidur sekretaris, pintu kedua menghubungkan langsung ke lorong luar.



Gambar 5.108 Lemari yang menempal pada dinding selatan kamar.
(Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)

Ruang pribadi staf merupakan ruang terbesar kedua di lantai dua dengan ukuran 8 x 7 m (gambar 5.108). Pada ruang kerja ini terdapat empat buah pintu, pintu pertama di sebelah timur menghubungkan dengan ruang tidur sekretaris. Pintu kedua, di sebelah pintu pertama, menghubungkan dengan lorong luar. Pada pintu ketiga yang terletak di selatan kamar, menghubungkan dengan kamar mandi kedua yang berukuran 5,2 x 2,8 m. Pintu ketiga yang terletak di utara kamar, menghubungkan dengan balkon dengan pemandangan halaman depan rumah tersebut (gambar 7). Pemandangan ini juga dapat dilihat melalui sepasang jendela yang ada di ruangan. Jendela ini memiliki tralis untuk menempatkan kain penutup jendela. Meski terdapat jendela, dikarenakan jumlahnya terbatas sehingga ruangan ini memiliki pencahayaan alami yang kurang baik.



Gambar 5.109 Ruang tidur pembantu pribumi.
(Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)

Pada ruangan ini, khususnya bagian pintu pertama yang terletak di utara kamar menghubungkan dengan lorong luar. Pintu kedua yang terletak di barat kamar menghubungkan dengan kamar mandi kedua. Tepat di depan ruangan tidur pembantu pribumi terdapat sebuah tangga yang menghubungkan lantai dua dengan dapur. Jendela pada ruang tidur pembantu pribumi memiliki ukuran yang secara proporsional lebih kecil dibandingkan ruangan lain, yaitu 2,21 m x 76 cm. Selain itu, jendela dipasang secara sepasang seperti pada kamar lain. Dikarenakan ukuran jendela ini, pencahayaan pada ruangan pembantu pribumi cukup jelek. Fasilitas yang diberikan pada ruangan ini hanya stop kontak berjumlah empat. Berdasarkan apa yang diamati saat ini, tidak ada fasilitas penyimpanan barang seperti lemari dalam ruangan ini.

Ruangan yang keempat adalah ruangan kerja pribadi Laksamana Maeda (gambar 11). Ruangan ini berukuran 4,2 x 5,7 m. Pada ruangan ini terdapat empat buah pintu. Pintu pertama terletak di sebelah utara ruangan menghubungkan dengan balkon dengan pemandangan halaman depan rumah (gambar12).

Pintu selanjutnya terletak di sebelah barat ruangan terdapat dua buah pintu. Pintu pertama menghubungkan dengan kamar mandi pertama. Pintu kedua menghubungkan dengan lorong luar. Pintu terakhir terletak di selatan kamar, yang menghubungkan langsung dengan kamar Laksamana Maeda. Selain pintu, terdapat satu jendela pada ruangan ini dengan ukuran 1,3 x 2 meter. Baik pintu maupun jendela pada ruangan ini dibuat agar dapat menghalangi penglihatan dari luar dengan kain gordena atau kisi-kisi dari kayu. Ruangan ini dikarenakan berfungsi sebagai ruang kerja maka disediakan empat stop kontak serta lampu penerangan (gambar 13).



Gambar 5.110 Lampu ruangan pada ruang kerja Maeda
(Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)

Ruangan terakhir merupakan ruangan terbesar di lantai dua. Ruangan tersebut adalah ruangan tidur Laksamana Maeda. Ruangan ini berukuran 8 x 7,6 m. Ruangan ini memiliki empat buah pintu. Pintu pertama terletak di utara kamar, yang menghubungkan dengan ruang kerja pribadi Laksamana Maeda. Pintu kedua terletak di sebelah barat laut, yang menghubungkan dengan lorong luar. Pintu ketiga terletak di sebelah barat kamar, yang menghubungkan langsung ke

kamar mandi ketiga. Pintu terakhir terletak di selatan kamar menghubungkan dengan balkon belakang. ruangan ini satu-satunya yang memiliki akses menuju balkon belakang. Keseluruhan pintu yang mengarah ke ruang pribadi Maeda dibuat dari bahan kayu dan dilengkapi kunci yang berbentuk palang pada sisi yang mengarah ke dalam kamar untuk keamanan atau dilapisi kawat pada sisi yang mengarah keluar (gambar 14).



Gambar 5.11

Pengunci ruangan (kiri) dan pintu yang dilapisi kasa dari kawat pada kamar pribadi Maeda (kanan).
(Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)

Selain pintu, kamar Maeda juga memiliki jendela selayaknya kamar yang lainnya (gambar 15). Akan tetapi, jendela pada kamar pribadinya memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan ruangan lain, yaitu dengan ukuran 1,3 x 2 meter. Jendela ini juga memiliki tralis untuk memasang gordena atau kain penutup jendela dan disertai palang besi yang berada di sisi luar ruangan. Jumlah dari Jendela ini dibuat dan ditempatkan secara sepasang, sisi kiri dan kanan.



Gambar 5.12 Jendela pada ruangan pribadi Maeda (kiri) dan Ruang pribadi Laksamana Maeda (kanan).
(Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)

Jendela pada kamar pribadi Maeda juga berjumlah lebih banyak dibandingkan kamar lainnya, sehingga memberikan efek pencahayaan yang lebih baik dibandingkan kamar lain, khususnya seperti kamar pembantu rumah tangga. Selain pencahayaan yang bagus, kelebihan dari kamar ini adalah adanya fasilitas listrik melalui pemasangan enam stop kontak yang disediakan pada masing sisi tembok. Pada kamar Maeda juga disediakan lemari kayu yang ditempatkan di depan pintu kamar mandi pribadi Maeda (gambar 16). Hal ini tidak dijumpai pada ruangan privat yang lain. Terakhir, kamar pribadi Maeda memiliki kamar mandi privat. Kamar mandi ini memiliki ukuran 3,8 x 4,7 m (gambar 17).

Secara keseluruhan, rumah ini masih memiliki bentuk asli ketika awal bangunan ini dirancang. Hanya ada sedikit perubahan, seperti bertambahnya ruang audio visual (auditorium) di belakang toilet lantai satu, dan dijadikan kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Terdapat pula beberapa pintu yang ditambahkan dan dihilangkan. Seperti pintu masuk di lantai satu.



Gambar 5.113 Lemari pada ruangan tidur Maeda. (Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)



Gambar 5.114 Toilet pribadi milik Laksamana Maeda. (Sumber: Dokumentasi Pharmasetiawan, 2020)

Secara keseluruhan deskripsi ruangan pada museum Naskah Proklamasi dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan deskripsi yang telah dilakukan pada sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Rumah Maeda merupakan rumah dua lantai dengan 17 ruangan di dalamnya. Tiap-tiap ruang memiliki fungsi- fungsi khusus bagi kegiatan penghuninya. Berikut merupakan klasifikasi yang dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang telah dideskripsikan di atas berdasarkan luas, akses masuk dan keluar serta statusnya sebagai ruang *privat* atau ruang publik dalam bentuk tabel:

Tabel 1.

Ruangan lantai atas Kediaman Laksamana Maeda

NO	KETERANGAN	LUAS	AKSES MASUK DAN KELUAR	STATUS
1.	Kamar tidur Laksamana Maeda	8 x 7,6 m (kloset 3,8 x 2,3 m)	Kamar tidur Laksamana Maeda terletak di selatan rumah. Pada kamar ini terdapat empat buah pintu. Pintu-pintu tersebut menghubungkan kamar tidur Laksamana Maeda ke balkon belakang, ruang kantor pribadi, kamar mandi privat milik Laksamana Maeda, dan lorong luar.	Ruang Privat
2.	Ruang kantor pribadi	4,2 x 5,7 m	Ruang kantor pribadi terletak tepat di utara kamar tidur Laksamana Maeda. Pada ruangan ini terdapat empat buah pintu. Pintu-pintu tersebut menghubungkan ruangan ini dengan kamar tidur Laksamana Maeda, teras depan A, kamar mandi 1, dan lorong luar.	Ruang Privat
3.	Kamar sekretaris	5,2 x 7,6 m	Kamar sekretaris terletak tepat di utara tangga. Terdapat tiga buah pintu dalam ruangan ini. Pintu tersebut menghubungkan dengan ruang istirahat staff, kamar mandi 1, dan lorong luar.	Ruang Privat
4.	Ruang staff	8 x 7 m	Ruangan staff terletak di sebelah barat laut lantai dua. Terdapat empat buah pintu pada ruangan ini. Pintu tersebut menghubungkan dengan teras B, kamar mandi 2, kamar sekretaris, dan lorong luar.	Ruang Privat
5.	Kamar tidur pembantu	4,7 x 6 m	Kamar tidur pembantu terletak tepat di barat tangga. Hanya ada dua pintu di ruangan ini. Pintu tersebut menghubungkan ruangan ini dengan kamar mandi 2 dan lorong luar. Tepat di sebelah barat pintu yang mengarah ke lorong luar terdapat sebuah tangga yang mengarah ke dapur.	Ruang Privat
6.	Kamar mandi 1 (di dekat kamar sekretaris)	5,2 x 3,3 m	Kamar mandi 1 merupakan kamar mandi yang terletak tepat di depan tangga. Kamar mandi ini memiliki tiga buah pintu. Pintu tersebut menghubungkan kamar mandi ini dengan kamar sekretaris, ruang kerja pribadi, dan lorong luar. Kamar mandi 1 merupakan satu-satunya kamar mandi yang memiliki akses ke lorong luar.	Ruang Publik

**Pengkajian Data “Kawasan Menteng Jilid 2”;
Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan**

NO	KETERANGAN	LUAS	AKSES MASUK DAN KELUAR	STATUS
7.	Kamar mandi 2 (di dekat kamar tidur pembantu)	5,2 x 2,8 m	Kamar mandi dua merupakan kamar mandi yang terletak di dekat kamar tidur pembantu dan ruang staff. Hanya ada dua pintu di kamar mandi ini. Pintu tersebut menghubungkan dengan kamar tidur pembantu dan ruang staff.	Ruang Publik
8.	Kamar mandi 3 (di dalam kamar tidur Laksamana Maeda)	3,8 x 4,7 m	Kamar mandi ketiga merupakan kamar mandi privat milik Laksamana Maeda. Kamar mandi ini terletak di dalam kamar tidur Laksamana Maeda dan hanya memiliki satu buah pintu saja. Pintu tersebut mengarah langsung ke kamar tidur Laksamana Maeda.	Ruang Privat

(Sumber: Alnoza et. al., 2020)

Tabel 2.

Ruang lantai bawah

NO	KETERANGAN	UKURAN	AKSES MASUK DAN KELUAR	STATUS
1.	Ruang resepsi	7,1 x 8 m	Ruang resepsi adalah satu-satunya ruangan yang memiliki akses dengan pintu masuk. Ruang resepsi berbatasan dengan toilet di sebelah selatan dan hall di sebelah timur.	Ruang Publik
2.	Hall	8,5 x 5,7 m	Hall merupakan ruang kosong yang menjadi pembatas antara ruang resepsi dan ruang makan serta ruang studi. Hall berbatasan dengan ruang studi dan ruang makan di sebelah timur, tangga dan <i>denke</i> di sebelah selatan.	Ruang Publik
3.	Ruang makan	11,8 x 6,6 m	Ruang makan merupakan ruang terbesar di rumah ini. Ruang makan terletak di sebelah timur rumah. Ruangan ini memiliki empat buah pintu. Pintu tersebut menghubungkan ruang makan dengan ruang studi di sebelah utara, hall dan <i>denke</i> di sebelah barat, dan teras belakang rumah di sebelah selatan.	Ruang Publik

**Pengkajian Data “Kawasan Menteng Jilid 2”;
Gedung-Gedung yang Terkait dengan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan**

NO	KETERANGAN	UKURAN	AKSES MASUK DAN KELUAR	STATUS
4.	Ruang studi	6,6 x 4,7 m	Ruang studi merupakan ruangan yang terletak di utara rumah. Ruangan ini memiliki dua buah pintu. Pintu tersebut menghubungkan hall di sebelah barat dan ruang makan di sebelah selatan.	Ruang Privat
5.	<i>Denke</i>	2,8 x 4,7 m	<i>Denke</i> merupakan ruang kecil di selatan rumah. Ruang ini terletak di belakang tangga utama. Terdapat empat buah pintu di ruangan ini. Pintu-pintu tersebut menghubungkan ruangan ini dengan hall di sebelah utara, ruang makan di sebelah timur, teras belakang di sebelah selatan, dan dapur di sebelah barat.	Ruang Publik
6.	Dapur 1	3,8 x 5,2 m	Dapur 1 merupakan dapur yang berukuran lebih luas. Dapur 1 memiliki tiga buah pintu. Pintu tersebut menghubungkan ruang dapur 1 dengan <i>denk</i> di sebelah timur, dapur 2 dan <i>gallery</i> di sebelah selatan. Di bagian barat dapur 1 terdapat sebuah tangga yang mengarah ke kamar tidur	Ruang Publik
7.	Dapur 2	3,3 x 3,3 m	Dapur 2 merupakan dapur yang berukuran lebih kecil. Ruangan ini memiliki dua buah pintu, yang mana mengarah ke dapur 1 dan <i>gallery</i> .	Ruang Publik
8.	Toilet	2,3 x 4,7 m	Toilet ini merupakan satu-satunya toilet yang terletak di lantai bawah. Toilet terletak di barat daya rumah. Toilet ini memiliki satu buah pintu. Pintu ini menghubungkan dengan ruang resepsi dan berbeda dengan dengan pintu masuk	Ruang Publik
9.	<i>Gallery</i>	Tidak diketahui	<i>Gallery</i> terletak di barat daya rumah. Pada ruangan ini terdapat dua buah pintu, yang menghubungkan dengan dapur 1 dan dapur 2.	Ruang Publik

(Sumber : Alnoza et. al., 2020)

Tabel 3.

Tabel Analisis

NO.	RUANGAN	AKSESIBILITAS MAEDA	AKSESIBILITAS STAFF	AKSESIBILITAS SEKRETARIS PRIBADI	AKSESIBILITAS PEMBANTU PRIBUMI
1.	Kamar tidur Laksamana Maeda	Memiliki akses	Akses terbatas	Akses terbatas	Akses terbatas
2.	Ruang kantor pribadi	Memiliki akses	Akses terbatas	Akses terbatas	Akses terbatas
3.	Kamar sekretaris	Memiliki akses	Akses terbatas	Memiliki akses	Akses terbatas
4.	Ruang staff	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas	Akses terbatas
5.	Kamar tidur pembantu	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses
6.	Kamar mandi 1 (di dekat kamar sekretaris)	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses
7.	Kamar mandi 2 (di dekat kamar tidur pembantu)	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas	Memiliki akses
8.	Kamar mandi 3 (di dalam kamar tidur Laksamana Maeda)	Memiliki akses	Akses terbatas	Akses terbatas	Akses terbatas
9.	Ruang resepsi	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas
10.	Hall	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas
11.	Ruang makan	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas
12.	Ruang studi	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas
13.	<i>Denke</i>	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Akses terbatas
14.	Dapur 1	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses
15.	Dapur 2	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses
16.	Toilet	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses
17.	<i>Gallery</i>	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses	Memiliki akses

(Sumber : Alnoza et. al., 2020)

Pembagian tiap ruangan dan ruang publik di tiap ke dalam ruang privat dan publik pada dasarnya memberikan informasi mengenai ruang gerak penghuni rumah dalam kegiatan kesehariannya. Berikut tabel yang berisi gambaran aksesibilitas individu penghuni rumah terhadap ruangan yang ada pada rumah Laksamana Maeda:

Penghuni rumah yang memiliki kemampuan untuk mengakses ruangan terbanyak adalah Laksamana Maeda, meliputi seluruh ruangan. Staff dan Sekretaris

memiliki kemampuan mengakses ruangan yang setara, meliputi 13 ruangan. Perbedaan di antara aksesibilitas yang dimiliki oleh staff dan sekretaris terdapat pada ruang privat masing-masing. Kemampuan mengakses ruangan terendah dimiliki oleh golongan pembantu pribumi, meliputi tujuh ruangan.

Umumnya kemampuan mengakses tiap individu berkaitan dengan status ruangan sebagai ruang privat bagi masing-masing individu. Sebagian individu dapat mengakses ruangan privat yang dimiliki orang lain misalnya Laksamana Maeda terhadap ruang privat yang dimiliki staf, sekretaris dan golongan pembantu. Sebagian ada yang dapat mengakses ruang publik karena berkaitan aktivitas yang terjadi pada ruangan tersebut seperti fasilitas toilet dan dapur namun ada beberapa ruang publik tidak diakses misal ruang makan yang tidak dapat diakses golongan pembantu pribumi.

Pembagian pada tabel yang sudah diuraikan menunjukkan adanya perbedaan aksesibilitas ruangan yang dimiliki oleh masing-masing individu, hal ini disebabkan perbedaan status kelas sosial dari antar individu penghuni rumah. Kelas sosial pada perspektif Marxist dikaitkan dengan identitas seseorang terhadap faktor produksi, misalnya seperti jabatan pekerjaan beserta karakteristik pekerjaan. Sehingga kelas sosial seseorang tidak akan lepas dari kapasitas seseorang untuk membuat suatu keputusan dan kapasitasnya dalam menguasai suatu sumber daya dan orang lain (DiMaggio 2012, 18).

Kelas sosial salah satunya dapat direpresentasikan melalui hak istimewa yang dimiliki seseorang karena posisinya dalam hierarki sosial. Hak istimewa ini memberikan orang tersebut status khusus yang memberikan keuntungan bagi dirinya dibandingkan yang lain, misalnya bagaimana dirinya dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Furr, Briggs, and Magnus 2012, 20). Salah satunya dapat direpresentasikan dengan bagaimana dirinya dapat mengakses ruangan tertentu sesuai dengan kelas sosialnya (Steadman 2016, 212).

Keterkaitan kelas sosial dan aksesibilitas dapat dijelaskan melalui kelas sosial individu penghuni rumah dengan aksesibilitas tiap ruangan di rumah Laksamana Maeda. Kelas sosial yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan jabatan, peran, dan karakteristik pekerjaan yang dimiliki masing-masing individu penghuni rumah. Kelas sosial ini kemudian memberikan hak khusus bagi yang secara hierarki sosial lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dalam konteks rumah Laksamana Maeda, hak khusus ini berupa aksesibilitas terhadap ruang-ruang tertentu yang ada di dalam rumah.

Laksamana Maeda secara sistem hierarki berada di tingkat teratas karena ia memiliki jabatan dan peran sebagai laksamana menghubungkan angkatan darat dan laut dan perannya sebagai orang yang memiliki rumah. Staff dan sekretaris memiliki kedudukan yang tidak jauh berbeda dalam kelas sosial. Akan tetapi, jabatan dan peran yang berbeda, yaitu salah satunya sebagai staff militer pada Angkatan Laut Jepang yang turut membantu Maeda dalam kedinasan dan satu lagi sebagai sekretaris yang membantu Maeda dalam mengatur urusan rumah tangga. Tingkatan kelas sosial terendah ditempati oleh golongan pembantu pribumi. Mereka memiliki peranan sebagai yang mengatur urusan domestik. Berdasarkan pembagian kelas sosial tersebut, aksesibilitas yang dimiliki antar kelas sosial sangat beragam. Laksamana Maeda memiliki hak akses terhadap seluruh ruangan yang ada di rumah dikarenakan dirinya menempati kelas sosial tertinggi dalam hierarki sosial yang terbentuk di rumah Maeda. Staff dan sekretaris menempati kelas sosial yang sama dalam hierarki sosial di rumah.

Oleh sebab itu, staff dan sekretaris memiliki jumlah akses ruangan yang sama dan masing individu tidak dapat mengakses ruangan privat satu sama lain. Golongan pembantu rumah tangga menempati posisi terendah dalam hierarki sosial di rumah, oleh sebab itu, golongan ini hanya dapat mengakses ruang privat yang dimilikinya dan ruang publik tertentu.

Bedasarkan ukuran yang dimiliki ruang privat antar individu, Laksamana Maeda memiliki ruang privat terluas dibandingkan individu yang lain. Berbeda dari variabel aksesibilitas, staff dan sekretaris memiliki perbedaan pada ukuran ruang privat yang dimilikinya. Staf dikarenakan jabatannya berada pada struktur hierarkis yang lebih tinggi dan perannya yang membantu Maeda dalam pekerjaannya memiliki ukuran ruangan yang lebih besar dibandingkan sekretaris. Golongan pembantu pribumi yang menempati kelas sosial terendah, sehingga ukuran ruangan privat mereka tergolong lebih kecil dan sempit (mengingat dihuni tujuh orang),

Fasilitas dari tiap ruang nampaknya juga ditentukan oleh kelas sosial individu tiap penghuni. Ruang privat Maeda seluruhnya mendapat fasilitas berupa toilet, jendela yang memiliki kasa dari kawat, lemari dengan jumlah paling banyak dan kunci berupa palang pada akses pintu tiap-tiap kamar. Maeda juga mendapatkan media untuk mengakses ruangan-ruangan lain selain ruang privatnya berupa pintu yang menuju pelbagai arah. Balkon juga merupakan fasilitas penting yang dimiliki oleh Maeda, mengingat dua ruangan privat Maeda dilengkapi dengan balkon yang menghadap ke seluruh bagian luar rumah. Staf dalam hal ini menempati posisi yang memungkinkan dirinya untuk mendapat fasilitas setingkat di bawah Maeda. Ruang privat staff (kamar pribadi) juga dilengkapi fasilitas berupa balkon, walaupun hanya menghadap arah depan rumah. Kamar mandi juga merupakan fasilitas yang didapatkan oleh staff, kendati masih harus berbagi dengan golongan pembantu rumah tangga. Sekretaris mendapatkan bagian fasilitas peringkat ketiga, karena hanya mendapatkan fasilitas berupa jendela dengan pemandangan ke depan rumah dan kamar mandi. Pembantu rumah tangga mendapatkan fasilitas yang paling rendah, karena hanya mendapat fasilitas berupa kamar mandi.

Penataan rumah Maeda dengan demikian memiliki keterkaitan dengan kelas sosial penghuninya. Tiap penghuni mendapatkan hak khusus (*privilege*) dalam aspek aksesibilitas, fasilitas dan ukuran ruangan. Maeda sebagai pemilik rumah merupakan

pemegang tampu kelas sosial tertinggi, sehingga hak khusus yang dimiliki dianggap paling besar daripada individu lainnya. Penataan ruangan beserta penempatan tiap individu di setiap ruangan dapat memberikan gambaran, bahwa pada masa pendudukan Jepang posisi kelas sosial sangat menentukan. Ruangan yang besar dengan fasilitas lengkap diisi oleh golongan yang relatif lebih tinggi dan berlaku juga sebaliknya. Laksamana Maeda nampaknya merepresentasikan nilai sosial di masyarakat yang berlaku di masa itu pada penataan ruang di rumahnya, sehingga sifat penataan ruang di rumah Maeda dapat dikatakan hirarkis.

Melalui perspektif arkeologi rumah tangga, rumah Laksamana Maeda memiliki suatu pola yang khusus di dalam penataan ruang-ruang di dalamnya. Pola ini dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang merepresentasikan kondisi kelas sosial masyarakat masa itu di Jakarta ataupun Menteng secara khusus. Representasi kelas sosial tercermin dari pembagian ruang privat dan aksesibilitas dari tiap-tiap individu atau kelompok yang mendiami rumah ini. Demikian pada akhirnya secara tidak langsung pola penataan ruang di rumah Laksamana Maeda memberikan informasi yang cukup dalam merekonstruksi perilaku antar individu yang masing-masing tidak setara.

DAFTAR SUMBER

A. Buku

- Adams, Cindy. (2014). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Allison, Penelope. 1998. "The Household in Historical Archaeology." *Australasian Historical Archaeology* 16: 16–29.
- Brooks, Robert L. 2012. "Decisions in Landscape Setting Selection of The Prehistoric Caddo of Southeastern Oklahoma: A GIS Analysis." In *The Archaeology of the Caddo*, edited by T.K. Pertulla and C.P. Walker, 335–62. Alaska: University of Nebraska Press.
- Bruck, Mellissa G. 2001. *Making Places in the Prehistoric World: Themes in Settlement Archaeology*. London: Taylor & Francis Publishers.
- Budiharjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: Alumni Bandung.
- Bakar Loebis, Aboe. (1995). *Kilas Balik Revolusi Kenangan Pelaku dan Saksi*. Jakarta: UI Press.
- Basri, Chairul. (2003). *Apa Yang Saya Ingat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Benda, H. J. (1958). *The Crescent and The Rising Sun : Indonesia Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945*. Bandung: Van Hoeve.
- Dali, A. M. (2014). Sejarah Intelejen Di Malaysia. Dalam A. M. Dali, *Sejarah Intelejen Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- DiMaggio, Paul. 2012. "Sociological Perspective on The Face-To-Face Enactment of Class Distinction." In *Facing Social Class: How Societal Rank Influences Interaction*, edited by S.T. Fiske and H.R. Markus, 15–38. New York: RusselSage Foundation.
- Doxiadis, Constatinos Apistolou. 2005. "The Science of Ekistics." *Proquest*, 430–35.
- Frances Gouda. (2002). *Indonesia Merdeka Karena Amerika ?* Jakarta : Serambi.
- Furr, Suzan, Wanda Briggs, and Virginia Magnus. 2012. "Understanding Wealth and Privilege." In *Social Class and Helping Profession*, edited by D.C. Sturm and

- D.M. Gibson, 69–86. London: Taylor & Francis Publishers. Hardiman, Fransisco Budi. 2011. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gie, T. L. (1993). *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hannigan, Tim. (2015). *A Brief History of Indonesia*. Singapore: Tuttle Publishing.
- Hatta, Mohammad. (1969). *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas.
- Harry A Poeze. (2008). *Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 : September 1948 – Desember 1949*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harry J Benda. (1958). *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*. Bandung : Van Hoeve.
- Hendon, Julia A. 2007. “Living and Working at Home: The Social Archaeology of Household Production and Social Relation.” In *A Companion to Social Archaeology*, edited by L. Meskell and R.W. Preucel, 272–86. Oxford: Blackwell Publishing.
- Heuken, Adolf. 1996. *Tempat-Tempat Bersejarah Di Jakarta*. Jakarta: Penerbit Cipta Loka Caraka.
- Heuken, Adolf, and Grace Pamungkas. 2001. *Menteng: Kota Taman Pertama Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cipta Loka Caraka.
- Ilham, O. K. (2016). *Proklamasi Sebuah Rekonstruksi*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Isnaeni, H. F. (2015). *Seputar Proklamasi Kemerdekaan: Kesaksian, Penyiaran, dan Keterlibatan Jepang*. Jakarta: Kompas.
- Kosenodiprodjo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2, Pemerintah Republik Indonesia 1945*. (1951). Jakarta: S.K. Seno.
- Loebis, A. B. (1995). *Kilas Balik Revolusi Kenangan Pelaku dan Saksi*. Jakarta: UI Press.
- Malik, Adam. (1982). *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Magetsari, Noerhadi. 2016. “Perkembangan Arkeologi Mutakhir.” In *Perspektif Arkeologi Masa Kini: Dalam Konteks Indonesia*, 332–52. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Margi, K. S. (2014). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Orde Baru*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono Djojohadikusumo. (2014). *Kenang-Kenangan Dari Tiga Zaman, Sebuah Kisah Kekeluargaan Tertulis*. Jakarta: Yayasan Apsari Djojohadikusumo.

- Marthabaya, M. R. (1989). *Peristiwa-Peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- McIver Jr., Walter. 2010. "An Eistics for Information and Communication Technologies." In *Information and Communication Technologies, Society and Human Beings: Theory and Framework (Festschrift in Honor of Gunilla Bradley): Theory and Framework (Festschrift in Honor of Gunilla Bradley)*, edited by D.M. Haftor and A. Mirijamdotter, 47–58. New York: Information Science Reference.
- M.D, S. (1988). *Jakarta Dari Tepian Air Ke Kota Proklamasi*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah.
- Moore, James A., and Arthur S. Keene. 2014. *Archaeological Hammers and Theories*. Amsterdam: Elsevier.
- Noer, Deliar. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Notosusanto, Nugroho. (1976). *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta : Pusat Sejarah ABRI.
- Nugroho, Arifin Suryo & Ipnong Jazimah. (2011). *Detik-Detik Proklamasi. Saat-Saat Menegangkan menjelang Kemerdekaan Republik*. Jakarta: Penerbit Narasi.
- Nugroho, Agus. 2019. *Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi*. Jakarta: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
- Ong, H. (2015). *Aku Dalam Pusaran Sejarah Negeriku: Proklamasi Kemerdekaan Sampai G30S 1965*. Bandung: Ultimus.
- Oyokola, Isaac A. 2020. "Social Stratification." In *Introductory to Sociology*, edited by Olankule A. Ogenbameru. Ife-ife: Obafemi Awolowo University Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, & Nugorho Notosusanto. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramoedya Ananta Toer. (2011). *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta : Lentera.
- Preucel, Robert W., and Stephen A. Mrozowski. 2011. *Contemporary Archaeology in Theory: The New Pragmatism*. New Jersey: John Wiley and Sons Publishers.
- Prossor, Lauren, Susan Lawrence, Alasdair Brooks, and Jane Lennon. 2012. "Household Archaeology, Lifecycles and Status in a Nineteenth-

- Century Australian Coastal Community." *International Journal of Historical Archaeology* 16 (4): 809–27.
- Rinardi, Haryono. 2017. "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia." *Jurnal Citra Lekha* 2 (1): 143–50.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.
- Shahab, A. (2017). *Sang Penyebar Berita Proklamasi*. Jakarta: Zaytuna Ufuk Abadi.
- Sharer, Robert J., and Wendy Ashmore. 2003. *Archaeology: Discovering Our Past*. New York: McGraw-Hill Publishers.
- Sjamsuddin Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Stark, Barbara L., and Philip J. Arnold. 1999. *Olmec to Aztec: Settlement Patterns in the Ancient Gulf Lowlands*. Tucson: University of Arizona Press.
- Steadman, Sharon R. 2016. *Archaeology of Domestic Architecture and the Human Use of Space*. Amsterdam: Routledge.
- Suhartono. (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sweitz, Samuel R. 2012. *On the Periphery of the Periphery: Household Archaeology at Hacienda San Juan Bautista Tabi, Yucatan, Mexico*. Oxford: Springer.
- Thee Liang Gie. (1993). *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Trigger, Bruce J. 1967. "Settlement Archaeology. Its Goals and Promise." *American Antiquity* 32 (2): 149–60.
- Willey, Gordon R. 1953. *Prehistoric Settlement Patterns in The Viru Valley*. Washington: United States Government Printing Office.
- Yunarti, S. S. (2010). *Konflik Di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas.
- Yuniarti, Rini D. (2003). *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

B. Jurnal

- Fatwatun Nurlaili. "Peran Dinas Kesehatan Sipil (Burgerlijke Geneeskundigen Dienst) Dalam Penanganan Epidem Pes di Jawa Timur Pada Tahun 1910-1916". Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

- Haryono Rinardi. (2017). "Proklamasi 17 Agustus 1945 : Revolusi Politik Bangsa Indonesia". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol.2. No.1. hlm 143-150.
- I Wayan Pardi. (2019). "Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 : Diskursus Pembukaan UUD 1945 Dalam Perspektif Sejarah". *Histori : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. Vol. II.
- Koesnadi Hardjasoemantri. "Peran Pemuda Pelajar Indonesia dalam Perjuangan Bangsa". *Jurnal Sejarah* No. 13 Tahun 2007
- Lo Angela Irena "Monumentalitas Arsitektur Modern pada Gedung Pola di Jakarta. Skripsi pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahiyangan.
- Pardi, I. W. (2019). Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 Dalam Perspektif Sejarah. *Historia* , 2.
- Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945 : Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*.
- Sarjiyanto. "Penggunaan Ubin-ubin Enkaustik: Studi Kasus Pada beberapa Bangunan Abad ke-19 di Indonesia Masa Hindia Belanda". Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jl. Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. jurnal.arkeologi.kemendikbud.go.id
- Soewito, Irna H. N. Hadi (ed.). *BAPERPI (Badan Perwakilan Pelajar-Pelajar Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Tjikini 71.

C. Website

- Eduard Lukman. "Bung Karno, dari Oranje Boulevard ke Pegangsaan Timur 56". *Harian Kompas*.
- Galeri Nasional. "Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno Hatta" galnasonline.id/poros/karya
- Hendrajit, Mengenang Komunitas Mahasiswa Prapatan 10, Menteng 31, dan Tjikini 71. <https://aktual.com/mengenang-komunitas-mahasiswa-prapatan-10-menteng-31-dan-tjikini-71/>. Diakses 6 Januari 2016.
- Heyder Affan ."Rumah Proklamasi, kisah di balik pembongkaran, dan impian membangun 'rumah tiruannya". *bbc.com*
- Indah Yant "Dienst der volksgezondheid dan Propaganda Kesehatan di Banyumas 1925-1930". <http://lib.ui.ac.id/opac/ui>

Mochammad Guntur yang berjudul Peran Moeffreni Moe'min Pada Peristiwa Rapat Raksasa Ikada. Diakses dalam www.academia.edu pada 15 Oktober Pukul 21.00.

Muhamad Alnoza "The Development of Menteng Settlement in Colonial Period (1910-1942): An Catchment Are Analysis". <https://www.researchgate.net> National Geographic Indonesia. Kisah Sang Penyebar Berita Kemerdekaan Indonesia ke Penjuru Duni

Pusat Dokumentasi Arsitektur. "Misteri Pembongkaran Gedung Proklamasi". pda.or.id

Sejarah FKUI. <https://fk.ui.ac.id/>

Sopandi Setiadi. "Gedung Pola: Etalase Orde Lama Sarat Makna", www.arsitekturindonesia.org/ diakses tanggal April 2017

Syefri Luwis. "Epidemi Penyakit Pes Di Malang 1911 - 1916"

Tim redaksi. "Sejarah Hari Ini 6 Maret 1942: Jepang Masuk Indonesia, Gubernur Jenderal Van Mook Lari Ke Australia. voi.id

www.Panjimas.com artikel yang berjudul "Masyarakat Betawi dan Warga Jakarta akan Peringati Peristiwa Ikada di Monas". Diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 21.00.

www.Sejarahlengkap.com , diakses pada 13 Oktober pukul 21.00.

www.Sejarahjakarta.com, diakses pada 12 Oktober pukul 20.00.

www.kelurahancimpedak.com, diakses pada 16 Oktober 2020 Pukul 22.00.

www.Academia.edu, diakses pada 14 Oktober 2020 Pukul 22.00.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Sidang BPUPK - 1.jpg/300px-Sidang BPUPK - 1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Sidang_BPUPK_-_1.jpg/300px-Sidang_BPUPK_-_1.jpg)) Di akses 15 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB.

<https://www.hariansejarah.id/2017/01/BPUPK-dan-perumusan-dasar-negara.html>) Di akses 15 Oktober 2020, pukul 20.45 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/12/130000169/gerakan-tiga-a-dan-propaganda-jepang?page=all>) Di akses 15 Oktober 2020, pukul 20.50 WIB.

<https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSoVeVzS4OSkQ3qH9utxn0-oGjm5y7q0OKSqQ&usqp=CAU>) Di akses 15 Oktober 2020, pukul 20.40 WIB.

<https://www.hariansejarah.id/2017/01/organisasi-militer-bentukan-jepang-di.html>)
Diakses 15 Oktober 2020, pukul 20.30 WIB.

D. Dokumen

- Ir. J. van Gendt. "Het Koningin Wilhelmina Instituut voor Hygiëne en Bacteriologie," *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*, Edisi 36, No. 18/19, 1 November 1933, hlm. 85-90.
- "Uit Indie. Gedenkplaat Prof. Walch Onthuld," *Christelijk dagblad voor Nederland De Amsterdammer*, 28 November 1935.
- "De Opvolging Van Prof. Walch," *Deli courant*, 20 Mei 1935.
- Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*, 29 November 1949, No. 98.
- "Berichten. Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting," *Medisch maandblad*, 1 Januari 1946, hlm. 433-434.
- "Berichten. Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting," *Medisch maandblad*, 1 Januari 1948, hlm. 433-434.
- "Verslagen en Berichten," *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, 10 Desember 1935, no. 25.
- Bataviaasch nieuwsblad*, 16 September 1936.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 22 September 1936.
- "Koningin Wilhelmina-instituut," *Bredasche courant*, 19 Juli 1933.
- Soerabaijasch handelsblad*, 19 November 1935.
- De locomotief*, 20 November 1935.
- "Wetenschappen, De 'Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting,'" *De Telegraaf*, 5 Januari 1939.
- "Koningin Wilhelmina Jubileum-Stichting, uit het dertiende jaarverslag," *De Indische courant*,
31 Desember 1937, *Tweede Blad IV*.
- "Kort Verslag van de Eerste Nederlandsch-Indische Lepra Conferentie, Gehouden in het Koningin Wilhelmina Instituut voor Lepra Onderzoek te Batavia op 18

- Februari 1936," *Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië*, Edisi 25, No. 1, 01 April 1936, hlm. 105-106.
- "Koningin Wilhelmina Instituut. Overdragen aan Medische Hoogeschool," *De avondpost*, 31 Maret 1933.
- "Koningin Wilhelmina-instituut aanden Lande Overgedragen," *De avondpost*, 18 Juli 1933."Koningin Wilhelmina-Instituut," *Algemeen Handelsblad*, 18 Juli 1933.
- "Koningin Wilhelmina-Instituut," *De Gooi- en Eemlander: nieuws en advertentieblad*, 18 Juli 1933.
- "BATAVIA. Het Koningin Wilhelmina Instituut," *De koerier*, 18 Juli 1933.
- Peperelli, "Jaarverslag Geneeskundige Hoogeschool". *Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, 5 Desember 1933, no. 25, hlm. 1628-1629.
- Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, 4 Desember 1934, no 25. Koleksi arsip foto dan peta KITLV Leiden, Leiden University Libraries, dan Tropenmuseum.
- "Hotel Schomper," *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië* tanggal 11 Maret 1931, hlm. 2.
- "Hotel Schomper," iklan surat kabar *De locomotief*, 18 April 1934.
- "Hotel Schomper," iklan surat kabar *Bataviaasch nieuwsblad*, 18 Juli 1936, hlm. 1.
- "Hotel Schomper," iklan surat kabar *Bataviaasch nieuwsblad*, 15 Agustus 1936, hlm. 1.
- "Hotel Schomper," iklan surat kabar *De locomotief*, 7 Februari 1940.
- "De Moorzaak in Hotel Schomper," *De Sumatra post*, 18 Agustus 1941, hlm. 1.
- "Advertentien," iklan surat kabar *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 28 Januari 1932.
- Indisch maçonniek tijdschrift*, jrg 44, 1938-1939, 01-01-1938 01-01-1938, hlm. 1221.
- Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië*, 1939-1940, Deel: 2 1939, hlm. 442.
- Vorig Volgend Levende talen*, 1939 [volgno 2] 01-01-1939 (schatting), hlm. 2.
- Mededeelingen*, jrg 10, 1936-1941, no 2, 01-07-1939 01-07-1939, hlm. 53.
- "Onze Bridgerubriek," *Bataviaasch nieuwsblad* 14-09-1936, hlm. 1.
- Bataviaasch nieuwsblad* 23-01-1937, hlm. 5.
- "Boekhoeden," *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 5, 7, 9 September 1916.

"Tehuis in Holland," *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 31 Oktober 1925.

"Tehuis in Holland," *De locomotief*, 2 November 1925.

"Tehuis in Holland," *Deli courant*, 4 November 1925.

"Postkantoor Tjikini," *Bataviaasch nieuwsblad*, 17 Februari 1942

Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 11 Juli 1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 13 Juli 1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 12 Juli 1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 9 Juli 1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 17-07-1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 20-07-1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 19-08-1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 09-08-1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 14-08-1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 02-10-1946.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 26-08-1947

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 10 April, 12 April, 29 April, 28 Mei, 4 Juli, 18 Agustus 1947.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 4 Juli 1947.

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 15 Februari 1947.

De nieuwsgier, 31 Maret 1951.

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 25 Juli 1957



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
TA 2022



PT. TAMBORA SETIA JAYA
KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN